



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BONTANG



KOTA PANGKAL PINANG
(KATEGORI: PARIWISATA)



L K P J

TAHUN ANGGARAN 2019





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2019 ini dapat tersusun sebagai implementasi amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

LKPJ Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Sebagai laporan penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan dokumen LKPJ ini dapat menjadi salah satu media yang mampu memberikan informasi secara transparan dan komprehensif terkait pencapaian indikator kinerja daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 kepada DPRD Kota Bontang. Berbagai informasi tentang pencapaian keberhasilan, peluang, hambatan, dan tantangan yang dihasilkan dan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019, diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif dan positif untuk penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya. Mudah-mudahan penyajian LKPJ ini dapat menjadi cermin bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Kota Bontang untuk dapat mengevaluasi kinerjanya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Sehingga kedepan kinerja penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lebih produktif, inovatif, efektif dan efisien dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas partisipasi aktif dan dukungannya dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bontang.



Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan bathin kepada kita untuk melaksanakan bagian dari pengabdian serta tanggungjawab yang baik kepada Kota Bontang yang kita cintai ini menuju terwujudnya Bontang yang Smart, Green dan Creative.

Bontang, 9 Maret 2020

Wali Kota Bontang,

dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG



Daftar Isi

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vii
Bab I. Pendahuluan	I – 1
1.1. Dasar Hukum	I – 1
1.2. Visi dan Misi	I – 1
1.3. Strategi dan Arah Pembangunan Kota Bontang	I – 5
1.4. Prioritas Daerah	I -18
1.5. Gambaran Umum Daerah	I – 3
1.6. Sistematika Penulisan	I - 22
Bab II. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	II – 1
2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	II – 1
2.2. Pengelolaan Belanja Daerah	II – 16
2.3. Pembiayaan Daerah	II – 32
2.4. Permasalahan dan Solusi	II - 36
Bab III. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	III – 1
3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Tahun 2019..	III - 1
3.2. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	III – 11
3.3. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan	III – 85
3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan.....	III - 96
Bab IV. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penugasan	IV – 1
4.1. Kementerian Sosial	IV – 3
4.2. Kementerian Pertanian	IV – 4
4.3. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat	IV – 8
4.4. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	IV - 14
Bab V. Penutup	V – 1
Lampiran	

**Daftar Tabel**

	Halaman
Tabel 1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang	I-7
Tabel 1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1	I-10
Tabel 1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2	I-15
Tabel 1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3	I-18
Tabel 1.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019	I-23
Tabel 1.6 Luas berdasarkan Kelas Ketinggian (Ha)	I-27
Tabel 1.7 Penggunaan Tanah di Kota Bontang	I-33
Tabel 1.8 Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang	I-34
Tabel 1.9 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	I-35
Tabel 1.10 Penyebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014-2017	I-35
Tabel 1.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2018	I-36
Tabel 1.12 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2013 – 2016	I-40
Tabel 1.13 PDRB Kota Bontang Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK 2010) (Rp. Juta) Tahun 2014-2019	I-42
Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2019 dan 2018.....	II-9
Tabel 2.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2019.....	II-13
Tabel 2.3. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.....	II-29
Tabel 2.4. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018	II-30
Tabel 3.1. Urusan Pemerintahan Daerah.....	III-1
Tabel 3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan Tahun 2019.....	III-5
Tabel 3.3. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Tahun 2019.....	III-12
Tabel 3.4. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019.....	III-19
Tabel 3.5. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019	III-22
Tabel 3.6. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019	III-25
Tabel 3.7. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Sosial Tahun 2019.....	III-29
Tabel 3.8. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Tenaga Kerja	



	Tahun 2019.....	III-31
Tabel 3.9.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019	III-33
Tabel 3.10.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pangan Tahun 2019	III-37
Tabel 3.11.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanahan Tahun 2019.....	III-39
Tabel 3.12.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019.....	III-41
Tabel 3.13.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019.....	III-44
Tabel 3.14.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019	III-47
Tabel 3.15.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019.....	III-50
Tabel 3.16.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perhubungan Tahun 2019.....	III-53
Tabel 3.17.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2019	III-56
Tabel 3.18.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2019	III-59
Tabel 3.19.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Penanaman Modal Tahun 2019.....	III-61
Tabel 3.20.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2019.....	III-64
Tabel 3.21.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kebudayaan Tahun 2019.....	III-67
Tabel 3.22.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan Tahun 2019.....	III-69
Tabel 3.23.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan Tahun 2019.....	III-72
Tabel 3.24.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2019.....	III-74
Tabel 3.25.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pariwisata Tahun 2019.....	III-75
Tabel 3.26.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanian Tahun 2019.....	III-78
Tabel 3.27.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perdagangan Tahun 2019.....	IV-80
Tabel 3.27	Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan,	



	Penelitian dan pengembangan Tahun 2019.....	III-83
Tabel 3.28	Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019.....	III-84
Tabel 3.29	Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Tahun 2019.....	III-88
Tabel 3.30	Realisasi Indikator Kinerja Utama Fungsi Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019 Tahun 2019.....	III-90
Tabel 3.31	Realisasi Indikator Kinerja Utama Realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2019.....	III-92
Tabel 3.32	Realisasi Indikator Kinerja Utama Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Fungsi Pendukung Tahun 2019.....	III-96
Tabel 3.33	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Anggaran 2018.....	III-102
Tabel 4.1.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT.PT. Kaltim Industrial Estate.....	IV-18
Tabel 4.2.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. PLN (PERSERO) UP3 Bontang	IV-20
Tabel 4.3.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pertamina Gas	IV-21
Tabel 4.4	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Nitrate Indonesia	IV-126
Tabel 4.5	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Parna Industri	IV-129
Tabel 4.6	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.....	IV-132
Tabel 4.7.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Daya Mandiri (KDM)	IV-134
Tabel 4.8.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Badak NGL	IV-136
Tabel 4.9.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pupuk Kaltim	IV-141
Tabel 4.10.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pamapersada Nusantara	IV-148
Tabel 4.11.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Indominco Mandiri..	IV-152
Tabel 4.15.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. KMU (Rumah Sakit PKT)	IV-156



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Bontang.....	I-23
Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Administrasi Kelurahan di Kota Bontang	I-24
Gambar 1.3. Letak geografis Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.....	I-26
Gambar 1.4. Peta Topografi Kota Bontang	I-28
Gambar 1.5. Peta Geologi Kota Bontang	I-30
Gambar 1.6. Peta Jenis Tanah Kota Bontang	I-31
Gambar 1.7. Persentase Penduduk Kota Bontang menurut Kelompok Umur Tahun 2019.....	I-38
Gambar 1.8. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bontang Tahun 2019	I-38
Gambar 1.9. Perkembangan IPM Kota Bontang.....	I-40
Gambar 1.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang 2011-2019	I-42
Gambar 2.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019..	II-8
Gambar 2.2. Komposisi Pendapatan Kota Bontang Tahun 2018 dan 2019 (%).....	II-10
Gambar 2.3. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 dan 2019.....	II-31
Gambar 2.4. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Langsung Tahun 2018 dan 2019.....	II-32



BAB 1 PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Bontang dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam seluruh rangkaian proses, dari perencanaan sampai pelaporan atas kinerja pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat, ditegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagai sebuah laporan tahunan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat laporan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang ditetapkan dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2019.

1.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan LKPJ Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
 16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang;
 17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
 18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2019;
 19. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2019;
 20. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2019;
 21. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Bontang Tahun 2018.



1.2. VISI DAN MISI

1.2.1 Visi

Visi Pembangunan Kota Bontang tahun 2016–2021 adalah “**Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat**”. Rumusan Visi tersebut mengandung elemen pokok pembangunan yaitu Menguatkan Bontang sebagai **Kota Maritim Berkebudayaan Industri** yang Bertumpu pada **Kualitas Sumber Daya Manusia** dan **Lingkungan Hidup** untuk **Kesejahteraan Masyarakat**. Secara filosofis masing-masing elemen pembangunan tersebut mengandung makna yang saling berkaitan, yakni sebagai berikut:

a. Kota Maritim

Kota Bontang sebagai entitas wilayah administratif dan ekologis didominasi oleh wilayah pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman menjadi salah satu penciri kuat (city icon) bagi Kota Bontang. Mewujudkan Bontang sebagai kota maritim pada prinsipnya merupakan keyakinan akan potensi utama kewilayahan yang memang sangat didominasi oleh pesisir dan laut. Dimensi kemaritiman ini mencakup domain fungsional ekonomi dan industri kelautan yaitu jasa-jasa kelautan, kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan maritim, eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak-gas di laut (off-shore) dan wilayah pesisir (on-shore). Fokus pengembangan potensi maritim ini juga sejalan dengan RPJMN 2015-2019 khususnya dimensi pembangunan sektor unggulan yang salah satu fokusnya adalah kemaritiman dan kelautan.

b. Berkebudayaan Industri

Sektor Industri merupakan sektor utama yang telah menjadi cikal-bakal tumbuh dan terbentuknya Kota Bontang sebagai daerah otonom. Oleh karena itu budaya industri telah sangat mewarnai dinamika pembangunan daerah Kota Bontang. Dalam konteks pembangunan Bontang sebagai sebuah kota, pengembangan sektor industri merupakan keniscayaan dan pilihan rasional



mengingat berkembangnya industri merupakan salah satu indikator utama kemajuan. Budaya industri yang sangat dinamis mewakili sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu mendorong dan menopang perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada umumnya. Sebagai elemen visi yang secara filosofis menggambarkan cita-cita pembangunan ekonomi daerah masa depan, berkebudayaan industri bermakna bahwa industri baik industri maritim maupun industri petrokimia akan berkembang dan semakin mapan dalam perannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen kunci dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia yang ingin diwujudkan dalam pernyataan visi RPJMD Kota Bontang 2016-2021. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi untuk masa depan yang akan menjadi salah satu pemicu efektifnya pencapaian dimensi pembangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan sebagai elemen utama peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu ditingkatkan baik dari sisi akses maupun kualitasnya. Sejalan dengan visi untuk mewujudkan kota berkebudayaan industri, pengembangan SDM tentu akan diarahkan pada penguatan dan penguasaan bidang industri sehingga pada gilirannya akan siap bersaing dan siap mengisi kebutuhan tenaga kerja baik dalam lingkup lokal, regional, maupun global.

d. Kualitas lingkungan hidup

Kota Bontang adalah kota dengan struktur industri yang sangat kuat, disamping menjadi sektor utama penopang perekonomian kota, keberadaan industri tersebut juga berimplikasi pada ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan pencemaran. Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang akan dirumuskan harus mampu mengaplikasikan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjamin keseimbangan antara pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Elemen kualitas



lingkungan hidup dalam struktur visi pembangunan RPJMD merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya menjamin kelestarian lingkungan hidup sebagai elemen utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

e. Kesejahteraan Masyarakat

Elemen kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin diwujudkan melalui implementasi berbagai program pembangunan. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan industri yang produktif dan berkeadilan, dan terjaminnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terwujudnya elemen-elemen pembangunan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang mencakup aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial baik untuk saat ini maupun masa datang.

1.2.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi "Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat", maka Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

1.2.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan masing-masing misi, tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1.**

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang

Misi I : <i>Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia</i>			
Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.	Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua
		2.	Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua
2.	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	3.	Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama
		4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
Misi II: <i>Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup</i>			
Tujuan		Sasaran	
1.	Mengembangkan pembangunan kota yang ramah lingkungan	1.	Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi
		2.	Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan
		3.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau
		4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
		5.	Menekan laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum	6.	Meningkatnya akses pelayanan air minum
		7.	Terlaksananya konservasi sumber daya



			air
3.	Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan	8.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
		9.	Terselesaikannya permasalahan banjir
Misi III : Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim			
Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah	1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
		2.	Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim
		3.	Meningkatnya Perdagangan dan industri
2.	Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang	4.	Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota
		5.	Meningkatnya usaha mikro kecil

1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.



Disamping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Dalam mencapai sasaran pembangunan Kota Bontang, maka telah ditetapkan strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran pembangunan. Tabel berikut ini adalah strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kota Bontang tahun 2016-2021.



**Tabel 1.2.** Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1**Misi 1: Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia**

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua	1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas dan status lembaga pendidikan.	1.1.	Peningkatan persentase tingkat kelulusan
				1.2.	Pengembangan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan sekolah rujukan
				1.3.	Peningkatan kualitas kelompok pendukung Pendidikan Anak Usia Dini
				1.4.	Mendorong status STITEK Bontang menjadi Perguruan Tinggi Negeri
			2. Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang mampu mendorong siswa berprestasi dan iklim inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah.	2.1.	Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
				3. Meningkatkan minat baca dengan perbaikan kualitas dan aksesibilitas perpustakaan bagi masyarakat. Mendorong keberadaan perpustakaan ditengah-tengah masyarakat.	3.1.
			3.2.		Melengkapi koleksi buku selain ilmu pengetahuan juga ilmu-ilmu keterampilan.
			4. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung peningkatan prestasi siswa yang berahlak mulia dan berwawasan lingkungan	4.1.	Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksisting
				4.2.	Peningkatan akhlak dan budi pekerti siswa melalui pendidikan agama
				4.3.	Mengembangkan Sekolah Hijau dan Sehat (<i>Eco School</i>)



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
				4.4.	Penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa.
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan untuk semua	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan	1.1.	Peningkatan jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
				1.2.	Memberikan jaminan perlindungan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan	2.1	Merevitalisasi, mereorientasi dan memperbaiki manajemen puskesmas, dan puskesmas pembantu
				2.2.	Pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu
				2.3.	Peningkatan mutu pelayanan, sarana dan prasarana RSUD
			3. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan	3.1	Pemenuhan kuantitas dan Peningkatan kualitas SDM Kesehatan
			4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan perbaikan gizi masyarakat	4.1.	Mendorong peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam upaya penerapan PHBS
				4.2.	Melakukan perbaikan gizi masyarakat
				4.3.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
				4.4.	Program pengembangan model operasional BKB Pos Yandu PADU
				4.5.	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
			5. Meningkatkan upaya pemberantasan dan pengendalian penyebaran penyakit	5.1.	Peningkatan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
			menular dan pencegahan penyakit tidak menular	5.2.	Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
			6. Membangun iklim kondusif bagi berkembangnya aktifitas kreatif dan olahraga yang kompetitif bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat dan prestasi	6.1.	Pengembangan event kepemudaan/kepemimpinan dan olah raga
				6.2.	Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olah raga
				6.3.	Pemeliharaan Kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial bagi Anak dengan Disabilitas (ADD)
2.	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	1. Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan kehidupan beragama	1. Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, remaja dan perempuan.	1.1.	Pengembangan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi.
			2. Meningkatkan perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang mengalami permasalahan sosial penyandang cacat.	2.1.	Pembinaan bagi anak terlantar, anak jalanan, Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) baik kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar
			3. Meningkatkan jumlah dana sosial keagamaan yang dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari aparat pemerintah daerah	3.1.	Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat
			4. Pemerataan guru dan penyuluh agama serta mengedepankan inovasi metode pembelajaran dalam rangka menjawab tantangan kehidupan beragama di	4.1.	Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah
				4.2.	Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
			tengah masyarakat	4.3.	Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar
			5. Membangun dan mengembangkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dalam keberagaman.	5.1.	Mengoptimalkan Peran lembaga politik, lembaga kemasyarakatan, organisasi pemuda dan organisasi keagamaan.
				5.2.	Pengembangan pusat-pusat kegiatan keagamaan
				5.3.	Penguatan dan Internalisasi ideologi Pancasila dan Nilai-nilai kebangsaan
				5.4.	Peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik
				5.5.	Peningkatan peran partai politik melalui pendidikan politik
				5.6.	Peningkatan peran ormas
		2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	1. Penguatan kelembagaan perangkat daerah dilakukan selain melalui pelatihan dan pembinaan terstruktur para aparat, juga dengan penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi	1.1.	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah kecamatan dan Kelurahan
				1.2.	Penguatan data basis RT dan RW
				1.3.	Penguatan kelembagaan masyarakat
			2. Penguatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	2.1.	Membangun mekanisme perencanaan partisipatif tingkat kelurahan melalui musrenbang yang direalisasikan dalam RPJM
				2.2.	Pemetaan <i>stakeholder</i> potensial di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten
			3. Mendorong penegakan hukum menjalankan perundangan daerah, Peraturan Kepala Daerah sehingga	3.1.	Penegakan peraturan perundangan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terutama untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan kenyamanan



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
			dapat memberikan kepastian realisasi program-program pembangunan	3.2.	Optimalisasi satpol PP dalam menegakkan perundangan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			4. Meningkatkan implementasi <i>e-government</i> disertai pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah	4.1.	Implementasi <i>e-Government</i>
				4.2.	Penyebarluasan Infomasi melalui media cetak dan elektronik
				4.3	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
			5. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah disertai Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	5.1.	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan
				5.2.	Peningkatan Fasilitas Pendidikan dan pelatihan bagi Apartur Pengawas
				5.3.	Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.
			6. Mengoptimalkan keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi	6.1.	Penerapan sistem Pengendalian Internal yang efektif
				6.2.	Peningkatan Kapabilitas APIP Kota Bontang

**Tabel 1.3.** Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2**Misi 2 Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
1	Membangun Kota yang Ramah Lingkungan	1. Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi	1. Pengelolaan sampah perkotaan berbasis 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>)	1.1.	Peningkatan Penanganan Sampah
				1.2.	Peningkatan Majemen Pengelolaan Sampah Daerah
				1.3.	Pemanfaatan gas methan di TPA Sampah
			2. Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah domestik dan drainase lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara 3R)	2.1.	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai kebutuhan
				2.2.	Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak
				2.3.	Pembentukan unit pengelolaan limbah perkotaan
		2. Meningkatnya Pengelolaan limbah	1. Pengawasan, penertiban dan perbaikan infrastruktur pengolahan limbah usaha dan kegiatan	1.1.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan
				1.2.	Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
		3. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Mengoptimalkan fungsi RTH eksisting dengan menata taman-taman kota yang berorientasi sosial dan lingkungan, serta memanfaatkan aset seperti kawasan-kawasan sempadan sungai	1.1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau
2.1.	Pelibatan masyarakat dalam menanam pohon dilingkungan perkotaan				
		2. Mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan hutan melalui upaya-upaya peyuluhan dan pelibatan gerakan penanaman pohon			



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
1	2	3	4	5		
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	1. Menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas	1.1.	Penyediaan hunian baru atau Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA), Rumah Susun Milik (RUSUNAMI) dan Rumah Swadaya serta peningkatan kualitas hunian sebagai upaya pengurangan kawasan kumuh	
				1.2.	Melakukan kegiatan bedah rumah dan bedah kampung khusus pada masyarakat miskin dan lingkungan kumuh	
		5. Menurunnya laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca	1. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	1.1.	Pemanfaatan teknologi penerangan hemat energi listrik dan ramah lingkungan.	
				2. Meningkatkan bangunan gedung/fasilitas umum berwawasan lingkungan	2.1.	Pelaksanaan audit energi untuk gedung-gedung pemerintahan
				3. Mengurangi polusi udara	3.1.	Pengurangan polusi udara dari emisi kendaraan bermotor
					3.2.	Peningkatan perilaku budaya bersepeda
2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Air Minum	1. Meningkatnya akses pelayanan air bersih	1. Meningkatkan kapasitas pelayanan air minum	1.1.	Pengembangan sumber air baku air minum	
		2. Terlaksananya konservasi sumber air	1. Menjaga ketersediaan air baku dan air minum	1.2.	Peningkatan cakupan pelayanan air minum	
3	Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan	1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas dokumen rencana tata ruang yang disertai pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang melibatkan peran serta masyarakat dan teknologi informasi	1.1.	Pemetaan daerah rawan bencana (banjir, longsor, angin, kebakaran, kegagalan teknologi industri, epidemi penyakit, gempa bumi, tsunami)	
				1.2.	Optimalisasi dalam penanggulangan bencana melalui simulasi dan pelatihan	
			2. Meningkatkan pelestarian kawasan pesisir	2.1.	Penghijauan di kawasan pesisir dan mangrove	



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
			melalui konservasi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat dan kerjasama berbagai pihak	2.2.	Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pelestarian ekosistem pesisir
		2. Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan penanganan bencana	1. Mitigasi dan Penanganan Bencana melalui pemetaan potensi bencana yang disertai upaya-upaya antisipasi melalui penyadaran, penyuluhan dan pelatihan	1.1.	Pemetaan daerah rawan bencana (banjir, longsor, angin, kebakaran, kegagalan teknologi industri, epidemi penyakit, gempa bumi, tsunami)
				1.2.	Optimalisasi dalam penanggulangan bencana melalui simulasi dan pelatihan
			2. Menata kawasan rawan bencana	2.1.	Penataan Kawasan Rawan Banjir

**Tabel 1.4.** Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3**Misi 3. Menjadikan Kota Bontang Sebagai *Creative City* Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim**

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	1. Menjaga Stabilitas Ekonomi Kota Bontang melalui optimalisasi penerimaan PAD dan investasi	1.1.	Peningkatan Pengelolaan Fiskal daerah yang transparan, akuntabel dan pro rakyat
				1.2.	Peningkatan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di semua sektor
				1.3.	Penyediaan regulasi untuk mendorong peningkatan investasi
		2. Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim	1. Meningkatkan produksi perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan daerah tangkapan dan peralatan yang ramah lingkungan disertai pengembangan budidaya termasuk membangun industri rumput laut	1.1.	Membangun satu perusahaan industri pengolahan rumput laut
				1.2.	Meningkatkan produksi perikanan tangkap
				1.3.	Meningkatkan produksi perikanan budidaya
			2. Mengembangkan kegiatan pariwisata pesisir dan modern disertai pembinaan dan pengembangan potensi wisata unggulan	2.1.	Peningkatan jumlah kunjungan wisata
				2.2.	Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya
				2.3.	Penetapan dan pelestarian situs cagar budaya
				2.4.	Penetapan obyek wisata laut dan pesisir unggulan yang berwawasan lingkungan.
3. Mengembangkan sarana prasarana wisata serta promosi dan penyiapan masyarakat sadar wisata	3.1.	Penciptaan produk-produk yang mempunyai kekhasan lokal sebagai daya tarik wisata			
	3.2.	Peningkatan fasilitas ekowisata, kesenian dan budaya			
	3.3.	Pengembangan Promosi dan kapasitas SDM kelompok sadar wisata di kawasan ekowisata			



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
			4. Mempermudah Proses Peizinan Usaha Perdagangan menjadi hanya 3 hari	4.1.	Peningkatan Pelayanan Perizinan satu pintu (PTSP)
				4.2.	Menciptakan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di sektor maritim, industri migas dan non migas serta perdagangan
		3. Meningkatnya perdagangan dan industri	1. Meningkatkan fungsi pasar melalui pembangunan pasar baru dan rehabilitasi pasar yang sudah ada	1.1.	Peningkatan kualitas pasar tradisional
				1.2.	Pembangunan pasar tradisional
			2. Pengembangan kualitas koperasi dan pendampingan pelaku usaha mikro dalam mendukung peningkatan perdagangan daerah	2.1.	Pengembangan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
				2.2.	Penataan data base koperasi dan UMKM yang valid
				2.3.	Pengembangan SDM gerakan koperasi
				2.4.	Pendampingan pelaku usaha mikro
				2.5.	Fasilitasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan eskpor
2	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kota Bontang	1. Tersedianya infrastruktur kota yang memadai sesuai dengan perkembangan kota	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam menjamin kelancaran aktifitas dan mobilitas masyarakat	1.1.	Peningkatan Pembangunan jaringan Gas rumah tangga di setiap kelurahan
			2. Membangun sarana dan prasarana transportasi publik yang berorientasi pada kenyamanan dan ramah lingkungan.	2.1.	Peningkatan kualitas transportasi massal.
				2.2.	Memperlancar aksesibilitas dan pergerakan aktifitas di dalam dan antar daerah.
			2. Meningkatkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat	1. Meningkatkan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro	1.1.
		1.2.			Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi usaha mikro kecil



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
				1.3.	Pengembangan iklim usaha pelaku usaha mikro
				1.4.	Mendorong iklim usaha bagi pelaku wira usaha baru kreatif
				1.5.	Terwujudnya Pengembangan wirausaha skala mikro menjadi skala kecil
			2. Meningkatkan kegiatan industri rumah tangga melalui basis produk unggulan kelurahan	2.1.	Mengembangkan keunggulan lokal pada setiap kelurahan (<i>One Village One Product</i>)
			3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas untuk mendukung ketahanan pangan daerah	3.1.	Peningkatan produksi hasil pertanian dalam arti luas
				3.2.	Pengembangan Ketahanan Pangan Masyarakat

1.4. Prioritas Daerah

Sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah maka arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2019 yakni: "Penguatan sektor-sektor pembangunan daerah menuju pengembangan sektor ekonomi maritim untuk perekonomian daerah yang berdaya saing". Berdasarkan arah kebijakan di atas maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Prioritas	Sasaran Pembangunan
Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan
	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat
	Angka putus sekolah menurun
Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat
	Angka kesakitan (Morbiditas) menurun
	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat
Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin
	Menurunkan angka pengangguran
	Mingkatnya kerukunan antar umat beragama
	Angka kriminalitas menurun
Penataan pemukiman dan infrastruktur wilayah	Berkurangnya pemukiman tidak layak huni
	Berkurangnya pemukiman dan lingkungan kumuh
	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat
Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Pengelolaan sampah	Penumpukan sampah di TPS menurun
Penghijauan	Kawasan RTH meningkat



Penataan Taman Kota	Jumlah taman kota yang dikelola dengan baik meningkat
Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan	Mengkatnya masyarakat nelayan yang ramah terhadap ekosistem laut dan pesisir
	Jumlah objek wisata laut dan pesisir bertambah
Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun
	Kualitas air sungai dan danau meningkat
Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air
Polusi dan Emisi	Meningkatnya kualitas udara
Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurnnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang
Daya saing ekonomi - Iklim Usaha dan Investasi - Infrastruktur	Meningkatnya nilai investasi Meningkatnya jumlah wirausaha produktif
Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritime
Perdagangan dan industri	Usaha niaga dan industri kecil menengah produktif meningkat.

Penetapan prioritas pembangunan tersebut menjadi rujukan dalam menentukan program-program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2019. Implementasi program-program pembangunan secara operasional dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembangunan oleh Perangkat Daerah melalui belanja langsung.

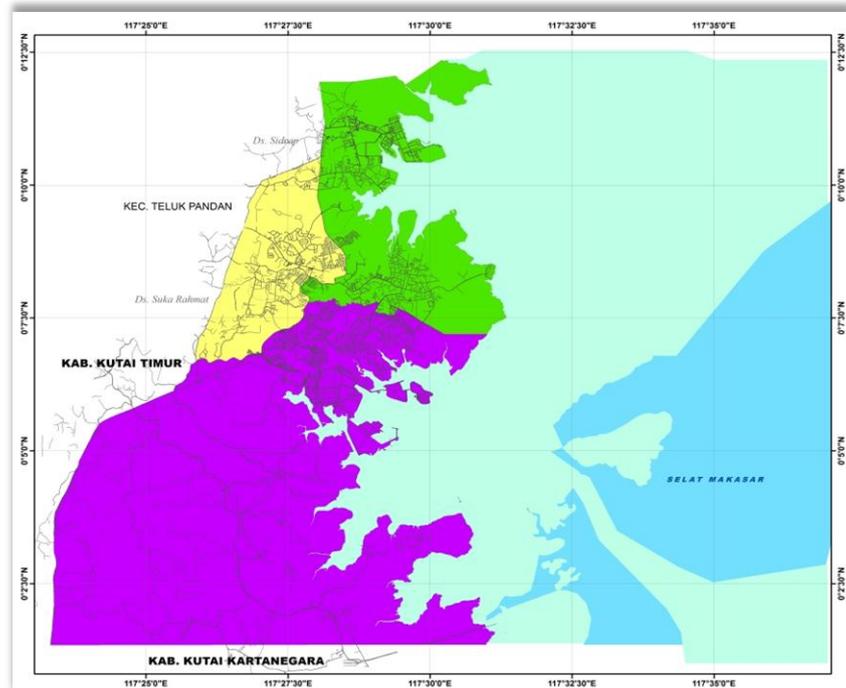
1.5. DATA UMUM DAERAH

1.5.1. Kondisi Geografis Daerah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Bontang semula merupakan bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang–Undang Nomor 47 tahun 1999, bersama–sama dengan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur. Dengan luas wilayah sekitar 497,57 km²,

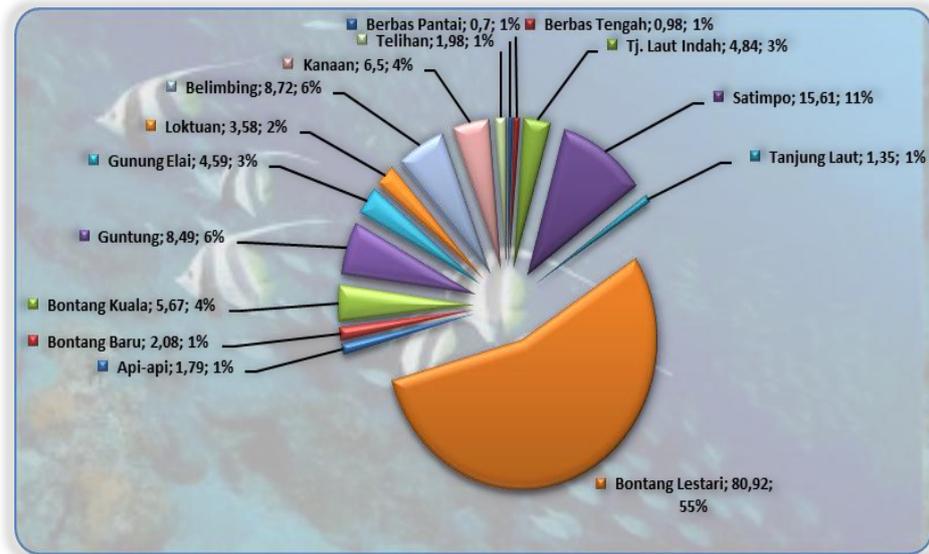
Kota Bontang merupakan daerah otonomi dengan luas wilayah terkecil di Kalimantan Timur, berbatasan dengan dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara dan barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah selatan.



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Bontang

Luas wilayah Kota Bontang adalah 497,57 km² terdiri dari wilayah laut seluas 349,77 km² (70,30%) dan wilayah darat seluas 147,80 km² (29,70%). Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17/2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 104,40 km², Kecamatan Bontang Utara seluas 26,20 km², dan Bontang Barat seluas 17,20 km². Kelurahan yang terluas yaitu Bontang Lestari dengan luas 80,92 km².

Adapun gambaran luas wilayah administrasi masing-masing kelurahan dapat disajikan pada gambar 1.2.



Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Administrasi Kelurahan di Kota Bontang

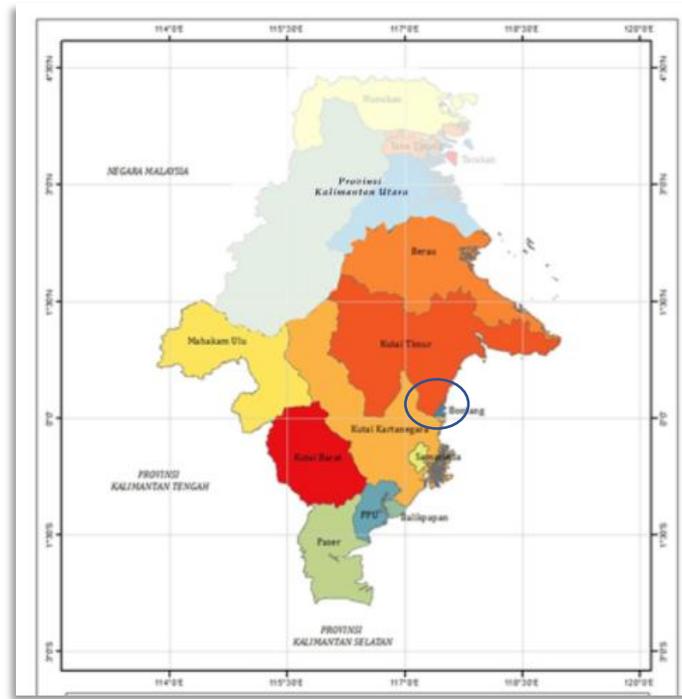
b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomi terletak di antara $117^{\circ}23'$ – $117^{\circ}38'$ Bujur Timur dan antara $0^{\circ}01'$ – $0^{\circ}12'$ Lintang Utara. Dilihat dari posisi geostrategisnya Kota Bontang terletak di pesisir tengah Kalimantan Timur menghadap langsung ke Selat Makassar yang dengan panjang pantai $\pm 24,4$ km. Wilayah tersebut merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan Internasional sehingga potensial untuk mendukung berkembangnya interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Kondisi ini menjadikan Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan diantaranya: 3 (tiga) terminal khusus, 2 (dua) pelabuhan umum dan 1 (satu) pelabuhan pendaratan ikan.

Untuk mendorong tumbuhnya sektor jasa kelautan, pemerintah berupaya membangun pelabuhan serta jaringan jalan untuk akses keluar masuk Kota Bontang. Dengan ketersediaan tersebut Kota Bontang akan menjadi jalur transportasi penumpang dan barang bagi Kaltim untuk wilayah tengah.

Berkembangnya Kota Bontang sangat erat kaitannya dengan keberadaan PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim beserta afiliasinya. Untuk menarik investor agar

berinvestasi di Kota Bontang maka pemerintah menyiapkan kawasan industri baru serta membangun bandara umum.



Gambar 1.3. Letak geografis Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur

Pesisir Kota Bontang memiliki ekosistem dasar yang lengkap karena terdiri dari hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kota Bontang juga memiliki potensi untuk wisata bahari dan wisata mangrove selain perikanan. Sebagian terumbu karangnya masih baik sehingga dapat dikembangkan untuk lokasi diving dan snorkling. Hutan mangrove memiliki jenis yang bervariasi sehingga cocok untuk ekowisata.

c. Topografi

Secara topografis, wilayah Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai, dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 106 m di atas permukaan laut. Mayoritas wilayah (48%) menempati kawasan pinggir pantai yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar di wilayah pantai, dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke barat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 1.6
Luas berdasarkan Kelas Ketinggian (Ha)

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Luas (Ha)
1.	0 – 15	5.415
2.	15 – 25	3.622
3.	25 – 100	5.723
4.	Diatas 100	20
Jumlah		14.780

Sumber: BPS Kota Bontang, 2015



Gambar 1.4. Peta Topografi Kota Bontang

d. Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah perbukitan sebelah timur Gunung Lobang Batik



dan sebelah utara Sungai Temputuk. Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari enam formasi batuan, yaitu:

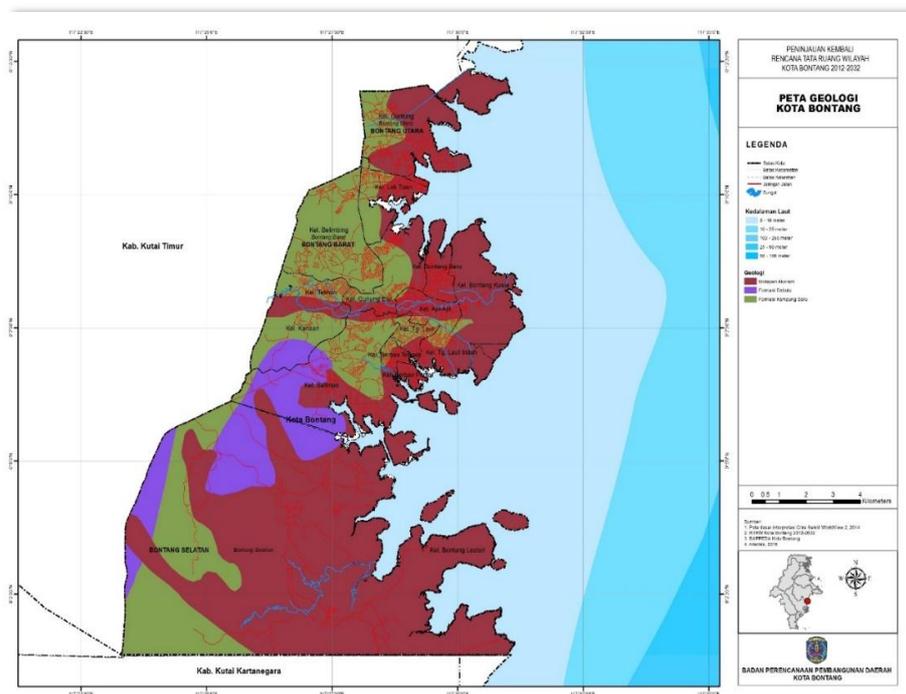
1. Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung dan lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta.
2. Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan mudah hancur. Formasi ini memiliki aquifer potensial di daerah Bontang dengan jenis batuan yang bertindak sebagai aquifer berupa kerikil, pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung.
3. Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping dan batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi terbesar di Kawasan Pesisir Bontang dengan arah utara-selatan.
4. Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir kuarsa, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara.
5. Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan lempung lanauan dan sedikit napal.
6. Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih dengan sedikit napal, batu pasir dan batu gamping.

Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan pengamanan hutan, sehingga kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga.

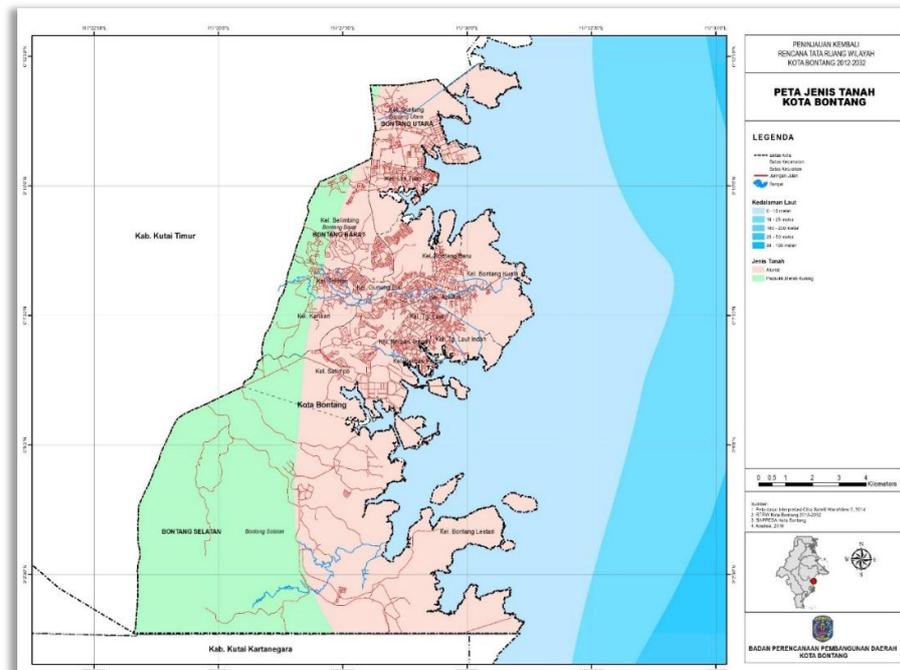
Struktur geologi daerah Bontang adalah struktur perlipatan antiklin dan sinklin serta sesar dan kekar. Struktur batuan tersebut terjadi pada umur Tersier awal sampai Tersier akhir, yang terlihat oleh bentuk bentang alamnya pada

beberapa lokasi, tapi di tempat lain hanya dapat diketahui dari pola sebaran batuan atau dari hasil penafsiran pengukuran bidang per lapisannya.

Sebagian struktur lipatan berarah baratdaya-timurlaut. Antiklin Api-api pada Formasi Pulau Balang melandai kearah barat dan timur, dengan kemiringan lapisan berkisar dari 5-200, mendekati puncak antiklin kemiringan lapisan mencapai 500. Struktur sesar berupa patahan naik dan sesar geser jurus. Sesar naik terdapat di bagian barat berarah barat daya-timur laut melewati Gunung Lobang batik. Sesar naik ini diduga merupakan kelanjutan proses dari pembentukan antiklin. Pada peta geologi (GTL Bandung, 1990), maka pelurusan sesar naik masih diduga sebagai kelurusan sumbu antiklin.



Gambar 1.5. Peta Geologi Kota Bontang



Gambar 1.6. Peta Jenis Tanah Kota Bontang

Formasi batuan bagian barat relatif naik terhadap formasi batuan bagian timur sehingga formasi batuan tua naik terhadap yang muda. Pada beberapa tempat, terdapat formasi batuan tergeserkan oleh patahan geser (sesar mendatar), patahan ini memotong antiklin, salah satu bukti dapat dilihat adanya pergeseran dari batu gamping dengan bidang geser yang nyata di dekat S. Santan (tepi Jalan Bontang-Samarinda). Zona kelurusan patahan dapat menjadi idang lemah yang mengarahkan aliran air tanah. Strike (jurus) sesar geser jurus umumnya berarah utara-selatan atau hampir berarah barat laut-tenggara, dengan posisi memotong struktur antiklin dan sinklin dengan arah barat laut-tenggara, utara-selatan dan timur laut-barat daya.

Sesar geser diduga terjadi setelah pelipatan struktur kekar terutama dijumpai pada batu gamping dari formasi bebulu dengan arah tidak beraturan. Struktur geologi ini aktif setelah semua formasi batuan diendapkan. kegiatan tektonik diperkirakan dimulai pada Umur Pleistosen, dengan Wilayah Bontang mengalami pelipatan dengan arah gaya lipatan dari barat dan timur, ditandai dengan adanya punggung antiklin Api-api yang letaknya memanjang dari



utara ke selatan. Pada puncak antiklin tersingkap formasi batuan tertua, yang berturut-turut ke arah yang lebih muda, dimulai dari Formasi pamaluan (Tomp), Formasi Bebulu (Tmb), Formasi Pulubalang (Tmpb), Formasi Balikpapan (Tmbp), dan Formasi Kampungbaru adalah formasi batuan Tersier termuda, juga mengalami pengangkatan pada saat terbentuk antiklin, lapisan relatif miring ke arah timur. Dengan adanya kemiringan yang paralel dari formasi diatas, secara hidrogeologi aliran air tanah mengikuti arah kemiringan lapisan. Setelah terjadi pengangkatan, terjadi pengendapan hasil proses geologi seperti pelapukan, erosi dan transportasi. Hal ini ditandai oleh adanya endapan kolovium disebelah barat daya Bontang dan aluvium di daerah datarannya.

e. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menempati wilayah Kota Bontang merupakan bagian dari Sub DAS Santan Ilir. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini adalah Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Busuk, Sungai Nyerakat Kanan dan Sungai Nyerakat Kiri yang semuanya bermuara di Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut berhulu di bagian barat wilayah Kota Bontang atau di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir kasar dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan.

Secara administratif DAS Bontang terletak di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur (DAS Bontang hulu), Kecamatan Bontang Barat (DAS Bontang Tengah), Kecamatan Bontang Selatan (DAS Bontang Tengah), Kecamatan Bontang Utara (DAS Bontang Tengah) dan Kecamatan Bontang Baru (DAS Bontang Hilir). DAS Bontang memiliki luas 59,710 Km² dan panjang sungai utama 41,173 Km dengan alur berkelok-kelok (meandering). DAS Bontang yang melintasi Kota Bontang memiliki luas kurang lebih 300 Km² dan panjang sungai utama 17 Km.

f. Klimatologi

Wilayah Kota Bontang memiliki iklim tropis mempunyai seperti iklim di wilayah Indonesia lainnya, yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau



biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan April. Selain itu, iklim Kota Bontang yang terletak di daerah khatulistiwa dipengaruhi oleh angin Muson Barat (November – April) dan angin Muson Timur (Mei – Oktober). Namun, beberapa tahun terakhir ini perubahan dari kemarau ke musim hujan tidak jelas sehingga curah hujan di Kota Bontang cenderung rata sepanjang tahun.

Suhu udara di Kota Bontang berkisar antara 23,00 – 34,00°C. Sedangkan kelembaban udara di Kota Bontang rata-rata 52,00 – 98,00% dengan kecepatan angin berkisar antara 10,00 – 18,30 knot. Rata-rata catatan curah hujan Kota Bontang cukup besar, yakni pada kisaran 176,00 – 225,20 mm/th. sehingga Kota Bontang perlu waspada terhadap bahaya banjir setiap saat. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya teknis pengelolaan DAS agar banjir dapat diantisipasi sejak dini.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah terbesar masih berupa semak belukar sebesar 6.870,98 ha (46,49%). Penggunaan lainnya terdiri dari hutan sejenis seluas 2.764,48 ha (18,70%), bakau seluas 1.115,51 ha (7,55%), tambak seluas 328,18 ha (2,19%), pekarangan seluas 972,87 ha (6,58%), rumah/bangunan gedung seluas 1.355,56 ha (9,170%) dan fasilitas umum seluas 562,43 ha (3,13%). Jenis penggunaan lahan secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.7
Penggunaan Tanah di Kota Bontang

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas	
		Hektar	%
1	Permukiman		
	a. Rumah/Bangunan Gedung	1.355,56	9,17
	b. Pekarangan	972,87	6,58
	c. Fasilitas Sosial	29,76	0,20
	d. Fasilitas Umum	462,43	3,13
	e. Permukiman Atas Air	53,94	0,36
	f. Jasa	69,52	0,47



No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas	
		Hektar	%
2	Tambak	323,18	2,19
3	Kawasan Industri/Pabrik		
	a. PT. Pupuk Kaltim	192,46	1,30
	b. PT. Badak NGL	278,07	1,88
	c. Industri terbatas	7,77	0,05
4	Rawa	53,54	0,36
5	Danau/Waduk/Situ	15,11	0,10
6	Hutan Kota	196,98	1,33
7	Hutan Sejenis	2.764,48	18,70
8	Bakau	1.115,51	7,55
9	Belukar	6.870,98	46,49
10	Tanah Terbuka	17,83	0,12
	Jumlah	14.780,00	100,00

Sumber: Bappeda Kota Bontang, 2010

Penggunaan wilayah laut dan pesisir Kota Bontang cukup kompleks. Pada wilayah tersebut telah terdapat banyak aktivitas masyarakat maupun swasta yang menjadikan potensi pengembangan wilayah lautnya sangat sempit. Penggunaan ruang laut yang terbesar adalah untuk alur pelayaran. Gambaran pemanfaatan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.8
Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang

No	Penggunaan	Luas (Ha)	%
A	Flat		
	- Gosong karang	940	2,69
	- Pasir	158	0,45
	- Pasir lumpur	100	0,29
B	Terumbu karang	2.799	8,00
C	Alur pelayaran		
	- PT. Badak NGL	1.311	3,75
	- PT.PKT	3.464	9,90
D	Area efektif untuk kegiatan perikanan	9.384	26,83
E	Penggunaan lain (alur rakyat, alur Tanjung	16.821,0	48,092
	Luas Total Wilayah Laut	34.977,00	100,00

Sumber: Bappeda Kota Bontang, 2010

1.5.2. Kondisi Demografis

1.5.2.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS, penduduk Kota Bontang pada tahun 2018 sebanyak 170.611 jiwa, terdiri dari 89.280 jiwa penduduk laki-laki dan 81.331 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,82% atau berkurang 3.159 jiwa jika dibandingkan penduduk tahun 2017. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu 76.358 jiwa atau sebesar 45% dari jumlah penduduk Kota Bontang, sebagaimana Tabel 1.4.

Tabel 1.9

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Rasio Jenis Kelamin
1	Bontang Utara	40.000	36.358	76.358	45	110
2	Bontang Selatan	34.430	31.333	65.763	39	110
3	Bontang Barat	14.850	13.639	28.489	17	109
	Total	89.280	81.331	170.611	100	110

Sumber: BPS Kota Bontang, 2018

1.5.2.2. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Bontang tahun 2014-2018 mengalami pertumbuhan sebagai akibat kelahiran alami dan migrasi. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2,07% dengan kepadatan penduduk tahun 2018 yaitu 1.154 jiwa/km². Adapun penyebaran penduduk secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.10

Penyebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014-2018



No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk (Jiwa)				Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Bontang Utara	26,20	71.106	73.284	77.772	76.358	2.714	2.797	2.968	2.914
2	Bontang Selatan	104,40	62.990	63.542	66.981	65.764	603	609	642	630
3	Bontang Barat	17,20	27.317	27.432	29.017	28.489	1.588	1.595	1.687	1.656
Jumlah		147,80	161.413	164.258	173.770	170.611	1.092	1.111	1.176	1.154

Sumber: BPS Kota Bontang, 2018

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2017 masih berada di Kecamatan Bontang Utara yakni sebesar 2.914 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan yaitu 630 jiwa/km².

1.5.2.3. Struktur dan Komposisi Penduduk

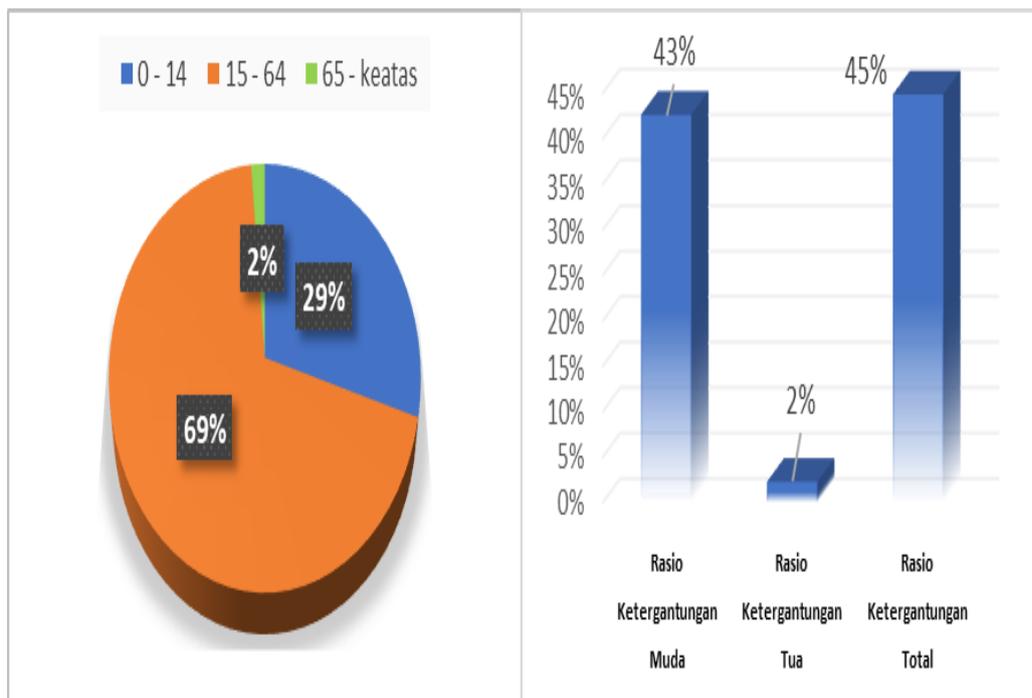
Komposisi penduduk menurut kelompok umur terbanyak pada umur 0-4 tahun sebanyak 17.537 jiwa, sedangkan komposisi penduduk terkecil pada umur 75 tahun keatas sebanyak 609 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut umur sesuai Tabel 1.6.

Tabel 1.11

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2017

Kelompok Umur	2017
0 - 4	17.537
5 - 9	16.866
10 - 14	15.770
15 - 19	14.886
20 - 24	13.782
Sumber : BPS Kota Bontang, 2018	
25 - 29	15.022
30 - 34	15.002
35 - 39	14.650
40 - 44	14.770
45 - 49	13.167
50 - 54	8.922
55 - 59	5.014
60 - 64	2.576
65 - 69	1.346
70 - 74	692
75+	609
Jumlah	170.611

Dari tabel 1.6 terlihat bahwa kondisi struktur umur penduduk Kota Bontang pada tahun 2018 yang telah dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan, penduduk Kota Bontang tergolong penduduk transisi, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69% (Gambar 1.7). Besarnya penduduk usia produktif ini perlu diantisipasi dengan kebijakan dan program pemerintah pro-job. Sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.



Gambar 1.7

Persentase Penduduk Kota Bontang menurut Kelompok Umur Tahun 2018

Gambar 1.8

Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bontang Tahun 2018

Besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia kerja di Kota Bontang dapat diukur dengan rasio ketergantungan, yakni membandingkan penduduk yang dianggap belum produktif (0-14 tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) (Gambar 1.8). Rasio ketergantungan penduduk tahun 2018 sebesar 45%, artinya setiap 100 orang penduduk Kota Bontang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar 45 orang yang belum produktif dan tidak



produktif lagi, terdiri dari rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 43% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 2%. Dari gambaran tersebut juga terlihat bahwa pada tahun 2018 penduduk usia kerja di Kota Bontang masih dibebani tanggung jawab akan penduduk usia muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk usia tua. Sehingga kebijakan dan program perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar maupun pendidikan.

1.5.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan dimana penduduk merupakan sasaran utama untuk dikembangkan dan ditingkatkan kualitas hidupnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia dan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, yang diukur dengan menggunakan indeks komposit berdasarkan 3 (tiga) dimensi parameter, yaitu:

- 1) Derajat kesehatan dan usia hidup yang diukur dengan Angka Harapan Hidup.
- 2) Pengetahuan yang diukur dengan kombinasi antara Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.
- 3) Standar hidup layak penduduk yang dilihat dari paritas daya beli masyarakat.

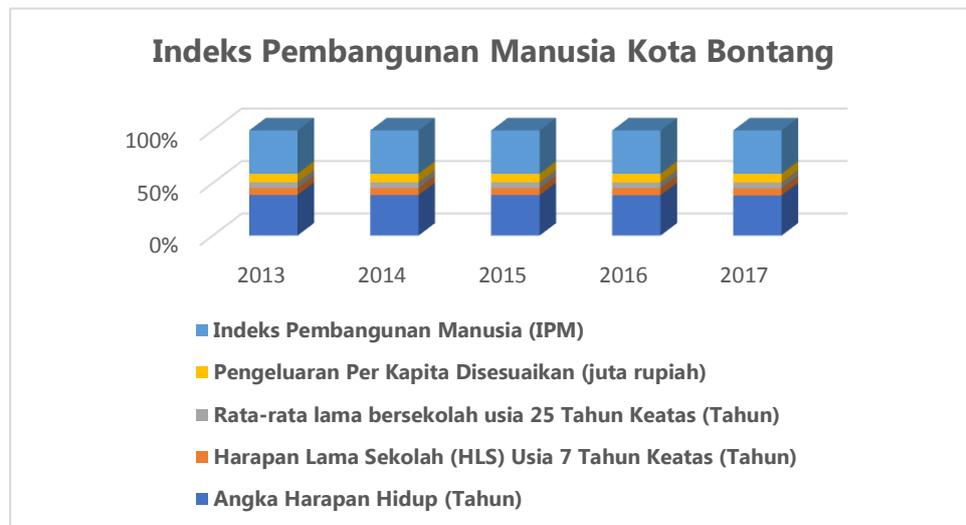
Tabel 1.12

Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2013 – 2018

Komponen IPM	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,67	73,68	73,69	73,71	73,72
Harapan Lama Sekolah (HLS) Usia 7 Tahun Keatas (Tahun)	12,50	12,68	12,77	12,79	12,88
Rata-rata lama bersekolah usia 25 Tahun Keatas (Tahun)	10,34	10,35	10,38	10,39	10,70
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (juta rupiah)	15,82	15,88	15,98	16,16	16,27
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,34	78,58	78,78	78,92	79,47

Sumber: BPS Kota Bontang, 2019

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang selama periode 2013-2018 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2017, pencapaian IPM Kota Bontang sebesar 79,47 atau mengalami peningkatan sebesar 0,55 poin dari tahun 2016.



Gambar 1.9. Perkembangan IPM Kota Bontang

1.5.3. Kondisi Ekonomi

1.5.3.1. Potensi Unggulan Daerah

Kehadiran PT. Badak NGL sebagai industri pengilangan gas alam cair dan PT. Pupuk Kalimantan Timur, Tbk. sebagai industri pupuk menjadikan Bontang cukup dikenal baik di dalam maupun di luar negeri. Begitu juga dengan kehadiran perusahaan PT. Black Bear dan PT. Kaltim Nitrat Indonesia yang merupakan industri pembuat bahan amonium nitrat yang bertaraf internasional, akan menjadi potensi unggulan daerah karena mampu memberikan income



besar serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik di Bontang, Kalimantan Timur dan Nasional. Potensi lainnya yang dapat diproyeksikan menjadi potensi unggulan serta dapat dikembangkan menjadi penggerak ekonomi Kota Bontang diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jasa Kelautan

Sebagai daerah pesisir, Kota Bontang memiliki potensi jasa kelautan yang dapat dikembangkan berupa jasa transportasi laut. Tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan perdagangan lokal, regional dan internasional. Dengan kedalaman alur yang berkisar antara 17 – 20 m, perairan Kota Bontang dapat dilayari kapal-kapal besar dengan kapasitas 20.000-40.000DWT serta dapat melakukan bongkar muat. Saat ini Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan untuk mendukung aktivitas industri dan masyarakat umum, antara lain pelabuhan khusus yang berjumlah 3 buah (PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak NGL, dan PT. Indominco Mandiri), pelabuhan Umum di Loktuan, Pelabuhan Rakyat di Tanjung Laut Indah dan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Tanjung Limau.

2. Perikanan

Dengan dukungan perairan yang luasnya mencapai 49,757 ha atau 70,30% dari luas Kota Bontang maka perikanan dan kelautan sangat potensial dikembangkan. Pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Potensi perikanan yang menjadi unggulan saat ini adalah kepiting, ikan kerapu, kakap, lobster, teripang dan rumput laut. Jenis-jenis ikan tersebut bernilai ekonomi tinggi di pasar domestik dan pasar internasional. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan hanya memenuhi kebutuhan lokal sedangkan kebutuhan pasar regional dan internasional hanya dapat dipenuhi dalam jumlah kecil. Dengan demikian pengembangan kegiatan perikanan mempunyai peluang yang sangat besar mengingat kebutuhan konsumsi ikan baik dalam negeri maupun luar negeri terus mengalami peningkatan. Begitupun dengan rumput laut yang sangat menjanjikan karena mempunyai kualitas terbaik ditingkat nasional.



3. Pariwisata

Sebagai kawasan pesisir, Kota Bontang mempunyai potensi wisata yang layak untuk dikembangkan seperti: pemukiman di atas air, wisata kuliner, hutan mangrove dan terumbu karang. Objek wisata pemukiman di atas air dapat dipadukan dengan hiburan, tempat bersantai dan industri pengolahan perikanan skala rumah tangga. Terdapat pula pesta laut sebagai acara tahunan untuk masyarakat pesisir seperti di Bontang Kuala yang diisi dengan acara adat disertai hiburan rakyat. Selain itu, Kota Bontang juga mengadakan acara pesta adat Erau Pelas Benua yang dilaksanakan di Kelurahan Guntung. Berdasarkan kepercayaan warga setempat, bahwa acara pesta adat Erau Pelas Benua dilaksanakan sebagai ritual tolak bala. Acara ini dirangkai dengan olah raga tradisional antara lain berupa permainan sumpit dan gassing. Wisata kuliner yang sudah eksis terdapat di Bontang Kuala serta di Selangan. Komoditas yang ditawarkan berupa masakan khas Bontang dan ikan bakar segar dengan suasana pemandangan laut. Luas hutan mangrove Kota Bontang adalah 2.105 ha. Kawasan tersebut potensial untuk dikembangkan menjadi ekowisata karena beberapa faktor pendukung antara lain: mudah dijangkau, memiliki struktur tegakan yang sempurna, serta spesies penyusun tegakannya beraneka ragam. Hutan mangrove Kota Bontang tersebar di sepanjang pesisir pantai yang membentang mulai dari Guntung, Gunung Elai, Bontang Kuala, Rawa Indah, Teluk Kadere dan Manuk-manukan. Ketebalannya dari garis pantai ke arah darat bervariasi antara 50 – 710 M. Terumbu karang potensial untuk wisata snorkeling dan diving. Lokasinya berada di Karang Kiampau, Karang Segajah, Agar-agar, Melahing, Kedindingan, Beras Basah dan Tihik-tihik. Terumbu karang dapat dijumpai sampai kedalaman 15 m dan dihuni oleh ikan-ikan hias maupun komersil.

1.5.3.2. Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di Kota Bontang dalam periode satu tahun. Nilai PDRB tersebut sekaligus menggambarkan pula kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kota Bontang yang dicerminkan dengan PDRB yang dinilai harga berlaku mengalami kenaikan, namun yang dihitung dalam harga konstan mengalami penurunan. PDRB Kota Bontang dengan harga konstan tahun 2010, pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.41,54 trilyun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -3,41%. Dengan demikian nilai PDRB tahun 2014 lebih kecil dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi negatif ini utamanya disebabkan oleh penurunan nilai yang dihasilkan sektor industri pengolahan yang selama ini mendominasi PDRB Kota Bontang dengan migas, dimana pada tahun 2014 kontribusinya mencapai 83,93%.

Nilai PDRB Kota Bontang dengan harga konstan tahun 2010 masih mengalami penurunan hingga tahun 2018 dengan kisaran tahun 2017 adalah Rp.38,54 triliun dan tahun 2018 Rp.37,19 triliun.

Namun demikian jika nilai PDRB dihitung dengan mengeluarkan unsur dari hasil pengolahan minyak dan gas, maka nilai PDRB mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp.19,59 triliun dan mencapai Rp.20,95 triliun pada tahun 2018.

Tabel 1.13

PDRB Kota Bontang Berdasarkan Lapangan Usaha
(ADHK 2010) (Rp. Juta) Tahun 2014-2017

No	Lapangan Usaha/Industri	2014*	2015**	2016***	2017****
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	353.995,35	399.921,72	451.747,08	510.400,67
2	Pertambangan dan Pengalihan	587.774,81	512.691,69	254.329,74	234.736,30



3	Industri Pengolahan	4.869.242,97	33.470.041,62	31.641.500,45	29.942.468,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.432,90	9.404,20	10.113,03	11.285,62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.480,24	7.758,20	8.113,03	8.410,41
6	Konstruksi	1.991.244,34	2.025.801,35	2.075.265,50	2.145.791,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.039.278,32	1.075.545,56	1.112.719,68	1.163.515,04
8	Transportasi dan Pergudangan	516.466,81	532.218,65	554.642,41	578.210,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	155.377,73	159.524,27	164.773,58	174.367,46
10	Informasi dan Komunikasi	339.822,49	342.409,75	385.599,28	418.306,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	305.999,72	317.187,77	308.034,14	312.782,87
12	Real Estat	175.203,28	179.439,64	180.312,67	183.355,47
13	Jasa Perusahaan	192.842,58	210.432,72	223.877,81	245.497,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	428.262,12	434.737,91	469.981,58	492.776,70
15	Jasa Pendidikan	277.125,45	270.789,97	354.225,52	398.628,42

No	Lapangan Usaha/Industri	2014*	2015**	2016***	2017****
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.058,97	188.877,63	231.582,21	252.141,09
17	Jasa lainnya	100.834,28	106.379,52	115.182,39	121.856,16
Produk Domestik Regional Bruto		41.544.442,36	40.246.162,17	38.542.000,09	37.194.530,66
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product @		17.190.924,14	18.521.965,50	19.587.169,90	20.956.326,00

* : angka sangat sementara ** : angka sangat sementara

*** : angka proyeksi

Sumber: SIPD Tahun 2015 dan analisis Rancangan Teknokratis RPJMD 2016-2021

Proyeksi PDRB pada tabel 1.9 dilakukan dengan mengacu pada tren pertumbuhan ekonomi Kota Bontang hingga tahun 2017, dimana berdasarkan perhitungan angka sangat sementara BPS, pertumbuhan ekonomi dengan migas masih mengalami pertumbuhan negatif mencapai -3,13%, meskipun jika dibanding tahun 2014 dimana pertumbuhan ekonomi tercatat -3,41%, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis, perekonomian Kota Bontang tahun 2016 dan tahun 2017 diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran -3 s.d -4%. Situasi ekonomi nasional dan masih belum pulihnya harga komoditas utamanya minyak dunia diperkirakan akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan PDRB Kota Bontang yang

masih sangat didominasi sektor migas. Disamping itu tren penurunan produksi migas diperkirakan masih akan berlanjut.

Dengan perhitungan PDRB tanpa unsur Migas, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2015 mencapai 7,74% meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum pola pertumbuhan ekonomi tanpa migas menunjukkan bahwa pertumbuhannya akan mengalami kenaikan pada saat pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami tekanan dan sebaliknya. Meskipun secara keseluruhan perekonomian Kota Bontang tanpa migas terus mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya sangat fluktuatif dan terlihat sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dengan migas. Peran sektor-sektor ekonomi tanpa migas meningkat jika sektor ekonomi dengan migas mengalami penurunan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.10.

Gambar 1.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Bontang 2011-2018



Sumber: SIPD Tahun 2015 dan analisis Rancangan Teknokratis RPJMD 2016-2021

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2019 disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PENJABARAN APBD

BAB III : PENEYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BAB IV : PENEYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

BAB V : PENUTUP



BAB II PENJABARAN APBD

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan daerah telah membawa kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemajuan daerah juga menjadi kunci kemajuan bangsa termasuk didalamnya daya saing daerah yang pada akhirnya akan menjadi sumber peningkatan daya saing bangsa pada lingkup regional Asia maupun internasional.

Kota Bontang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan peningkatan kemajuan kesejahteraan rakyat dengan upaya pelaksanaan sistem pelayanan pemerintah daerah yang responsif, efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung percepatan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah dan salah satu mesin pendorong yang digunakan Pemerintah Kota Bontang dalam menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah mempunyai posisi sentral dalam upaya mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Anggaran daerah berusaha difungsikan secara optimal sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, alat untuk memotivasi aparatur dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Secara umum struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah Kota Bontang terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi besarnya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang disebabkan tingginya kebutuhan fiskal daerah (*fiscal needs*) sedangkan kemampuan



daerah atau kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan satu kebijakan dari sisi pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2019 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah yaitu sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan Daerah

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kota Bontang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- 2) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan



penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.

- 3) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada PD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan, Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 4) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 5) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- 6) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.



- 7) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

2.1.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Penganggaran pendapatan Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 dan perubahannya serta memperhatikan realisasi pendapatan DBH-Pajak 4 (empat) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019 serta memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-SDA 4 (empat) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2019.
- 3) Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi,



kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2019 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

- 4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan;
- c. Penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK.

2.1.1.3. **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dan bantuan keuangan. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019.
- 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2019.



- 3) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 4) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2019.
- 5) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019.
- 6) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- 7) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- 8) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan-penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.



Secara umum **arah kebijakan pendapatan daerah**, adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Upaya peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
3. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah.

2.1.1.4. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Bentuk kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam upaya peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah melakukan upaya antara lain:

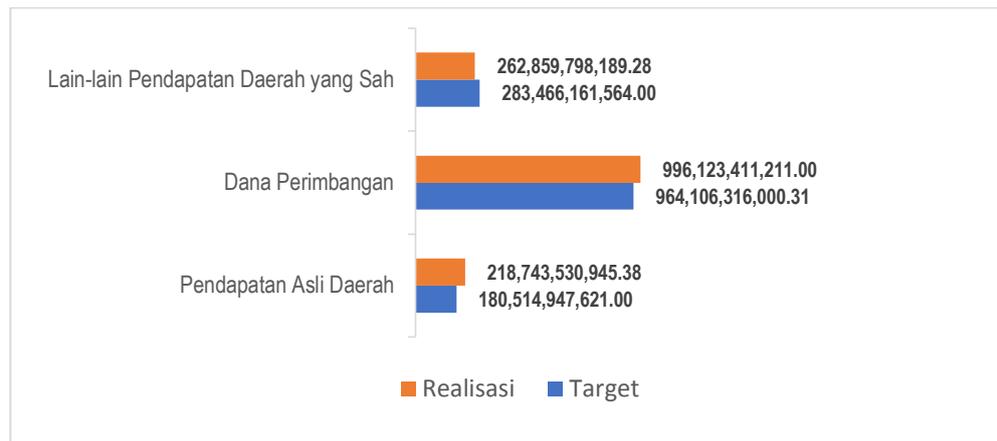
1. Melakukan intensifikasi dalam proses pemungutan potensi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan cara penyederhanaan administrasi dan restrukturisasi kelembagaan pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan meningkatkan kualitas aparatur untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya pendapatan daerah;
 - c. Manajemen data base wajib pajak dan wajib retribusi sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan;



- d. Pemanfaatan teknologi informasi dan sarana prasarana pelayanan agar proses pemungutan pajak akan lebih efektif dan efisien, validasi dan updating data, serta melakukan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik;
 - e. Pemberian reward dan punishment dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - f. Pelaksanaan uji petik untuk memprediksi potensi dan menentukan target pajak dan retribusi;
 - g. Pengawasan penyeteroran untuk menghindari adanya kebocoran dan keterlambatan penyeteroran ke kas daerah melalui pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses penyeteroran PAD, dan melakukan evaluasi.
2. Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah dengan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah melalui pendataan penerimaan.

2.1.1.5. **Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**

Target pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 1.428.087.425.185,31 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 180.514.947.621,00, Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 964.106.316.000,31 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 283.466.161.564,00. Jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.477.726.740.345,66 atau 103,48% dari target yang ditetapkan, terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 218.743.530.945,38 atau 121,18 persen dari target. Realisasi pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 996.123.411.211,00 atau 103,32 persen dari target, dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 262.859.798.189,28 atau 92,73% dari target.

**Gambar 2.1**

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

la dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya, terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018, sedangkan untuk penerimaan Dana Perimbangan mengalami penurunan cukup signifikan. Perkembangan realisasi pendapatan Kota Bontang Tahun dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



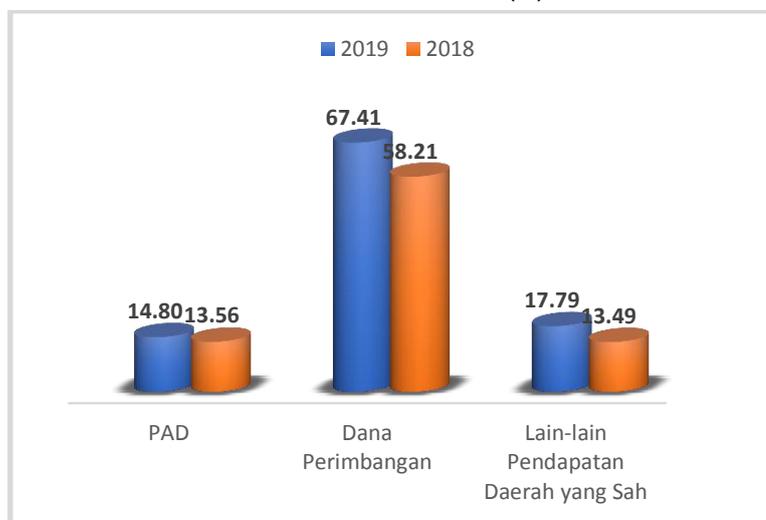
Tabel 2.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2018 dan 2019

URAIAN		2018	2019	PERTUMBUHAN (%)
PENDAPATAN DAERAH		1.471.367.260.345,66	1.477.726.740.345,66	0,43
1.	Pendapatan Asli Daerah	199.483.395.952,57	218.743.530.945,38	8,80
	- Hasil Pajak Daerah	119.410.487.414,00	116.864.297.801,00	-2,18
	- Hasil Retribusi Daerah	3.980.779.127,75	6.331.946.328,25	37,13
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	4.779.545.627,92	4.504.282.490,23	-6,11
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	71.312.583.782,90	91.043.004.325,90	21,67
2.	Dana Perimbangan	856.430.574.154,00	996.123.411.211,00	14,02
	- Dana Bagi Hasil Pajak	88.073.151.363,00	122.313.478.064,00	27,99
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	476.458.032.797,00	575.889.245.287,00	17,27
	- Dana Alokasi Umum	215.830.009.000,00	233.360.408.000,00	7,51
	- Dana Alokasi Khusus	76.069.380.994,00	64.560.279.860,00	-17,83
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	198.512.687.779,18	262.859.798.189,28	24,48
	- Pendapatan Hibah	19.623.459.394,18	41.523.080.000,00	52,74
	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	153.340.115.000,00	186.353.421.578,00	17,72
	- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	24.750.000.000,00	31.973.282.000,00	22,59
	- Penerimaan Lain-Lain	799.113.385,00	3.010.014.611,28	73,45

Sumber: BPKD Kota Bontang

Dari Tabel di atas terlihat bahwa secara umum realisasi pendapatan Kota Bontang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dari Rp. 856.430.574.154,00 pada tahun 2018 menjadi Rp. 996.123.411.211,00 pada tahun 2019. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan pada komponen Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lan Pendapatan Daerah Yang Sah, namun karena masih besarnya proporsi komponen Dana Perimbangan terhadap pendapatan Kota Bontang, mengakibatkan perkembangan pendapatan daerah mengalami tren penurunan. Proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah menunjukkan kontribusi komponen pendapatan pada pendapatan agregat Kota Bontang. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan Kota Bontang tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Komposisi Pendapatan Kota Bontang
Tahun 2018 dan 2019 (%)



Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 mengalami peningkatan 1,25% dari 14,80% sebelumnya tahun 2018 sebesar 13,56%. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah meningkat dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang.

2.1.1.6. **Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2019**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp. 180.514.947.621,00 , dengan realisasi mencapai Rp. 218.743.530.945,38 atau 121,18 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 100.047.500.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 116.864.297.801,00 atau 116,81 persen dari target yang ditetapkan.



b. Pendapatan Retribusi Daerah

Obyek retribusi terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 3.245.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.331.946.328,25 atau 195,08 persen dari target yang direncanakan.

c. Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2019 secara keseluruhan PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp. 4.504.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 4.504.282.490,23 atau 100,01 persen dari target yang direncanakan. PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada BPD KALTIM, Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. BME dan PT. Bontang Transport.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya, Pendapatan dari BLUD, Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Pendapatan Dana BOS.

Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 72.717.697.621,00 dengan realisasi mencapai Rp. 91.043.004.325,9 atau 125,2 persen dari target yang direncanakan. Dari realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut terdapat pendapatan dari RSUD Kota Bontang selaku BLUD sebesar Rp. 57.674.496.414,00 yang dikelola/digunakan secara langsung dengan mekanisme BLUD oleh RSUD Kota Bontang.



2.1.1.7. **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 964.106.316.000,31, dengan realisasi mencapai Rp. 996.123.411.211,00 atau 103,32 persen dari target yang direncanakan, terdiri dari:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp. 660.141.500.000,31 dengan realisasi sebesar Rp. 122.313.478.064,00 atau 112,35% dari target yang direncanakan.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp. 233.360.408.000,00 dengan realisasi mencapai 100% dari target yang direncanakan.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp. 70.604.408.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 64.560.279.860,00 atau 91,44 persen dari target yang direncanakan.

2.1.1.8. **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah Yang Sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Provinsi serta Penerimaan Lain-Lain Yang Sah. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 262.859.798.189,28 atau 92,73% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 283.466.161.564,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp. 14.608.200.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 41.523.080.000,00 atau 91,54% dari target yang dianggarkan.

b. Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 204.634.679.564,00 dengan realisasi mencapai Rp. 186.353.421.578,00 atau 91,07 persen dari target yang direncanakan. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama



Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

c. Dana Penyesuaian

Realisasi Pendapatan dari Dana Penyesuaian pada tahun 2019 merupakan pendapatan dana insentif daerah sebesar Rp. 31.973.282.000,00 atau 100 persen dari yang dianggarkan.

d. Penerimaan Lain-Lain

Penerimaan Lain-Lain Yang Sah dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.010.014.611,28 atau 200,67 persen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00.

Pada tabel dibawah ini diuraikan besaran target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2019.

Tabel 2.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun Anggaran 2019

Uraian Pendapatan	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN DAERAH	1.428.087.425.185,31	1.471.433.660.345,66	103,04
1. Pendapatan Asli Daerah	180.514.947.621,00	218.743.530.945,38	121,18
1.1 Hasil Pajak Daerah	100.047.500.000,00	116.864.297.801,00	116,81
Pajak Hotel	925.000.000,00	1.439.401.041,00	155,61
Pajak Restoran	9.500.000.000,00	10.995.135.011,00	115,74
Pajak Hiburan	542.500.000,00	764.640.618,00	140,95
Pajak Reklame	500.000.000,00	656.865.862,00	131,37
Pajak Penerangan Jalan	40.500.000.000,00	43.992.753.124,00	108,62
Pajak Parkir	80.000.000,00	112.077.800,00	140,10
Pajak Air Tanah	7.000.000.000,00	8.388.104.679,00	119,83
Pajak Sarang Burung Walet	0	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	77862750	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	35.500.000.000,00	37.983.730.201,00	107,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.500.000.000,00	12.453.726.715,00	226,43
1.2 Hasil Retribusi Daerah	3.245.750.000,00	6.331.946.328,25	195,08
Retribusi Jasa Umum	1.421.250.000,00	1.551.630.940,00	109,17
Retribusi Jasa Usaha	817.800.000,00	846.301.857,00	103,49
Retribusi Perijinan Tertentu	1.006.700.000,00	3.934.013.531,25	390,78



1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.504.000.000,00	4.504.282.490,23	100,01
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.504.000.000,00	4.504.282.490,23	100,01
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	72.717.697.621,00	91.043.004.325,90	125,20
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	176.605.300,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	2.880.000.000,00	5.811.557.540,72	201,79
Pendapatan Bunga Deposito	0	0	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.127.697.621,00	1.325.788.792,22	117,57
Pendapatan Denda Pajak	209.000.000,00	327.719.160,88	156,80
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	45000000	43632325	96,96
Pendapatan dari Pengembalian	350.000.000,00	417.591.038,07	119,31
Pendapatan dari BLUD	58.000.000.000,00	72.090.389.654,01	124,29
Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.656.000.000,00	7.719.947.985,00	100,84
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.450.000.000,00	3.129.772.530,00	127,75
Pendapatan Dana BOS			
2. Dana Perimbangan	964.106.316.000,31	996.123.411.211,00	103,32
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	660.141.500.000,31	698.202.723.351,00	105,77
Bagi Hasil Pajak	108.866.500.000,31	122.313.478.064,00	112,35
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	551.275.000.000,00	575.889.245.287,00	104,46
2.2 Dana Alokasi Umum	233.360.408.000,00	233.360.408.000,00	100,00
Dana Alokasi Umum	233.360.408.000,00	233.360.408.000,00	100,00
2.3 Dana Alokasi Khusus	70.604.408.000,00	64.560.279.860,00	91,44
Dana Alokasi Khusus Fisik	31.193.909.000,00	29.423.097.395,00	94,32
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	39.410.499.000,00	35.137.182.465,00	89,16
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	283.466.161.564,00	256.566.718.189,28	90,51
3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	204.634.679.564,00	186.353.421.578,00	91,07
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	204.634.679.564,00	186.353.421.578,00	91,07



3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	31.973.282.000,00	31.973.282.000,00	100,00
Dana Penyesuaian	31.973.282.000,00	31.973.282.000,00	100,00
3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.750.000.000,00	30.750.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi	30.750.000.000,00	30.750.000.000,00	100,00
3.4 Penerimaan Lain-Lain	1.500.000.000,00	3.010.014.611,28	200,67
Penerimaan Lain-Lain	1.500.000.000,00	3.010.014.611,28	200,67

Sumber: BPKD Kota Bontang, 2019

2.1.1.9. Permasalahan dan Solusi

Tantangan Pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan otonomi daerah dan implementasi Desentralisasi fiskal tentu tidak sedikit terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan fiskal khususnya terkait dengan masih tingginya tergantung penerimaan pendapatan daerah dari dana transfer (pendapatan dana perimbangan). Pada tahun 2019 pendapatan dana transfer sebesar 67,70% dari total pendapatan daerah. Hal ini menjadi tantangan prioritas pemerintah kota Bontang dalam upaya pengelolaan pendapatan daerah, khususnya mendorong peningkatan pendapatan dari sektor-sektor ekonomi daerah.

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan dan aset daerah antara lain :

- 1) Realisasi PAD terhadap target 2019 mencapai sampai dengan 121,18%. Hal tersebut disebabkan oleh realisasi yang cukup tinggi atau target yang ditetapkan terlalu rendah;
- 2) Kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil hanya 12,6%, dengan yang relatif kecil akan sulit bagi daerah untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh sumber pembiayaan lain, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah;
- 4) Upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Propinsi belum dapat diproyeksikan secara tepat, karena alokasi dari



- Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi disesuaikan dengan kebijakan penganggaran yang ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- 5) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak, baik wajib pajak hotel maupun restoran, untuk menerapkan system billing dikarenakan tidak tegasnya sanksi yang ada.

b) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, hal yang perlu dilakukan, diantaranya:

- 1) Pemantauan secara berkala serta penyusunan data potensi pajak dan retribusi yang baru, sebagai dasar penentuan target pendapatan asli daerah, untuk mengatasi penentuan target pendapatan asli daerah yang cenderung ditetapkan rendah;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- 3) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan PAD dengan melakukan inventarisasi aset daerah;
- 4) Menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak serta penegakan peraturan perundang-undangan pajak melalui kegiatan sosialisasi dan pemberian kemudahan bagi wajib pajak;
- 5) Merumuskan sanksi yang tepat dan efektif untuk wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak kooperatif dengan tidak mengganggu iklim usaha;

2.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

2.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Penyerahan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi pada perlu dilakukannya penyesuaian yang sangat signifikan khususnya menyangkut manajemen keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan merumuskan arah kebijakan mencakup pengelolaan



pendapatan dan belanja daerah dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada tahun 2019 secara umum diarahkan:

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2019 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (sustained), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
2. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2019.
3. Kebijakan pembiayaan tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2019 dilaksanakan melalui mekanisme belanja langsung dan belanja tidak langsung, dengan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu: belanja pegawai, belanja bunga, dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan yang harus dialokasikan pada tahun 2019.

Untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, proporsi belanja langsung diupayakan mendapatkan alokasi lebih besar daripada belanja tidak langsung dan proporsi belanja modal yang lebih besar daripada belanja pegawai. Hal ini merupakan salah satu kebijakan anggaran belanja yang terus diupayakan sebagai cerminan keberpihakan pengalokasian anggaran untuk sebesar-besarnya kesejahteraan



masyarakat. Melalui kebijakan seperti ini diharapkan alokasi anggaran pembangunan dapat secara langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat akan berbagai pelayanan pembangunan.

Pada dasarnya belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Penyusunan belanja daerah mempertimbangkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan belanja/pengeluaran diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi lokal sehingga diharapkan berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan daerah.
2. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan penyempurnaan struktur organisasi perangkat pengelola keuangan daerah, serta penerapan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian pembangunan daerah.
3. Kebijakan untuk mendorong peran dan partisipasi swasta dalam pembangunan daerah melalui penanaman modal maupun pelayanan publik.

Belanja daerah tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 1.685.828.021.759,00 yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 487.200.024.317,00 atau sebesar 28,89% dan belanja langsung sebesar Rp. 1.198.627.997.442,00 atau sebesar 71,1%. Hal ini memperlihatkan keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan.

2.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terkait dengan strategi penganggaran belanja tidak langsung pada APBD Kota Bontang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta



- memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
 - c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
 - e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
 - f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.



- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- c) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.



- f) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- g) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- h) Dalam rangka mendukung efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.
- i) Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2014 serta Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2014 tentang Perubahan kedua dan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik



dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2.3. Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang



telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), standar satuan harga, RKBU serta RKPBU.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Penganggaran Honorarium PNSD pada prinsipnya tidak dianggarkan dalam RKA SKPD, kecuali untuk yang diperbolehkan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang mengenai tambahan penghasilan pegawai berdasarkan performance kinerja.

Penganggaran honorarium Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa.
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut



- dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c) Penganggaran belanja barang memperhatikan:
 - 1. Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
 - 2. Untuk belanja hadiah/souvenir/piala dalam bentuk barang menggunakan rekening belanja hadiah/souvenir/piala.
 - d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat.
 - e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
 - f) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014



tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

- g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing perangkat daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah.
- h) Penganggaran belanja bahan bakar kendaraan bermotor hanya dianggarkan untuk kendaraan operasional sebanyak unit kendaraan operasional yang ada dan rencana pengadaan kendaraan yang baru.
- i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- j) Penganggaran belanja hibah dalam bentuk barang dianggarkan pada rekening Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- k) Penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan pada rekening Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.



- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Penganggaran belanja ini hanya dialokasikan pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Rekening transport akomodasi untuk narasumber/tenaga ahli menggunakan rekening perjalanan dinas untuk non PNSD.
- m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan daerah, mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi perangkat daerah dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah



daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Untuk Pengadaan belanja modal yang berbeda rekening rincian objeknya dan tidak dapat disatukan paket pengadaannya maka belanja terkait pengadaan dianggarkan dalam masing-masing rekening rincian objek.

2.2.4. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Bontang untuk tahun 2019 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3.**

Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

No.	URAIAN BELANJA	TARGET	REALISASI	%
	BELANJA DAERAH	1.685.828.021.759,00	1.553.770.272.149,61	92,17
1.	Belanja Tidak Langsung	487.200.024.317,00	471.131.196.673	96,70
-	Belanja Pegawai	458.369.062.817,00	446.614.560.880	97,44
-	Belanja Hibah	19.549.836.500,00	17.999.916.155	92,07
-	Belanja Bantuan Sosial	1.315.000.000,00	619.935.699	47,14
-	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	6.016.100.000,00	5.726.793.289	95,19
-	Belanja Tidak Terduga	1.950.025.000,00	169.990.650,00	8,72
2	Belanja Langsung	1.198.627.997.442,00	1.082.639.075.477	90,32
-	Belanja Pegawai	53.855.581.541,00	43.665.807.915	81,08
-	Belanja Barang dan Jasa	598.196.815.143,00	555.764.359.145	92,91
-	Belanja Modal	546.575.600.758,00	483.208.908.417	88,41

Sumber: BPKD Kota Bontang, 2019

Dari tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat serapan belanja APBD Tahun 2019 sebesar 92,17% dari total anggaran, mengalami kenaikan sebesar 6,64% dibandingkan dengan tingkat serapan belanja pada tahun 2018 sebesar 85,53%. Realisasi belanja daerah pada tahun 2019 terdiri dari realisasi pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 471.131.196.672,95 atau 96,70% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.082.639.075.477,00 atau 90,32%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, secara umum realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4.**

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No.	URAIAN BELANJA	REALISASI		Perubahan (%)
		2018	2019	
	BELANJA DAERAH	1.186.216.563.514,00	1.553.770.272.149,61	23,66
1.	Belanja Tidak Langsung	403.557.528.203,00	471.131.196.673	14,34
	- Belanja Pegawai	380.902.959.074,00	446.614.560.880	14,71
	- Belanja Hibah	13.872.808.640,00	17.999.916.155	22,93
	- Belanja Bantuan Sosial	901.717.379,00	619.935.699	-45,45
	- Belanja Bantuan Keuangan	6.388.299.110,00	5.726.793.289	-11,55
	- Belanja Tidak Terduga	1.491.744.000,00	169.990.650,00	-777,54
2	Belanja Langsung	782.659.035.311,00	1.082.639.075.477	27,71
	- Belanja Pegawai	44.356.716.825,00	43.665.807.915	-1,58
	- Belanja Barang dan Jasa	404.571.948.432,00	555.764.359.145	27,20
	- Belanja Modal	333.730.370.054,00	483.208.908.417	30,93

Sumber: BPKD Kota Bontang, 2019

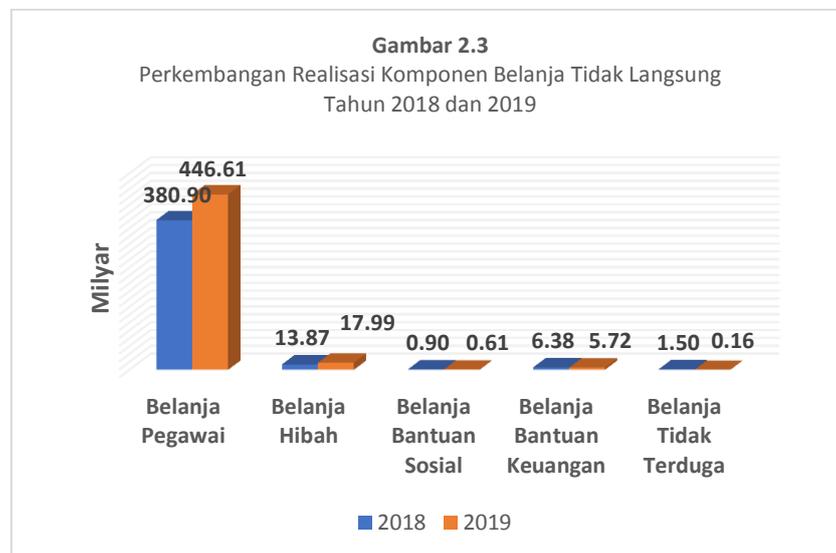
2.2.4.1. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dalam APBD kota Bontang Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 487.200.024.317,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta Belanja Tak Terduga. Dalam pelaksanaannya sampai dengan Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 471.131.196.673,95 dengan persentase pencapaian sebesar 96,70% dari target yang ditetapkan. Secara rinci target dan realisasi belanja tidak langsung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Pegawai;** Realisasi belanja pegawai hingga akhir tahun 2019 sebesar Rp. 446.614.560.879,95 atau 97,44% dari target anggaran sebesar Rp. 458.369.062.817,00
- Belanja Hibah;** Rencana belanja pada pos belanja hibah dialokasikan sebesar Rp. 19.549.836.500,00 dan sampai Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 17.999.916.155,00 dengan persentase pencapaian sebesar 92,07 persen dari anggaran yang ditetapkan.

- c) **Belanja Bantuan Sosial;** Rencana belanja pada pos belanja bantuan sosial ditetapkan dengan plafon sebesar Rp. 1.315.000.000,00 dan sampai dengan Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 619.935.699,00 atau 47,14%.
- d) **Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik;** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.016.100.000,00, pada tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.726.793.289,00 atau 95,19%.
- e) **Belanja Tak Terduga;** Alokasi anggaran belanja pada pos belanja tidak terduga ditetapkan sebesar Rp. 1.950.025.000,00 dan sampai dengan Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 169.990.650,00 dengan persentase pencapaian sebesar 8,72% dari anggaran yang ditetapkan.

Secara grafis perkembangan realisasi komponen Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini:

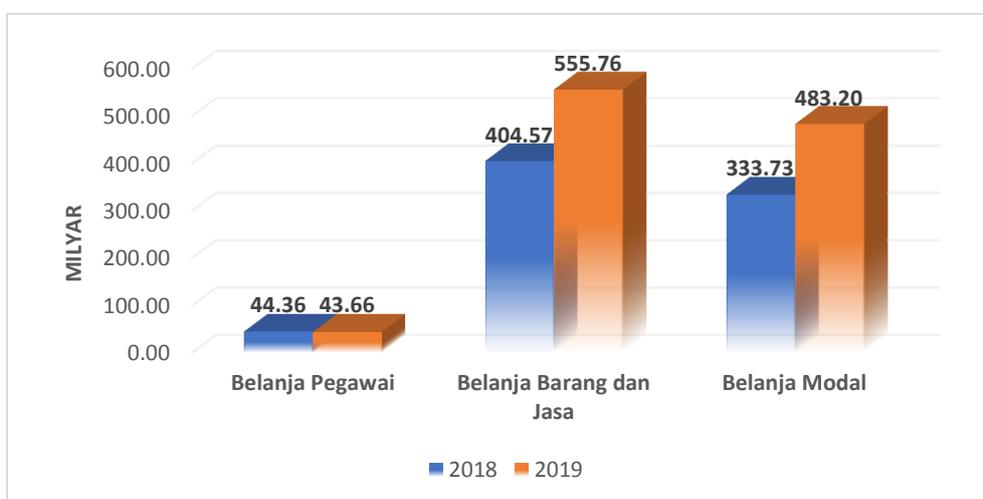


2.2.4.2. Target dan Realisasi Belanja Langsung

Rencana Belanja Langsung dalam APBD Kota Bontang Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 1.198.627.997.442,00 Hingga Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.082.639.075.476,66 atau sebesar 90,32% yang meliputi:

- a. **Belanja Pegawai**; rencana belanja pegawai ditetapkan dengan pagu sebesar Rp. 53.855.581.541,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 43.665.807.915,00 atau sebesar 81,08%.
- b. **Belanja Barang dan Jasa**; rencana belanja barang dan jasa ditetapkan dengan pagu sebesar Rp. 598.196.815.143,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 555.764.359.144,66 atau sebesar 91,91%.
- c. **Belanja Modal**; rencana belanja modal ditetapkan dengan pagu sebesar Rp. 546.575.600.758,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 483.208.908.417,00 atau sebesar 88,41%.

Secara grafis perkembangan realisasi komponen Belanja Langsung pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut ini:



Gambar 2.4. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Langsung Tahun 2018 dan 2019

2.2.5. Surplus/Defisit APBD

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.



Sedangkan apabila APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester tahun anggaran berjalan.

Pada Tahun Anggaran 2018, APBD Kota Bontang mengalami surplus sebesar Rp. 139.153.475.525,05 yang merupakan selisih positif antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah. Kondisi ini disebabkan antara lain karena capaian realisasi beberapa komponen pendapatan daerah melampaui target yang ditetapkan.

2.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019.



- b) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- d) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- c) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk



- memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
- d) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mendukung pencapaian target Millenium Development Goal's (MDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai MDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- f) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- g) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2019 bersaldo nol.
- b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.3.1.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan pada tahun 2019 diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan SiLPA tahun sebelumnya, yang bersumber dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, dan sisa penghematan belanja. Total penerimaan pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp.257.740.596.573,89 atau sebesar SILPA Tahun Anggaran 2018.

2.3.1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Bontang tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan mengingat realisasi penerimaan daerah yang relatif terbatas sehingga alokasi anggaran sepenuhnya diprioritaskan untuk pembiayaan



pembangunan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat dan belanja program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2019.

2.3.1.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2019, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 257.740.596.573,89 dengan realisasi sebesar Rp. 257.728.040.488,69 atau seluruhnya merupakan penerimaan SiLPA tahun 2018 dengan realisasinya mencapai 100% dari anggaran. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan, alokasi anggaran sepenuhnya diprioritaskan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta belanja program/kegiatan pada tahun 2019.

2.3.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pada Tahun Anggara 2019, Pemerintah Kota Bontang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp. 181.684.508.684,74. SiLPA tersebut terdiri dari surplus APBD yang disebabkan efisiensi anggaran sebesar Rp. 132.057.749.609,39 dan adanya peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp. 49.639.315.160,35.

2.4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah Kota Bontang dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas fiskal daerah menjadi permasalahan utama. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.
2. Regulasi sering mengalami perubahan sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Terbatasnya sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas dalam penatausahaan keuangan daerah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana di atas, beberapa solusi yang perlu untuk dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).



2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan alokasi dana perimbangan.
3. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal.
4. Mendorong peran serta dan partisipasi aktif pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
5. Melakukan penyesuaian dan sosialisasi terhadap perubahan regulasi.
6. Restrukturisasi kelembagaan pengelola keuangan daerah.
7. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan perangkat daerah melalui bimbingan teknis guna mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah.



BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagaimana kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2010 melaksanakan sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang dikalsifikasikan ke dalam 23 urusan wajib, 4 urusan pilihan dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja daerah, yang merupakan penjabaran dari visi misi pembangunan daerah.

Adapun urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Urusan Pemerintahan Daerah

	NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB		Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
	1	Pendidikan
	2	Kesehatan
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	6	Sosial
		Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
	7	Tenaga Kerja
	8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	9	Pangan
10	Pertanahan	
11	Lingkungan Hidup	



	12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	15	Perhubungan
	16	Komunikasi Dan Informatika
	17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	18	Penanaman Modal
	19	Kepemudaan Dan Olahraga
	20	Statistik
	21	Kebudayaan
	22	Perpustakaan
	23	Kearsipan
URUSAN PILIHAN	25	Kelautan Dan Perikanan
	26	Pariwisata
	27	Pertanian
	28	Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN	29	Perencanaan
	30	Keuangan
	31	Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
	32	Penelitian Dan Pengembangan
	33	Pengawasan
	34	Pendukung
	35	Kewilayahan

3.1 Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri atas 23 urusan sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan

Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang.

**a) Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan pendidikan antara lain: meningkatkan akses pemerataan pendidikan sehingga kemudahan akses memperoleh pendidikan dan kesenjangan mutu antar sekolah dan antar wilayah kecamatan dapat diseimbangkan secara proporsional, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif, berkarakter serta mempunyai daya saing yang dilandasi dengan akhlak mulia dan meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan kehidupan beragama.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) program pokok sebagai berikut:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik; Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan PAUD); Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan PAUD); Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi dan beberapa kegiatan lainnya.
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dilaksanakan melalui kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir; Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD); Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BS beserta perabotnya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD); Pembangunan dan Rehabilitasi Toilet (Jamban) SDN 002, SDN 011 dan SMPN 1 beserta sanitasinya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD& SMP); Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD & SMP); Pengadaan Sarana dan Peralatan Seni Budaya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD & SMP); Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 3 beserta Perabotnya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP); Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban Siswa/Guru SMPN 1 beserta Sanitasinya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP); Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer dan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (DAK Fisik



- Reguler Bidang Pendidikan SMP); Pengadaan Meubelair Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah; Penyelenggaraan Paket A Setara SD; Penyelenggaraan Paket B Setara SMP; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar; Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah, serta beberapa kegiatan lainnya
- 3) Program Pendidikan Non Formal, dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Operasional Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SKB; Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Publik); Pengadaan Media dan Peralatan Pendidikan dan beberapa kegiatan lainnya.
 - 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik dan Penilaian Angka Kredit.
 - 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan; Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan; Peringatan/Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan; Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah; Penyediaan Dana Pendamping Operasional Manajemen BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP) (Dana APBN).
 - 6) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) pada TK Pembina I, TK Pembina II, TK Satu Atap Bontang dan beberapa SD, SMP Negeri Bontang; Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina I, II dan TK Satu Atap Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD) dan Pembinaan Pendidikan Kepramukaan.
 - 7) Program Peningkatan Manajemen Pendidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi dan Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah dan Kelengkapannya.



- 8) Program Pendidikan Inklusif, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pendidikan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 8 program pokok dan 5 program penunjang serta 157 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp 124.066.463.021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 109.472.334.509 atau 88,24% dan realisasi fisik sebesar 96,23%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
			Target	Realisasi
1 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,88	12,78	12,89
2 Angka rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,70	10,40	10,72
3 Angka Partisipasi Kasar (APK)				
- SD/MI/Paket A (%)	Persentase	101,07	109,75	102,99
- SMP/MTS/Paket B (%)	Persentase	108,26	109,10	106,93
4 Angka Pendidikan yang ditamatkan				
a. SD/MI/Paket A (%)	Persentase	1,95	1,88	1,80
b. SMP/MTS/Paket B (%)	Persentase	1,77	1,78	1,79
5 Angka Partisipasi Murni (APM)				
a. SD/MI/Paket A (%)	Persentase	92,50	98,81	91,04
b. SMP/MTS/Paket B (%)	Persentase	81,36	80,53	75,68
6 Pendidikan Sekolah Dasar				
a. Angka Partisipasi Sekolah	Persentase	925,01	1070,00	910,38
b. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah	Rasio	30,44	33,89	30,78
c. Rasio Guru/Murid	Rasio	535,15	543,61	505,45
d. Rasio Guru / Murid Per Kelas rata- rata	Rasio	53,52	56,18	50,54
7 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)				
a. Angka Partisipasi Sekolah	Persentase	813,57	805,50	756,76
b. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	Rasio	38,36	30,74	38,49
c. Rasio Guru/Murid	Rasio	638,79	732,67	630,74
d. Rasio Guru / Murid Per Kelas rata- rata	Rasio	73,88	74,23	63,07
8 Penduduk yang berusia > 15 Tahun	Persentase	99,92	99,89	99,92



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
			Target	Realisasi
Melek Huruf (tidak buta aksara)				
9 Fasilitas Pendidikan				
a. Sekolah / Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persentase	95,08	96,00	91.80
b. Sekolah / Pendidikan SMP/MTS Kondisi Bangunan Baik	Persentase	91,43	96,00	82.35
10 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persentase	96,40	94,42	78.65
11 Angka Putus Sekolah				
a) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase	0,00	0,01	0
b) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS	Persentase	0,00	0,02	0

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2019 antara lain; indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di tahun 2019 adalah 12,89, mengalami peningkatan sebesar 0,11; Angka Rata-Rata Lama Bersekolah di tahun 2019 adalah 10,72 juga mengalami peningkatan sebesar 0,32; Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2019 pada jenjang SD mengalami penurunan 6,76 demikian pula pada jenjang SMP mengalami penurunan 2,17 dari target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi karena menurunnya angka jumlah penduduk usia sekolah, namun karena APK melebihi 100% itu artinya tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

Untuk Angka pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2019 dari jenjang SD mengalami penurunan 0,08 hal ini dikarenakan angka pendidikan yang ditamatkan dipengaruhi jumlah penduduk (tahun 2018: 170611, tahun 2019: 180432) padahal jumlah lulusan hanya mengalami perubahan kecil (tahun 2017: 3319, tahun 2018: 3246), sedangkan pada jenjang SMP telah mencapai target serta mengalami peningkatan sebesar 0,01%.

Angka Partisipasi Murni jenjang SD dan Jenjang SMP tahun 2019 tidak mencapai target dan mengalami penurunan (SD; 7,77% , SMP: 4,85%), hal ini di sebabkan terdapat anak yang bersekolah pada jenjang SD/MI tetapi tidak termasuk dalam kelompok umur jenjang SD yaitu usia 7-12 Tahun. Dan terdapat anak yang



bersekolah pada jenjang SMP/MTs tetapi tidak termasuk dalam kelompok umur jenjang SMP yaitu usia 13-15 Tahun.

Indikator pendidikan Sekolah Dasar (SD) berupa angka partisipasi sekolah tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan jumlah siswa usia SD 7-12 tahun 2019 lebih rendah bila dibandingkan tahun sebelumnya (2018= 18,539; 2019= 18,041) dan jumlah penduduk pada usia 7-12 tahun juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2018= 20042; 2019= 19,817); Rasio guru dan murid mengalami penurunan 38,16 dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan jumlah murid SD yang mengalami penurunan sebanyak 63 orang dari tahun sebelumnya sedangkan perubahan pada jumlah guru hanya 56 orang.

Indikator pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berupa angka partisipasi sekolah mengalami penurunan, hal ini dikarenakan jumlah siswa usia SMP (13-15) tahun 2019 lebih rendah bila dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah mengalami peningkatan sebesar 7,75. Sedangkan Rasio guru dan murid mengalami penurunan 101,93 dari target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan jumlah siswa usia SMP (13-15) tahun 2019 lebih rendah dari tahun sebelumnya (2018= 7423; 2019= 6882), padahal jumlah penduduk usia 13-15 tahun hanya mengalami perubahan kecil.

Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,03%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatannya dalam bidang pendidikan non formal sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kota Bontang.

Pada indikator fasilitas pendidikan, Bangunan SD/MI dalam kondisi baik sebesar 91,80% sedangkan Bangunan SMP/MTS dalam kondisi baik sebesar 82,35, hal ini lebih rendah dari target yang ditetapkan, dikarenakan dari 61 sekolah jenjang SD/MI di Bontang terdapat 5 sekolah yang mengalami kerusakan bangunan (19 kelas rusak ringan dan 10 kelas rusak berat), sedangkan dari 34 Sekolah SMP/MTs masih terdapat 6 sekolah yang mengalami kerusakan bangunan.

Indikator Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Angka Partisipasi Kasar mengalami penurunan sebesar 15,77 % karena terdapat peningkatan jumlah



penduduk sebanyak 104 orang tetapi jumlah siswa PAUD menurun sebesar 1815 siswa.

Dari total siswa SD/ MI dan SMP/ MTs kota Bontang, tidak terdapat anak putus sekolah tahun 2019. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah Kota Bontang seperti pemberian bantuan alat sekolah berupa seragam, tas dan sepatu tentu sangat membantu meringankan biaya pendidikan bagi para orang tua siswa. Selain itu, pemberian dana BOSTK bagi seluruh sekolah di Kota Bontang juga membuat sekolah negeri tidak lagi memungut bayaran, hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dan orang tua.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Adanya kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau dapat dilaksanakan namun tidak maksimal dikarenakan kendala teknis seperti petunjuk teknis yang terlambat, mepetnya waktu pelaksanaan.	Melanjutkan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di Tahun 2019 pada Tahun 2020 sesuai dengan aturan maupun petunjuk teknis yang berlaku serta terus meningkatkan komunikasi yang baik.

d) Prestasi

No	Nama Kejuaraan/ Kegiatan/ Penghargaan Tahun 2019	Sekolah/Lembaga	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Apresiasi Bunda PAUD			Tingkat Nasional
2	Panji Apresiasi Bunda PAUD			Tingkat Nasional
3	Himpaudi Award			Tingkat Nasional
4	Gernas Baru		TPA Ash Shibhyan	Tingkat Nasional
5	Juara 3 Lembaga Kursus dan Berprestasi		LKP Sasana Widya	Tingkat Nasional
6	Salma Hayek Safira	Juara 3 Desain Poster FLS2N-SMP	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
7	Juan Lucas Sinaga	Juara 1 Cabor Renang 100 M Gaya Bebas Putra O2SN	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi



No	Nama Kejuaraan/ Kegiatan/ Penghargaan Tahun 2019	Sekolah/Lembaga	Keterangan
8	Juan Lucas Sinaga Juara 1 Cabor Renang 50 M Gaya Bebas Putra O2SN	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
9	Juan Lucas Sinaga Juara 2 Cabor Renang 50 M Gaya Kupu - kupu Putra O2SN	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
10	Luqman Doddy Rahmandani	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
11	Dzakwan Dwi Ramadhani		
12	Fayyad Haifan Akmal		
13	Salsabila Putri Juara 2 Kaligrafi Tingkat SMP dalam PENTAS PAI Tingkat Provinsi	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
14	Richa Dewi Asih	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
15	Marsa Gufti Wahidah		
16	Adyatma Fikri		
17	Aisyah Amani Nurhasanah Juara 1 Musabaqah Fahmil Quran Putri pada MTQ	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
18	Dhio Pravi Fazza Soesanto Juara 1 Musabaqah Fahmil Quran Putra pada MTQ	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
19	Ma'ruf Amin Abdullah Juara 2 Kualifikasi Sesi 1 Divisi Compound Junior 30 meter	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
20	Ma'ruf Amin Abdullah Juara 2 Kualifikasi Sesi 2 Divisi Compound Junior 30 meter	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi



No	Nama Kejuaraan/ Kegiatan/ Penghargaan Tahun 2019	Sekolah/Lembaga	Keterangan
21	Ma'ruf Amin Abdullah Juara 2 Aduan Mix Team Divisi Compound Junior 30 meter	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
22	Ma'ruf Amin Abdullah Juara 1 Aduan Beregu Divisi Compound Junior 30 meter	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
23	Ma'ruf Amin Abdullah Juara 3 Kualifikasi Sesi 1 Divisi Compound Senior 50 meter	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
24	Ma'ruf Amin Abdullah Juara 2 Aduan Mix Team Divisi Compound Senior 50 meter	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
25	Ma'ruf Amin Abdullah Juara 1 Aduan Beregu Divisi Compound Senior 50 meter	SMP YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
26	Muhammad Farid Wajdi Juara 3 Kriya Anyam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N-SD)	SD YPVDP Bontang	Tingkat Provinsi
27	Aqilla Rachil Zahrana Rustam Solo Vocal FLS2N Tingkat Nasional Tahun 2019	SD YPVDP Bontang	Juara 1 Tingkat Provinsi & Juara Harapan 3 Tingkat Nasional
28	Muhammad Fariz Fauzan Fahrezi Juara 3 Panjat Tebing	SDN 005 Bontang Utara	Tingkat Provinsi
29	Ulva Aulia Juara 1 Lead Classic Panjat Tebiing	SDN 001 Bontang Selatan	Tingkat Provinsi
30	Ulva Aulia Juara 2 Speed Classic Panjat Tebiing	SDN 001 Bontang Selatan	Tingkat Provinsi
31	Ahmad Syaugi Ramadhan Juara 2 Tartil	SDN 001 Bontang Selatan	Tingkat Provinsi



B. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

a) Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pembangunan Kota Bontang yakni Peningkatan Kualitas Kesehatan untuk semua. Pelaksanaan urusan kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada seluruh masyarakat melalui program-program prioritas bidang kesehatan yang telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 20 (dua puluh) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan,
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat,
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan,
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat,
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat,
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,
8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin,
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya,
10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan,
11. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan anak,
12. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan,
13. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda),
14. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Masalah, Kejiwaan,
15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan,
16. Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah Bencana,
17. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan,



18. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – Paru/Rumah Sakit Mata,
19. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – Paru/Rumah Sakit Mata,
20. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Kesehatan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang melalui 20 program pokok dan 5 program penunjang serta 176 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Kesehatan pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp.180.355.874.821,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.147.754.182.062,00 atau 81,92% dan realisasi fisik sebesar 97,82%.

Tabel 3.3.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
			Target	Realisasi
Persentase Rumah tangga ber-PHBS	Prosentase	96,78	70	77,3
Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Prosentase	90	80	97
Presentase TTU yang memenuhi syarat	Prosentase	95	87	94,65
Presentase TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat)	Prosentase	32,4	46	46
Angka Harapan Hidup	Prosentase	73,69	73,79	73,69
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	77	120	79
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Rasio	10	4,7	11,9
Prevalensi Balita Gizi Kurang/Underweight (BB/U)	Prosentase	0,4	< 5	0,3
Insiden Rate DBD	Rasio	157	90	385,9

Berdasarkan tabel di atas, Capaian indikator Presentase Rumah Tangga ber-PHBS mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan,



adanya perubahan definisi operasional dalam indikator PHBS yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam Pendataan Keluarga Sehat dimana didalamnya terdapat 3 indikator yang berubah yaitu perilaku merokok dalam rumah, kebiasaan makan sayur dan buah 3 porsi dalam sehari serta aktivitas fisik berupa olahraga selama 30 menit secara teratur.

Untuk capaian Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan dari target menjadi 79 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bontang terdapat 3 kasus kematian ibu hamil, bersalin dan nifas dari total 3.793 kelahiran, sehingga perlu penggalakan kembali sosialisasi kepada ibu hamil, bersalin dan nifas serta melakukan edukasi suami siaga.

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup mengalami peningkatan menjadi 11,9% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan data tahun 2018, terdapat 45 kasus kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) dari 3.793 kelahiran hidup, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat terhadap resiko kematian bayi.

Capaian indikator Insiden Rate DBD mengalami peningkatan yang signifikan dari target yang ditetapkan yaitu 295 dan terealisasi sebesar 385,9. Kota Bontang merupakan salah satu daerah endemis demam berdarah. Pada tahun 2019 terdapat 686 kasus DBD dari total 177.722 penduduk. Pada saat musim hujan cenderung mengakibatkan banjir, dan pada umumnya kasus demam berdarah meningkat disebabkan banyaknya genangan air serta masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bontang terhadap pencegahan DBD. Hal tersebut dibuktikan masih banyak terdapat jentik nyamuk di tempat penampungan air seperti drum, bak mandi serta botol-botol minuman bekas di halaman rumah warga. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan DBD serta melakukan advokasi/pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

**c) Prestasi**

No	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Tahun 2019	Keterangan
1	Lomba Ssekolah Sehat (LSS) Tk Nasional	2019	Juara I
2	Best Caracter Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tk Nasional	2019	Juara II
3	Germas UKM Kategori Gold Indo-HCF	2019	Gold
4	Tenaga Kesehatan Teladan kategori Perawat	2019	Juara I
5	Posyandu Balita Tk Nasional	2019	Juara Harapan I

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang berkelanjutan, tersedianya infrastruktur kota yang memadai sesuai dengan perkembangan kota dan meningkatnya pengelolaan mitigasi dan penanggulangan bencana. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 12 (dua belas) program pokok, sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Jalan Satya Lencana, Peningkatan Jalan HOP, Pembangunan Jembatan RT. 7 Kelurahan Kanaan, Pembangunan Jembatan Jalan Pontianak Kelurahan Telihan, Pembangunan Parit Jalan Arief Rahman Hakim, Pembangunan Jalan ke Pemakaman Kristen RT. 01 Kelurahan Kanaan, Pembangunan Box Culvert Jl. Durian 2 RT 20 Kel Gunung Elai, Pembangunan penutup parit Jl. Mas Kel. Tanjung Laut Indah, Pembangunan turap dan badan jalan Bundaran Perum BSD, Pembangunan Jembatan Gang Atletik II (Ex. Jabora) RT. 26, Pembangunan Jembatan Gang Atletik 9 RT. 27, Pembangunan Jembatan



- Gang Atletik 3 RT. 27, dan Pembangunan Jembatan Lapangan Futsal Guntung RT.12 di Kelurahan Guntung.
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Kanaan, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Belimbing, Peningkatan Saluran Drainase Jl. Pangeran Suryanata, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Kuala (Bantuan Keuangan Provinsi), Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Bontang Baru, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Api-Api, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Satimpo, Peningkatan Saluran Drainase Jl. HM. Ardans, Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru, dan Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan (Bantuan Keuangan Provinsi).
 3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dilaksanakan melalui kegiatan Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Kanaan, Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai, Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api, Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Bontang Kuala, Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan, Penurapan Sungai Guntung di Kelurahan Guntung, Penanganan Longsoran Jalan Soekarno-Hatta, Penanganan Longsoran Jalan Lingkar Komplek Pemerintah Kota Bontang, dan Penurapan Sungai di Kota Bontang (Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi) (DBH - DR).
 4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Utara, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Selatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Barat, Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase dan Trotoar Jalan, dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jalan Tari Jepen Sungai Guntung di Kelurahan Guntung.
 5. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Updating Sistem Informasi Manajemen Ruas Jalan.



6. Program Pengendalian Banjir, dilaksanakan melalui kegiatan Normalisasi Sungai Bontang, Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara, Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Selatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Barat, Penyusunan FS Polder Telihan, DED Danau Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bontang, Pembangunan Polder Kelurahan Tanjung Laut, Pembangunan Polder Kelurahan Bontang Kuala, dan Penyusunan FS Polder Kelurahan Satimpo.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Islamic Center Kota Bontang, Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan, Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Peribadatan, Revitalisasi Asrama Putra dan Putri Mahasiswa Kota Bontang, Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pembangunan Panti Sosial Terpadu, Pembangunan Gedung Kantor, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Negara.
8. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sarana Penyelenggaraan MTQ.
9. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Jalan Soekarno - Hatta Kelurahan Bontang Lestari, Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Peningkatan Jalan Belibis, Peningkatan Jalan AIP II KS. Tubun, Peningkatan Jalan M. Roem (Bantuan Keuangan Provinsi), Peningkatan Jalan Selat Karimata, Peningkatan Jalan Menjangan, Tupai, dan Manggis BTN-PKT, Peningkatan Jalan Perumahan Pesona Bukit Sintuk, Peningkatan Jalan Awang Long (Bantuan Keuangan Provinsi), Peningkatan Jalan dr. Cipto Mangunkusumo (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan), Peningkatan Jalan Soekarno Hatta (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan), Lanjutan Peningkatan Jalan Kakap Merah 1, Peningkatan Jalan Soekarno Hatta (Bantuan Keuangan Provinsi), Peningkatan Jalan Mulawarman (Bantuan Keuangan Provinsi), Peningkatan Jalan Otto Iskandardinata (Bantuan Keuangan Provinsi), dan Peningkatan Jalan Hop (Bantuan Keuangan Provinsi).



10. Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan



Kanaan, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan, dan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara (Bantuan Keuangan Provinsi).

11. Program Perencanaan Tata Ruang, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU), dan Penyusunan Review Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bontang Tahun 2016-2036.
12. Program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang, Verifikasi Permohonan Siteplan Kawasan non Perumahan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang, Bimbingan Teknis Pengendalian Bangunan dan Ruang, dan Penyelenggaraan TIM Bangunan Gedung.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2019 dilaksanakan melalui 12 program pokok dan 3 program penunjang melalui 132 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp. 237.947.224.350,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 221.101.781.595,- atau 92,92% dan realisasi fisik sebesar 97,81%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena dua hal yaitu adanya efisiensi dari sisa lelang dan adanya beberapa kegiatan yang tidak terserap seluruh anggarannya. Sedangkan realisasi fisik juga tidak mencapai 100% karena adanya satu kegiatan yang tidak selesai, yaitu kegiatan Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan; dua kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu Normalisasi Sungai Bontang dan Pembangunan Islamic Center Kota Bontang; dan enam kegiatan yang tidak dapat selesai tepat waktu sehingga diberikan perpanjangan waktu yaitu kegiatan Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai, Penanganan Longsoran Jalan Soekarno-Hatta, Pembangunan Sarana Penyelenggaraan MTQ, Peningkatan Jalan M. Roem (Bantuan Keuangan Provinsi), dan Peningkatan Jalan Soekarno Hatta (Bantuan Keuangan Provinsi).



Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	
			Target	Realisasi
Luas wilayah banjir / tergenang	Ha	29,19	26,28	26,28
Jalan dalam kondisi baik	%	99,35	97,84	99,95
Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi	%	48	46,88	46,88*
Prosentase bangunan yang taat terhadap perizinan bangunan	%	35	52	52
Jumlah gedung/kantor yang terbangun	Unit	5	5	7

Untuk indikator kinerja luas wilayah banjir/tergenang mengalami tren yang positif dimana capaian luas wilayah banjir/tergenang pada tahun 2019 berkurang sebesar 2,91 Ha menjadi 26,28 Ha dari capaian pada tahun 2018 sebesar 29,19. Program yang mendukung untuk pencapaian indikator kinerja luas wilayah banjir/tergenang yaitu Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Program Pengendalian Banjir.

Indikator kinerja jalan mengalami peningkatan sebesar 2,11% dari 97,84% pada tahun 2018 menjadi 99,95% pada tahun 2019. Program yang mendukung untuk pencapaian indikator kinerja jalan dalam kondisi baik yaitu Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman.

Sedangkan untuk realisasi indikator kinerja Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi masih tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu 48%, akan tetapi untuk realisasi indikator kinerja Prosentase bangunan yang taat terhadap perizinan bangunan pada tahun 2019 naik 17% dari sebelumnya 35% pada tahun 2018. Untuk realisasi indikator kinerja jumlah



gedung/kantor yang terbangun meningkat menjadi 7 unit dari yang sebelumnya 5 unit yaitu KPU, Kecamatan Bontang Selatan, Asrama Putra Makassar, Panti sosial, P2TP2A, Reskrim dan Kejaksaan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Beberapa kegiatan tidak selesai tepat waktu	Mempercepat proses lelang pada awal tahun dan mengoptimalkan pengawasan pekerjaan di lapangan
2 Program pengendalian banjir yang belum optimal karena alokasi anggaran yang terbatas	Alokasi anggaran harus ditambah karena ini merupakan program prioritas yang harus ditangani
3 Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang dalam Perda. No. Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan PZ Kota Bontang Tahun 2016 - 2036	Peninjauan kembali rencana tata ruang kota dan menyusun kebijakan serta strategi baru sehingga secara bertahap terwujud perbaikan rencana struktur dan pola ruang
4 Masih rendahnya rasio bangunan yang mempunyai IMB di Kota Bontang	Perlu sosialisasi agar masyarakat mau mendaftarkan bangunannya agar mempunyai IMB, dan perlunya membuat peraturan tambahan berupa insentif dan disinsentif untuk pengurusan penataan ruang

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mencapai sasaran strategis menurunnya jumlah rumah tidak layak huni, meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi, dan meningkatnya akses pelayanan air minum. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok, sebagai berikut :



1. Program Pengembangan Perumahan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa, Pemeliharaan dan Operasional Rusunawa, dan Operasional UPT Rusunawa.
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3. Program Penataan Permukiman Lingkungan, dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungai Bontang.
4. Program Penataan Permukiman Lingkungan, dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dan Penataan Kawasan Kumuh Kota Bontang.
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah, dilaksanakan melalui kegiatan Optimalisasi Sistem IPAL Bontang Kuala, Optimalisasi Sistem IPAL Guntung, Optimalisasi Sistem IPAL Loktuan, Optimalisasi Sistem IPAL Berbas Pantai, Optimalisasi Sistem IPAL Api-Api, Pengembangan Jaringan Air Minum Kota Bontang, Peremajaan Pipa Air Bersih Kota Bontang, Pembangunan Reverse Osmosis (RO) Kawasan Pesisir, Peningkatan Sarana dan Prasarana WTP Kota Bontang, Pengembangan Jaringan Sistem IPAL Berbas Pantai, Penyusunan Dokumen Lingkungan Sistem IPAL Kota Bontang, Sistem Pengolahan Air Limbah Kota Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi), Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kanaan untuk Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat (DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum), Pembuatan Sumur Dalam, dan Penambahan Jaringan Pipa Air Minum Kota Bontang (Bantuan Keuangan Propinsi).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 5 program pokok dan 4 program penunjang serta 44 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.38.588.413.414,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.35.315.625.210,00 atau 91,52% dan realisasi fisik sebesar 99,01%.



Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
			Target	Realisasi
Persentase rumah tidak layak huni	%	6,28	1,50	2,35
Luas kawasan permukiman kumuh	ha	26,13	49,28	16,33
Persentase rumah tangga bersanitasi	%	99,51	97,40	99,52
Persentase jumlah penduduk yang terlayani air minum	%	99,52	97,75	99,53/ 97,64 (revisi)

Indikator kinerja persentase jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan sebesar 3,93% dari kondisi tahun 2018 sebesar 6,28% menjadi 2,35% di tahun 2019. Namun capaian 2,35% di tahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,5% dikarenakan pembangunan untuk rumah tidak layak huni masih mengandalkan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah Kota Bontang belum dapat melaksanakan karena belum mempunyai regulasi atau payung hukumnya. Di tahun 2019 hanya pemerintah pusat yang melaksanakan pembangunan untuk rumah tidak layak huni di Kota Bontang sebanyak 164 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Indikator luas kawasan permukiman kumuh mengalami penurunan dari 26,13 ha di tahun 2018 menjadi 16,33 ha di tahun 2019 atau mengalami penurunan sebesar 9,80 ha. Capaian ini juga sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dimana tahun 2019 sisa luas kawasan permukiman kumuh Kota Bontang sebesar 49,25 ha. Keberhasilan pencapaian ini tak lepas dari peran para stakeholder (pemerintah pusat, pemerintah Kota Bontang dan perusahaan/swasta) yang telah melakukan kolaborasi pendanaan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Bontang. Penurunan luas kawasan permukiman kumuh tahun 2019 sebesar 9,80 ha



masing-masing berada di Kelurahan Tanjung Laut Indah sebesar 4,22 ha, Kelurahan Gunung Elai sebesar 5,01 ha, dan Kelurahan Satimpo sebesar 0,57 ha.

Untuk indikator persentase rumah tangga bersanitasi dan persentase jumlah penduduk yang terlayani air minum mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Persentase rumah tangga bersanitasi mengalami peningkatan dari 99,51% ditahun 2018 menjadi 99, 52% ditahun 2019, dan untuk persentase jumlah penduduk yang terlayani air minum mengalami peningkatan dari 99,52% ditahun 2018 menjadi 99,53% ditahun 2019. Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah rumah tangga yang bersanitasi sebesar 21.193 rumah tangga, dan jumlah penduduk yang telah terlayani air minum 180.764 jiwa.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Belum adanya payung hukum di Pemerintah Kota Bontang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan untuk rumah tidak layak huni.	1. Perlu segera disusun regulasi/ Peraturan Wali Kota untuk dasar pelaksanaan pembangunan untuk rumah tidak layak huni dengan menggunakan dana dari APBD Kota Bontang.
2. Belum dimilikinya <i>database</i> perumahan dan kawasan permukiman yang lengkap.	2. Penganggaran untuk penyusunan <i>database</i> perumahan dan kawasan permukiman.
3. Belum optimalnya penanganan pelayanan air minum dan sanitasi didaerah pesisir / pulau-pulau kecil.	3. Penyediaan fasilitas penyediaan air minum untuk penduduk daerah pesisir/ pulau-pulau kecil, seperti : bak penampungan air bersih, pembangunan <i>Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)</i> .
	4. Penyediaan fasilitas pengolah air limbah domestik untuk penduduk daerah pesisir/ pulau-pulau kecil, seperti: MCK komunal, septitank komunal, atau IPAL komunal.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib Ketentraman dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Ketentraman diarahkan untuk mencapai sasaran strategis antara lain :

1. Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat dan terlaksananya penegakan peraturan dan produk hukum daerah yang berlaku;
2. Optimalisasi pencegahan, pengendalian, penanggulangan bahaya kebakaran pada kawasan pemukiman penduduk, kawasan industri, kawasan hutan dan lahan yang rawan terhadap bahaya kebakaran di Kota Bontang;
3. Meningkatnya responsifitas dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana;
5. Penguatan dan internalisasi ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
6. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi; dan
7. Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan Kota Bontang.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
4. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
5. Program Pengembangan Wawasan Pembangunan
6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 8 program pokok dan 19 program penunjang serta 115 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan ini pada tahun anggaran 2019 seluruhnya



sebesar Rp.30.971.434.785,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.857.424.411,00 atau 96,40% dan realisasi fisik sebesar 99,67%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Ketentraman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
		2018	Target	2019
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (DPKP)	Orang	-	13.260	11.785
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (DPKP)	Orang	-	2.550	3.494
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (DPKP)	Orang	-	54.015	150
Persentase Respon Time tanggap darurat (BPBD)	Persen	125	90	100
Persentase tingkat kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana (BPBD)	Persen	117,64	85	100
Jumlah kelompok relawan yang sudah terlatih (BPBD)	Persen	117,64	85	100
Persentase pembinaan terhadap masyarakat tentang ideologi negara dan wawasan kebangsaan (Bakesbangpol)	Persen	-	60	66,18
Persentase pembinaan forum kerukunan masyarakat (Bakesbangpol)	Persen	0,15	0,19	1,14
Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat di daerah (Bakesbangpol)	Persen	50	40	51,76
Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (Bakesbangpol)	Persen	30	70,18	94,04

Pada sub Urusan Pembinaan Wawasan Kebangsaan, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pada Indikator Pembinaan Terhadap Masyarakat Tentang Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan meningkat sebesar 66,18%. Indikator Pembinaan Politik terhadap aparatur dan Masyarakat di Daerah meningkat 2, 76% dan indikator



Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP meningkat 16,81% dari tahun 2018. Persentase pembinaan terhadap masyarakat tentang ideologi negara dan wawasan kebangsaan merupakan IKU pada tahun 2019. Indikator ini menunjukkan bahwa sebanyak 66,18% masyarakat telah dibina tentang ideologi negara dan wawasan kebangsaan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Jadwal dan rencana kegiatan Patroli Wilayah belum maksimal	1. Melakukan koordinasi sebelum melaksanakan kegiatan dengan menyesuaikan jadwal yang sudah dibuat baik Satpol PP maupun instansi vertikal.
2. Data-data daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban belum valid dari Kecamatan dan Kelurahan.	2. Melakukan kegiatan rutin patrol wilayah dengan pihak kecamatan dan kelurahan.
3. Kurang koordinasi dengan pihak terkait dalam Pelaksanaan Patroli Wilayah.	3. Aktif melakukan koordinasi dengan cara melaksanakan patrol gabungan dengan instansi untuk mendapatkan data yang valid.
4. Keterbatasan alat transportasi untuk kegiatan patroli wilayah.	4. Mengusulkan anggaran pengadaan sarana transportasi.
5. Ketersediaan SDM kurang memadai baik secara kualitas dan kuantitas.	5.a. Perlunya penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisa beban kerja. 5.b.. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi tenaga Satpol PP, dan Petugas Pemadam Kebakaran.
6. Ada beberapa perda yang perlu direvisi	6. Berkoordinasi dengan OPD teknis untuk melakukan perubahan perda.
7. Kurangnya tenaga PPNS.	7. Mengusulkan pengangkatan PPNS.
8. Anggaran kegiatan kurang.	8. Mengusulkan anggaran kegiatan.
9. Ketersediaan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang belum memadai untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian	9. Perlu pengadaan lahan dan bangunan pos-pos pemadam kebakaran beserta sarana dan prasarannya di beberapa titik pada daerah wilayah manajemen kebakaran (WBK) Kota Bontang, antara lain : Pos Berbas Pantai,



Permasalahan	Solusi
Kinerja,	Pos Telihan/Kanaan dan Pos Sektor di Bontang Lestari.
10. Ketersediaan sumber air sebagai media pemadam kebakaran belum memadai.	10. Perlu dilakukan pendekatan dan kerjasama dengan pemili/pengelola sumber air (PDAM, Kenari Water Park, Surya Raya, PT Badak, PT Pupuk Kaltim, dll) dan atau pengadaan sumber air sendiri dengan pengadaan sumur bor dan kolam air di beberapa titik pada WMK.

F. Urusan Sosial

Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM).

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara bermartabat dan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS, Penanganan Korban Bencana, Operasional Rumah Singgah, dan Penyaluran Beras Rastra.
- 2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
- 3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dan Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang.



- 4) Program Pemberdayaan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin, Verifikasi Data Terpadu Program Kemiskinan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat dan Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Sosial pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 4 program pokok dan 5 program penunjang serta 31 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan sosial pada tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar Rp.6.294.882.550,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.103.642.268,00 atau 96,96% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Sosial Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	Target	2019
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	93,57	80,55	99,08

Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama urusan Sosial telah cukup baik. Berdasarkan basis data PMKS Kota Bontang Tahun 2019, jumlah PMKS sebanyak 38.863 jiwa yang terbagi dalam 26 jenis/kategori. PMKS terbesar berasal dari kategori fakir miskin 12.692 jiwa dan korban bencana alam 18.440 jiwa.

Dari total jumlah PMKS, sebanyak 38.863 (98,05) telah ditangani dan sejumlah 37.169 (99,08) telah mendapatkan bantuan. Bantuan terbesar diberikan kepada kelompok fakir miskin melalui program PKH (Program Keluarga Harapan), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional), PBI Daerah (Penerima Bantuan Iuran Daerah), dan bantuan pendidikan. Selain itu, sejumlah besar bantuan berikutnya diberikan untuk kelompok Anak dengan Kedisabilitas (ADK).

Penanganan PMKS tidak hanya dari segi fisik namun secara holistik dengan menggunakan pendekatan biopsikososial dan spiritual. Pendekatan biopsikososial melibatkan suatu konsep hubungan interaksi antara faktor



biologis, psikologis, dan sosial dalam upaya mengerti dan memahami kondisi PMKS, sehingga penanganannya dapat paripurna.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi
1.	Makin kompleksnya dinamika permasalahan sosial	Penanganan PMKS yang berkelanjutan hingga tuntas
2.	Kurang aktifnya PSKS terhadap permasalahan sosial	Pembinaan nmental/capacity building terhadap PSKS
3.	Belum adanya SOP penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	Membuat SOP dan penyamaan persepsi antar stakeholder

d) Penghargaan

No	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Keterangan
1.	LK3 LANDAK	Best Innovation (tk. Nasional)

3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

G. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Wajib Tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Tenaga Kerja dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan Persentase jumlah pencari kerja yang terlatih terhadap jumlah pencari kerja yang terdaftar melalui penempatan pencari kerja, persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama, partisipasi angkatan kerja, angka sengketa pengusaha dengan pekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan kesempatan kerja, dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, 'Pembinaan dan Pembentukan Wira Usaha Baru, Penyuluhan Informasi Jabatan;



- 2) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan, Bimbingan Teknis Tentang Peningkatan Peran dan Fungsi SP/SB, Lembaga Kerjasama Tripartit, Dewan Pengupahan Kota Bontang, Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, 'Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 2 program pokok dan 4 program penunjang serta 26 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Sosial pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.6.202.898.913,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.078.544.540,00 atau 98,00% dan realisasi fisik sebesar 98,95%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
			Target	Realisasi
1 Prosentase jumlah pencari kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan	%	-	60	62,94
2 Prosentase pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar	%	-	20	16,19
3 Prosentase jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	%	-	70	51,72

Tahun 2018 Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang tidak ada realisasi dikarenakan Dinas Ketenagakerjaan baru terbentuk tahun 2019 sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang. Pada



tahun 2018 urusan ketenagakerjaan masih menjadi tugas, fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang.

Realisasi tahun 2019 prosentase jumlah pencari kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar sebesar 64,73 %, melebihi 4,73 poin dari target yang ditetapkan. Prosentase ini sangat dipengaruhi oleh pembagiannya yaitu jumlah pencari kerja yang mendaftar. Pada tahun 2019 jumlah pencari kerja yang mendaftar lebih banyak dibanding jumlah pencari kerja yang dilatih seperti yang disajikan pada table 11, dimana data pencari kerja yang mendaftar pelatihan sebanyak 224 orang dan pencari kerja yang mengikuti pelatihan sebanyak 145 orang, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran. Namun jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan yang ditargetkan adalah sebanyak 145 orang sesuai yang ada di Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2019, sehingga dapat dikatakan presentase realisasinya 100%.

Realisasi tahun 2019 Prosentase pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar mengalami penurunan 3,81 dari target yang sebesar 20%, penurunan ini disebabkan adanya penurunan lowongan kerja yang terdaftar sebesar 29,44% dari tahun 2018. Dalam hal ini telah dilakukan upaya melalui kegiatan sosialisasi kepada pencari dan pemberi kerja serta job canvassing / pencarian informasi lowongan dan penempatan tenaga kerja.

Realisasi tahun 2019 Presentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama mengalami penurunan 18,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Dari data Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang pada tahun 2019 jumlah perselisihan hubungan industrial sebanyak 29 kasus dan yang berhasil diselesaikan dengan perjanjian Bersama sebanyak 15 kasus, hal ini disebabkan karena tidak terjadinya kesepakatan antara pihak yang berselisih untuk melakukan perjanjian bersama. Dalam hal ini telah dilakukan upaya melalui perundingan mediasi dan memberikan penjelasan mengenai pentingnya bermusyawarah dalam penyelesaian perselisihan industrial. Namun walaupun perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan perjanjian Bersama, para mediator sesuai kewenangannya memberikan anjuran kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan



perselisihan tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

H. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta meningkatnya perlindungan anak dan perempuan.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak, dan Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak.
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang.
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender, dan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2019 dilaksanakan melalui 4 program pokok, 4 program penunjang serta 26 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.5.099.741.150,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.851.411.581,00 atau 95,13% dan realisasi fisik sebesar 98,02%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9.**

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2019	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatkan Penanganan Tindak Kekerasan	%	100	100
2.	Evaluasi Capaian KLA	Nilai	700	679

Pada tabel di atas diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat Perubahan IKU pada tahun 2019, yaitu Meningkatkan Penanganan Tindak Kekerasan dan Evaluasi Capaian KLA.

Pada tahun 2019, Capaian Indikator Meningkatkan Penanganan Tindak Kekerasan adalah sebesar 100% dan telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan indikator Evaluasi Capaian Kota Layak Anak (KLA) adalah sebesar 679 poin tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 700 poin. Hal ini disebabkan beberapa poin indikator Kota Layak Anak belum bisa teralisasi di Kota Bontang.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Handphone android sebagai sarana komunikasi dengan klien sekaligus dokumentasi saat penanganan klien	Pengadaan sangat dibutuhkan secepatnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
Kendaraan operasional berupa mobil sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan khususnya penjangkauan dan home visit klien korban kekerasan	Pengadaan sangat dibutuhkan secepatnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
Laptop beserta printer sebagai sarana pendukung terutama pengisian data-data online di tingkat provinsi terkait identitas klien dan penanganan kasus	Pengadaan sangat dibutuhkan secepatnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
Nomor handphone prabayar sebagai hotline layanan pengaduan khusus penanganan klien perempuan	Pengadaan sangat dibutuhkan secepatnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
Support anggaran kegiatan untuk peningkatan program dan peningkatan	Anggaran sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan



SDM di seksi perlindungan perempuan	
Kurangnya tenaga SDM khususnya PNS di seksi perlindungan perempuan	Penambahan tenaga SDM (PNS)
SDM yang berada di seksi perlindungan perempuan belum mendapatkan pelatihan khusus penanganan kasus perlindungan perempuan	Mengikuti sertakan pelatihan bagi petugas yang menangani kasus di seksi tersebut
Belum terbentuknya UPTD PPPA sehingga penanganan kasus masih ditangani oleh Tim Pelayanan PPPA (P2TP2A)	Menyegerakan pembentukan UPTD PPPA
Gedung UPTD PPPA sudah tersedia tetapi tenaga SDM, meubelair, sarana dan prasarana (ATK) belum ada (kosong)	Menyegerakan pengadaan yang dibutuhkan gedung UPTD PPPA tersebut karena merupakan salah satu indikator penilaian APE
Belum adanya arah yang jelas dalam penyusunan program dan kegiatan	Program dan Kegiatan yang terdapat di dalam Renstra disampaikan ke bidang dan seksi untuk penyusunan yang lebih terarah
Dukungan sarana dan prasarana kerja tidak memadai : tidak ada komputer, printer dan scanner sebagai penunjang kerja utama serta kendara roda 2 kasi	Segara diadakan peralatan kantor sesuai kebutuhan
SDM yang kurang dr sisi jumlah dan pemahaman di IT dan laporan data online	Penambahan SDM dan pelatihan data laporan
Jaringan internet Kantor yang up and down, sementara ada 6 aplikasi online yang harus di input setiap bulannya di tanggal yang berbeda	Penambahan Paket Internet agar jaringan saat input laporan online tetap stabil
Terlambatnya data yang diminta untuk di input pada saat laporan online	memberikan penegasan
Belum tersedianya aplikasi khusus untuk memisahkan data korban kekerasan terhadap anak dan anak berhadapan dengan hukum	Dibuatkan Aplikasi berbasis online
Belum tersedianya mobil operasional khusus pedampingan kasus anak	Pengadaan mobil operasional khusus anaak
Belum tersedianya rumah kegiatan untuk seksi perlindungan khusus anak, dan masih bergabung dengan seksi perlindungan perempuan	Dibuatkan Rumah kegiatan tersendiri untuk seksi perlindungan khusus anak agar mandiri
Jumlah forum anak baru hanya terdapat pada dua kelurahan	Walikota memerintahkan lurah dan camat untuk membentuk forum anak kelurahan dan kecamatan



Forum anak belum dilibatkan dalam musrembang tingkat kelurahan maupun musrenbang tingkat kecamatan	Walikota memerintahkan lurah dan camat untuk melibatkan forum anak dalam kegiatan musrembang kelurahan dan kecamatan, sehingga di tahun 2020 beberapa kelurahan sudah melibatkan forum anak untuk ikut musrembang
Belum ada sekolah PAUD yang dinyatakan sebagai sekolah ramah anak	Mensosialisasikan sekolah ramah anak ke PAUD, sekolah SD-SMP serta sekolah berbasis kementerian agama, untuk menciptakan sekolah ramah anak di tingkat PAUD dan kementerian agama, serta penambahan sekolah umum
Belum ada profil anak	Membuat profil gender dan anak tahun 2018 di tahun 2019

d) Prestasi

No	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Tahun 2019	Keterangan
1	Kota Layak Anak	Kategori Kota Madya	
2	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (SIPEENA) Kategori Inovasi Perangkat Daerah	Juara Harapan I	
3	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	UPPKS LKP di Kelurahan Gunung Elai

I. Urusan Pangan

Urusan Wajib Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pangan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan pangan antara lain: meningkatkannya ketersediaan pangan, distribusi, akses, diversifikasi dan keamanan pangan masyarakat serta Meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH).



Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan serta Ketersediaan dan Cadangan Pangan.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Pangan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 4 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pangan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.607.699.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.588.221.591,00 atau 96,79% dan realisasi fisik sebesar 99,75%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pangan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	Target	2019
PPH Ketersediaan	Skor	91,5	88	94,2
Cadangan Pangan Pemerintah	%	0	40	0
Penanganan Rawan Pangan	%	0	60	0
% Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	100	88	100
% Ketersediaan informasi harga pangan pokok	%	100	90	100
% Pangan Aman di konsumsi	%	100	77	92,85
Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor (0-100)	86,8	86	88,5

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 antara lain; Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di tahun 2019 adalah 94,2% mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018, Ketersediaan informasi harga pangan pokok mencapai 100 %.

Indikator yang digunakan pada urusan pangan berupa skor angka pada Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 88,5 meningkat dari tahun sebelumnya, namun Pangan Aman di Konsumsi mengalami penurunan dari 100% menjadi 92,5%, karena pada pengujian sampel pangan sayuran di 3 (tiga) Pasar, terdapat Bakteri Salmonela.

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan	Solusi
1 Realisasi IKU pada Cadangan Pangan Pemerintah 0% karena tidak tersedianya dana untuk pengadaan CPP	Perlu adanya Kajian Perda sebagai payung hukum dalam penyediaan/pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
2 Berdasarkan surat dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian nomor 063/K.N.030/i.2/01/2018 bahwa perlu dilaporkan kondisi stok cadangan pangan pemerintah setiap minggu	Perlu adanya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kota minimal 100 Ton per tahun, hal tersebut berdasarkan pada PP No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3 Realisasi IKU pada Penanganan Rawan Pangan dengan realisasi 0% karena tidak tersedianya dana untuk penyediaan Penanganan Rawan Pangan yang didalamnya termasuk kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Perlu adanya penyediaan bahan untuk pelaksanaan SKPG serta pembuatan Peta Kerawanan Pangan
4 Pangan Aman dikonsumsi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya terdapat bakteri Salmonella dalam Sampel Sayuran	Melakukan kampanye keamanan pangan melalui sosialisasi penyuluhan dan himbauan berupa brosur dan spanduk

J. Urusan Pertanahan

Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pertanahan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yakni: Terwujudnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan, dengan indikator kinerja utama berupa persentase tanah milik Pemkot Bontang yang bersertifikat dan persentase luas kawasan APL yang terinventarisasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Sistem Administrasi Pertanahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota, Identifikasi dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kota Bontang, Monitoring dan Penataan Batas Wilayah Kota Bontang, Pemetaan Masalah Sengketa Tanah, Fasilitasi Pengadaan



Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik serta Pendampingan Program Verifikasi PTSL.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pertanahan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 6 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.2.028.015.424,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.510.005.910,00 atau 74,46% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanahan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
			Target	Realisasi
Persentase Tanah Milik Pemkot Bontang yang bersertifikat	%	-	34,9	30,62
Persentase Luas Kawasan APL Yang Terinventarisasi	%	-	36,5	36,88

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2019 persentase tanah milik Pemkot yang sudah bersertifikat sebesar 30,62%. Sedangkan persentase luas kawasan APL yang terinventarisasi sebesar 36,88% sudah melampaui dari yang ditargetkan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Pemasangan patok batas lokasi APL dan eks TNK Kota Bontang terkendala karena harus melibatkan peran serta dari BPN, BPKH, dan TNK	Perlu penyusunan jadwal khusus untuk pemasangan patok batas yang melibatkan instansi terkait

K. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang.



a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup diarahkan dalam mewujudkan misi pembangunan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*sustainable development*).

Penyelenggaraan urusan Lingkungan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah melalui kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Bimbingan Teknis Persampahan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan, dan Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih, Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium.
3. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam melalui kegiatan Konversi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air serta Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air.



4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam melalui kegiatan serta Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk.
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, dan Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup.
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui kegiatan Penataan RTH dan Pemeliharaan RTH serta Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau di beberapa Lokasi/wilayah khususnya di Kelurahan Satimpo, Belimbing dan Bontang Lestari .
7. Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum.
8. Program Pengelolaan Areal Pemakaman melalui kegiatan Penataan Areal Pemakaman dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan lingkungan hidup pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 8 program pokok dan 3 program penunjang serta 44 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan lingkungan hidup pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.82.068.621.781,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.54.141.615.538,00 atau 65,97% dan realisasi fisik sebesar 99,87%. (konfirmasi) Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12.

Indikator Kinerja Utama Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2018	2019
Indeks Pencemaran Air	-	84,44	80,00
Indeks Pencemaran Udara	-	85,32	87,62
Persentase pelayanan persampahan	Persen	95	95,05
Persentase RTH Kota Bontang	Persen	-	21,5
Persentase TPU yang memenuhi standar	Persen	-	-
Persentase sarana dan prasarana PJU	Persen	-	52,72



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2018	2019
dalam kondisi baik			

Indeks Pencemaran Air (IPA) adalah indeks yang digunakan menentukan tingkat pencemaran relative terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Obyek pengukuran IPA adalah kualitas air sungai. Untuk menghitung IPA maka harus diketahui dulu indeks pencemaran di beberapa lokasi pemantauan . Jumlah titik sampling adalah 9 titik, yaitu S. Bontang 4 titik, S. Guntung 3 titik dan S. Nyerakat 2 titik. Penentuan titik pantau sungai tahun 2019 berdasarkan data dari Bapelitbang bahwa sungai pada Kota Bontang adalah: Sungai Bontang, Sungai Guntung dan Sungai Nyerakat dari hasil perhitungan tidak ada sampel yang masuk kategori sedang dan berat.

Metodologi perhitungan Indeks Kualitas Udara mengadopsi Program European Union melalui European Regional Development. Data diperoleh dari hasil pengukuran parameter gas NO₂ dan SO₂ dengan menggunakan alat Passive Sampler selama 3 periode di 4 lokasi sampling yang berbeda yang mewakili kawasan transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran.

Persentase pelayanan persampahan ,meskipun tidak signifikan tetapi mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa sampah di Kota Bontang sudah dilayani dan ditangani dengan baik.

Pada tahun 2019 ini telah dilakukan pengadaan ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk menambah kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat semakin baik,walaupun hal ini masih dirasa kurang dan masih dibutuhkan lebih banyak lagi ruang terbuka hijau.

Disamping itu telah dilakukan pemasangan lampu penerangan jalan umum sehingga mengurangi rawan kecelakaan bagi pengguna jalan serta terhindar dari rawan kejahatan di jalan.walaupun prosentase masih kurang dari yang diharapkan hanya sebesar 52,72 persen.

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan	Solusi
Kondisi armada pengangkut sampah yang kurang memadai	Melakukan peremajaan atau pengadaan armada pengangkut sampah yang baru
Masyarakat membuang sampah diluar waktu yang telah ditentukan	Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kondisi sungai yang tercemar oleh sampah	Melakukan kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih) secara berkala dan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
Kondisi armada truk hidrolik yang tidak optimal	Melakukan peremajaan atau pengadaan armada truk hidrolik
Kondisi parit dan drainase yang mengalami pendangkalan	Perlu adanya pengerukan di parit drainase yang ada sehingga aliran air dapat lancar kembali
Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan sehingga sering terjadi luapan air (banjir)	Perlu dilakukan normalisasi sungai dan penurapan sehingga aliran sungai dapat lancar
Masih kurangnya ruang publik (RTH)	Perlu adanya penambahan ruang publik dan ruang terbuka hijau sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca
Masih kurangnya lahan pemakaman baik yang muslim maupun non muslim	Perlu adanya penambahan berupa pengadaan lahan pemakaman yang semakin terbatas baik untuk umat muslim dan non muslim.
Kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya yang kurang memadai	LPJU tenaga surya yang biaya pemeliharaannya tinggi dan rawan akan tindak pencurian sehingga perlu dilakukannya migrasi dari tenaga surya ke listrik PLN serta melakukan penggantian lampu yang hemat energi

d) Penghargaan

No.	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Adipura Tahun 2018	Diberikan pada tahun 2019
2.	Adiyawita Mandiri Tingkat Provinsi	1. SDN 006 Bontang Selatan 2. SDN 011 Bontang Selatan



No.	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Keterangan
		3. SDN 002 Bontang Selatan
3.	Adiyawita Mandiri Tingkat Kota	1. MI Jamiyyatul Qurra 2. Madrasah Arriyadh 3. SLB YPK
4.	PROPER Nasional	1. PT.Badak 2. PT. Pupuk Kalimantan Timur
5.	Lomba Inovasi dan Penelitian (SI PEENA) BAPELITBANG	Juara 3 Kategori Inovasi Perangkat Daerah
6	Panji, Teropi dan Piagam Keberhasilan Pembangunan dalam rangka HUT ke 63 Provinsi Kaltim	Terbaik II Katagori Keberhasilan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup
7	Juara Harapan 1 BCC	Properti yang dipakai menggunakan bahan daur ulang

L. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan) serta Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan).

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2019 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 3 program penunjang serta 25 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp.3.374.677.062,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.178.941.684,00 realisasi keuangan 94,20% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2018	2019
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,96	0,97
Rasio Bayi Berakta Kelahiran	Rasio	0,69	0,69
Rasio pasangan berakta nikah	Rasio	0,47	0,47
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99	99
Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	75	63

Pada tahun 2019 seluruh capaian indikator urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami peningkatan. Untuk capaian cakupan penerbitan KTP mengalami peningkatan sebesar 1% dari tahun sebelumnya dan untuk capaian cakupan penerbitan akta kelahiran meningkat sebesar sama seperti dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Bontang.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Pengembangan inovasi dalam rangka Pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelola informasi kependudukan dan	Perlu adanya intervensi dari pimpinan untuk surat keputusan bagi semua bidang Perlunya sosialisasi pemahaman terhadap kerjasama pemandaatan



Permasalahan	Solusi
pemanfaatan data Terbatasnya Perangkat daerah yang memanfaatkan data	data.
2. Terbatasnya Blangko KTP el	Diterbitkannya Surat Keterangan Pengganti Tanpa Identitas (SUKET) sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (2) Huruf M dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 26 Maret 2019
3. Jaringan internet tidak maksimal	Sekretariat mengusulkan dalam anggaran perubahan TA 2019 untuk pemasangan jaringan internet, sehingga tidak mengganggu pelayanan adminduk
4. Belum ada perangkat pendukung untuk penyajian data kependudukan bagi perangkat daerah	Menyiapkan perangkat hardware dan software Menambah Jaringan Internet

d) Penghargaan

Adapun penghargaan yang diraih dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Prestasi/Penghargaan	Keterangan
1	Bidang Penyelenggaraan adminduk katagori kota Se Kaltim dari gubernur Kaltim	Juara III
2	Lomba Inovasi dan Penelitian (SI PEENA) Tingkat Kota Bontang dari Walikota Bontang	Juara I
3	Kegiatan Good Archival Governance Award 9GAGAS) Pengelolaan ArsipTk. OPD se Kota Bontang dari Walikota Bontang	Juara II
4	Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Menpan RB	Katagori B

M. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM).

**a) Program dan Kegiatan**

Peyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditujukan untuk meningkatkan peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, yaitu :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pelatihan PKK (Sekretariat PKK).
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT).
3. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
4. Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 4 program pokok yang terdiri dari 4 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.913.875.450,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.833.846.064,00 atau 91,24% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	Target	2019
LPM aktif (%)	%	100	100	100
PKK Aktif (%)	%	100	100	100
Posyandu Aktif (%)	%	100	100	100
Swadaya Masyarakat terhadap	%	5,15	1,1	1,28



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	Target	2019
Program Pemberdayaan Masyarakat				

Capaian indikator LPM aktif, PKK aktif dan Posyandu aktif tidak mengalami penurunan dari yang berarti bahwa tingginya komitmen dari pengurus LPM, PKK dan Posyandu untuk mempertahankan kinerja. Serta dukungan penuh Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menggandeng masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan. Sedangkan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat melampaui target yang telah ditentukan. Secara persentase pada tahun 2019 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetapi secara angka dapat dikatakan meningkat karena dana yang digelontorkan jauh lebih besar pada tahun 2019 dimana pada tahun 2018 dana swadaya masyarakat sebesar Rp.385.170.000 dan di tahun 2019 dana yang digelontorkan sebesar Rp.479.860.000,00.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Rendahnya pemahaman/peran aktif masyarakat terhadap pembangunan wilayah	Perlunya program/kegiatan pembangunan wilayah yang berbasis padat karya

d) Penghargaan

No.	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Keterangan
1.	Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja	Juara I (Tk.Provinsi)
2.	Penyuluhan Bina Keluarga Balita	Juara I (Tk.Provinsi)
3.	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Juara II (Tk.Provinsi)
4.	Rancang Busana Santai Khas Daerah	Juara II (Tk.Provinsi)
5.	Penyuluhan Tertib Administrasi Keuangan dan Data	Juara II (Tk.Provinsi)
6.	Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Prov. Kalimantan Timur Bidang PKK Tahun 2019	Juara II (Tk.Provinsi)
7.	Usaha Peningkatan Pendapatan	Juara III (Tk.Provinsi)



No.	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Keterangan
	Keluarga (UP2K)	
8.	Penyuluhan Kader PKK Dalam Penanggulangan Masalah Stunting menuju Kaltim Sehat 2020	Juara III (Tk.Provinsi)
9.	Cipta Menu/Festival Pangan Lokal B2SA Kategori Lunchbox	Juara III (Tk.Provinsi)
10.	Merias wajah Untuk Make-up Sehari-hari	Juara IV (Tk.Provinsi)
11.	Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kategori Kelurahan	Juara II (Tk.Provinsi)
12.	Pelaksanaan Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kategori Kota	Pakarti Madya 1 (tk. Nasional)
13.	Pelaksanaan Posyandu Terbaik	Pakarti Madya 1 (tk. Nasional)

N. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diarahkan sebagai tujuan untuk meningkatkan pelayanan pengendalian keluarga berencana dengan sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat secara lengkap, benar dan akurat.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 8 (enam) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana. Peningkatan program keluarga berencana Dilaksanakan melalui kegiatan Promosi Pelayanan Khiba, Penghargaan Kepada Pengelola KB Teladan, Harganas Tingkat Kota, Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS, Pelatihan dan Penguatan Program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak, Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB), dan Sarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana)
2. Program Pelayanan Kontrasepsi, dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Konseling KB, Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB,



- Pelayanan KB Medis Operasi, Workshop Pelayanan KB, Penyediaan Pelayanan KB Mobile, Pelayanan KB di Daerah Pesisir, Pelayanan Manunggal KB KES, Pelayanan Momentum PKK KB KES, dan Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan KB.
3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB, Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana, Pengelolaan Data dan Informasi Program KB, Penyampaian Informasi Program KB & PP, dan Pengembangan Program SIDUGA.
 4. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
 5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KKR dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah, Jambore PIK Remaja/Mahasiswa, Seleksi PIK Remaja/Mahasiswa, Pemilihan Duta Mahasiswa Genre, Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya dan Pelatihan Pengelolaan PIK Remaja
 6. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah.
 7. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dilaksanakan melalui kegiatan Pengumpulan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.
 8. Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU dilaksanakan melalui kegiatan Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU dan Fasilitasi dan Pembinaan Saka Kencana.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui 8 program pokok dan 33 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar



Rp.3.551.854.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.351.704.272,00 atau 94,36% dan realisasi fisik sebesar 95,31%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15.
Indikator Kinerja Utama
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2019	
		Target	Realisasi
Rasio Akseptor KB	Prosentase	70	68,82

Capaian Indikator Kinerja Utama untuk indikator rasio anggota masyarakat yang mengikuti gerakan keluarga berencana dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi (akseptor KB) pada tahun 2019 yaitu 68,82%, realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 70%. Hal ini dikarenakan masih kurangnya petugas lapangan atau Petugas Keluarga Berencana (PKB) yang idealnya di setiap satu kelurahan terdapat satu Petugas Keluarga Berencana (PKB), namun saat ini dalam satu PKB membina 3 s.d 4 kelurahan, kurangnya kegiatan pelayanan mobile Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2019, dan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang berkurang di Kota Bontang oleh faktor menopause dan perpindahan penduduk pasangan usia subur (PUS) yang merupakan target peserta KB baru sehingga mempengaruhi capaian target peserta Keluarga Berencana (KB) di Kota Bontang.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Kurangnya SDM sebanyak dua orang yaitu : Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana. Dan Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	Merekrut tenaga
Tidak ada panjar kegiatan besar terkait honor narasumber dan transport lokal peserta	Memfasilitasi adanya panjar untuk honor narasumber dan transport lokal peserta
Kurangnya SDM Penyuluh KB	Merekrut SDM Penyuluh KB. (PNS/NON PNS)



Belum adanya anggaran ayoman kegagalan dan komplikasi paska pemasangan kontrasepsi	Perlu adanya anggaran ayoman kegagalan dan komplikasi paska pemasangan kontrasepsi
Belum adanya AC dan APAR untuk gudang alokon	Pengadaan AC dan APAR

d) Prestasi

No	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Tahun 2019	Keterangan
1	Bidan Praktek Mandiri Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara Harapan I	a.n Suryani, Amd.Keb di Keluahan Loktuan
2	Lomba Kelompok KB Pria Semangat Berkaya Tingkat Provinsi	Juara I	Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke XXVI
3	Juara Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara I	a.n Eva Dwipanglipur di Kelurahan Api-Api
4	Lomba Vocal Grup Festival KIE Kreatif Kampung KB Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke XXVI
5	Lomba Kemah Saka Kencana Provinsi Kalimantan Timur	Ranking I	Kegiatan Promosi PUP Moment Hari Aids Sedunia Tahun 2019
6	Lomba Penyuluhan Saka Kencana Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	Kegiatan Promosi PUP Moment Hari Aids Sedunia Tahun 2019
7	Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	BKB WIJAYA KUSUMA di Kelurahan Gunung Elai
8	Lomba Motivator KB Pria Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara I	a.n Agus Sainoto di Kelurahan Gunung Telihan
9	Lomba Bina Keluarga Lansia (BKL) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	BKL LESTARI II di Kelurahan Bontang Baru



10	Lomba Bina Keluarga Remaja (BKR) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	BKR MUTIARA LAUT di Kelurahan Loktuan
11	Lomba Kampung Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	KAMPUNG KB PAGUNG LESTARI di Kelurahan Bontang Lestari

O. Urusan Perhubungan

Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya ketertiban dan keselamatan pengguna jalan, meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, dan tersedianya fasilitas sarana prasarana perhubungan yang memadai. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok, sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Se-Kalimantan Timur, Pembangunan Sarana Penunjang Terminal Pelabuhan, DED Pelabuhan/Dermaga Lokal Kota Bontang, Study Evaluasi dan Penataan Parkir, Penyusunan Perda LLAJ, dan Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Kota Bontang.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan, Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross, Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Pemeliharaan Median dan Kerb Jalan, Pemeliharaan Ruang Henti Khusus (RHK), Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), dan Pengadaan Paku Jalan.
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & Dukungan Lomba Wahana



Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas, Pekan Keselamatan Transportasi Darat, Pengamanan dan Pengendalian Embarkasi dan Debarkasi Kapal Penumpang Pelabuhan Umum Loktuan, Monitoring, Analisis dan Evaluasi Angkutan Lebaran, dan Pendataan Pelabuhan Khusus dan Dermaga Khusus Kota Bontang dan DUK's.

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dilaksanakan melalui Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.
5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perhubungan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 5 program pokok dan 5 program penunjang serta 48 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan perhubungan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.10.903.956.077,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.10.060.824.733,00 atau 92,27% dan realisasi fisik 99,99%. Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib dinas perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16.
Indikator Kinerja Utama
Urusan Perhubungan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
			Target	Realisasi
Prosentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	99	99	86
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	%	90	90	96
Prosentase sarana dan prasarana Perhubungan yang layak fungsi	%	90	90	61
Prosentase angkutan kota yang memiliki ijin trayek	%	74	75	18

Indikator kinerja prosentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan mengalami penurunan sebesar 13% dari kondisi tahun 2018 sebesar 99% menjadi 86% di tahun 2019. Capaian 86% ditahun 2019 belum mencapai target



yang tetapkan sebesar 99% dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat pemilik angkutan umum untuk melakukan uji KIR kendaraannya. Dari jumlah angkutan umum sebanyak 57 unit hanya 49 unit yang melakukan uji KIR.

Kepuasan Masyarakat merupakan tujuan utama dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini Dinas Perhubungan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur dan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dari pelayanan yang di berikan kepada masyarakat Kota Bontang. Realisasi indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi tahun 2019 sebesar 96% dan mengalami kenaikan sebesar 6% dibanding tahun 2018 sebesar 90%, dan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan ditahun 2019 sebesar 90%.

Untuk indikator prosentase sarana dan prasarana perhubungan capaian realisasi ditahun 2019 sebesar 61% belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Karena keterbatasan anggaran yang ada, dari total kebutuhan rambu sebanyak 2.133 unit sampai dengan tahun 2019 jumlah rambu yang terpenuhi baru 1.291 unit.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Belum tersedianya sarana dan prasarana perhubungan khususnya pengujian kendaraan bermotor dan fasilitas pendukungnya.	Pembangunan gedung uji serta pembaharuan fasilitas pengujian kendaraan bermotor
Banyaknya APILL dan fasilitas pendukung yang sudah tua (<i>out of date</i>).	Revitalisasi kembali APILL dan fasilitas lainnya sesuai dengan tuntutan zaman (<i>up to date</i>).

P. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat Daerah Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang



Transparan, Akuntabel dan Partisipatif. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program pokok sebagai berikut:

- 1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui kegiatan pengembangan infrastruktur dan pengelolaan sistem keamanan Informasi.
- 2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa melalui kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM), Pengelola Media Center, Kemitraan dengan Media Massa, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Penguatan kapasitas PPID.
- 3) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui kegiatan penyediaan jasa layanan internet, Pengembangan e-Government, pemeliharaan jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan domsain Pemerintah Kota Bontang, uji keamanan informasi (penetration test), pemeliharaan data center, pengembangan versi sistem, Implementasi Gerakan Smart City.
- 4) Program diseminasi informasi dan komunikasi publik melalui kegiatan diseminasi informasi melalui kesenian tradisional dan diseminasi informasi melalui media cetak.
- 5) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 5 program pokok dan 6 program penunjang serta 45 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan komunikasi dan informatika tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp 15.061.450.887,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 14.817.920.986,00 atau 98,38% dan realisasi fisik sebesar 99,87%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Komunikasi dan Informatika 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019
-------------------------	--------	------	------



			Target	Realisasi
Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik	Skor	-	88,4	84,87
Indeks Pemantik	Skor	-	3,40	3,30

Indikator hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik dan Indeks Pemantik merupakan IKU baru pada tahun 2019. Indikator Indeks Pemantik mengalami penurunan dikarenakan Penilaiannya tidak memakai standard pemantik Provinsi Kalimantan Timur tetapi memakai standar Nasional SPBE sehingga mengalami penurunan nilai sebesar 0,01 dari target yang ditetapkan oleh Dinas Kominfo.

Untuk indikator Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik target yang ditentukan adalah sebesar 88.4 sementara nilai ISQ pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang diraih Kota Bontang adalah sebesar 84.87 dimana nilai tersebut tidak mencapai target yang telah dikarenakan belum optimalnya PPID Pembantu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam pengisian update data informasi wajib, informasi berkala dan informasi yang dikecualikan belum sesuai dengan yang diharapkan.

c) Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1.	Belum maksimalnya Informasi-Informas dan Dokumentasi terkait Pembangunan Daerah	Terlaksananya kegiatan Inspiratif Expo sebagai sarana penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
		Terselenggaranya kegiatan Diseminasi Informasi melalui Pertunjukan-pertunjukan Kesenian Tradisional
		Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi publik, dan perlunya membuat System Aplikasi Manajemen dan Monitoring Pemberitaan
		Terpublikasinya informasi pembangunan Kota Bontang
2.	Kurangnya Pembinaan bagi Kelompok Informasi Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Bontang



3.	Belum adanya konsep ideal yang terpadu dalam pengelolaan pembangunan sarana publikasi yakni Media Center	Tersedianya Sarana Media Center Kota Bontang
4.	Kurangnya Sosialisasi Informasi Pembangunan Daerah	Memaksimalkan jumlah peserta yang menghadiri kegiatan-kegiatan Diseminasi Informasi melalui Media Tatap Muka
5.	Masih adanya informasi/ kebijakan pemerintah kepada masyarakat melalui media elektronik yang belum terpublikasi	Terpublikasinya informasi/ kebijakan pemerintah kepada masyarakat melalui media elektronik
6.	Belum adanya hak publik masyarakat untuk mendapatkan informasi secara langsung	Mencetak dan membagikan buku Annual Report
7.	Terbatasnya SDM	Pelaksanaan Diklat untuk Pengelola Jaringan TIK (PNS) yang bersertifikasi
.		Merekrut tenaga taerampil sesuai kebutuhan
8.	Kebijakan (termasuk anggaran) yang tidak mencukupi	Penambahan Anggaran untuk pengembangan Infrastruktur TIK
9.	Belum adanya Peraturan Daerah yang menaungi program Smart City	Membuat naskah akademis rancangan Peraturan Daerah Smart City di tahun 2020
10.	Belum adanya Dashboard Smart City	Membuat Dashboard Smart City
11.	Belum adanya standart pembnuatan dan pengembangan aplikasi/ website	Membuat SOP Pembuatan dan Pengembangan aplikasi / Website
12.	Perancangan sistem yang tidak sfesifik yang mempersulit dalam pembangunan aplikasi	membuat format surat pengajuan/ pengembangan aplikasi
13.	Belum ada format baku dalam struktur pembangunan aplikasi	membuat format struktur pembanguna aplikasi
14.	Ruang kerja yang sempit dengan SDM yang banyak	Pemanfaatan ruang kinerja dan pembagian sistem piket di command Center
15.	Kurangnya sarana dan prasarana kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan

d) Prestasi

No	Prestasi/Penghargaan	Keterangan
1	Penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City	



2	Penghargaan RKCI (Rating Kota Cerdas Indonesia)	
3	Penganugerahan Website Awards Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	
4	Web Awards Badan Publik 2019 Implementasi terbaik Keterbukaan Informasi Publik Via Website	a. Peringkat 1 Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten dan Kota dan SekalTIM b. Peringkat 2 Kategori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten dan Kota dan SekalTIM
5	Website PPID Pembantu Terbaik Tingkat Kecamatan se kalTIM	
6	Website PPID Pembantu Terbaik Tingkat Kelurahan se kalTIM	

Q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bontang dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor serta penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif; dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi IUMK dan pendataan direktori UMKM Kota Bontang;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan manajemen kewirausahaan baru bagi pemuda, fasilitasi sarana prasarana pelaku usaha mikro, dan penyusunan booklet profil usaha UMK;
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dilaksanakan melalui kegiatan penilaian kesehatan koperasi, revitalisasi koperasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi, pelatihan pengawasan dan pengurus



- koperasi dalam penyusunan laporan RAT, dan peningkatan kapasitas bagi SDM KUMKM;
4. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah dilaksanakan melalui kegiatan, fasilitasi pelaku IKM dalam peningkatan SDM, dan fasilitasi pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang;
 5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pengembangan industri rumput laut;
 6. Program Penataan Struktur Industri dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi sertifikat HACCP, dan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah ini terdiri dari 6 program pokok dan 5 program penunjang yang diimplementasikan dalam 33 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.10.254.008.361,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.9.745.582.783,00 atau 95,04% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 96,12%.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
		2018	Target	2019
Persentase koperasi aktif	%	62,39	87,92	98,55
Jumlah usaha mikro/kecil yang produktif	UKM	246	506	671

Indikator kinerja utama presentasi koperasi aktif mengalami peningkatan dari target sebesar 87,92% tahun 2019 dapat tercapai sebesar 98,55%. Demikian halnya dengan Indikator kinerja utama Jumlah usaha mikro/kecil yang produktif semula ditargetkan sebanyak 506 UMK tercapai tahun 2019 sebanyak 671 UMK.

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan		Solusi
1.	Masih terdapat sejumlah koperasi yang tidak melaksanakan RAT	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan program pengawasan dan pembinaan pada koperasi yang tidak melaksanakan RAT• Mengusulkan pembubaran koperasi yang tidak aktif 3 tahun berturut-turut ke Kementerian KUKM RI
2.	Koperasi yang sedang dalam proses pembubaran adalah koperasi simpan pinjam, yang diakibatkan oleh macetnya usaha simpan pinjam	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan program revitalisasi koperasi dengan cara penggabungan koperasi yang tidak aktif tapi punya peluang usaha• Untuk Koperasi baru diarahkan untuk koperasi konsumen atau produsen.

R. Urusan Penanaman Modal

Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Urusan Penanaman Modal dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya iklim penanaman modal yang berdaya saing dan meningkatnya mutu pelayanan dan PAD dari retribusi perizinan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; dilaksanakan melalui kegiatan 'Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Promosi Potensi Daerah Pengembangan Promosi Potensi Daerah, Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal Melalui SPIPISE
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pulik, Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 'Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019 program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Penanaman Modal ini terdiri dari 3 program pokok dan 4 program penunjang yang



diimplementasikan dalam 26 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.5.735.159.465,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.5.659.934.347,00 atau 98,69% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Penanaman Modal Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
		2018	Target	2019
Jumlah Nilai berskala nasional (PMDN) Rp.x(000.000,-)	Rupiah	5.955.705	1.488.926	3.308.155,64
Jumlah Nilai berskala nasional (PMA) \$.x(000,-)	\$	188.092	188.093	454.787,70
Nilai IKM	%	81.40	84	85,92

Pada 2018 beberapa realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Penanaman Modal mengalami penurunan seperti jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA) serta Jumlah nilai berskala nasional (PMDN dan PMA). Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan pusat tentang SPIPISE yang mengharuskan para investor untuk melakukan pelaporan setiap 3 bulan yang memberatkan pelaku investor. Sehingga, dengan adanya peraturan itu jumlah pelaporan semakin menurun.

Untuk indikator PAD dari retribusi perijinan mengalami penurunan sebesar Rp.380.000.00,00. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa peraturan baru seperti Ijin Gangguan (HO) dicabut per bulan Maret, padahal retribusi dari ijin ini merupakan salah satu penyumbang retribusi terbesar. Kemudian, adanya perubahan tariff ijin trayek yang semula Rp.750.000,00 per tahun menjadi Rp.250.000,00 per 5 tahun.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 81,40% berkategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Penanaman



Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami peningkatan dan selalu mengedepankan pelayanan yang prima.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi	
1.	Penanam modal /investor yang telah memiliki nomor iduk berusaha (INB) melalui Sistem Online Submission (OSS) belum semua melaporkan realisasiInvestasi	1.1	Monitoring dan koordinasi dengan pihak penanam modal /investor Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan laporan Kegiatan Penanammn Modal (LKPM) kepada perusahaan
2.	Pada Tahun 2019, Investasi di Kota Bontang mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dikarenakan adanya permasalahan lahan yang belum tersediaoleh Pemkot Bontang	2.1	Melakukan pendampingan/fasilitasi baik yang baru ataupun yang masih mengalami kesulitan/kendala di lapangan
3.	Terbatasnya sarana prasarana untuk mengakses system online melalui SPIPISE bagi pelaku usaha/pengusaha	3.1	Diberikan Alokasi Tambahan Anggaran APBD untuk menunjang kegiatan tersebut
4.	Masih banyak pengusaha di Kota Bontang yang belum mengetahui/memahami LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) secara online	4.1	Memberikan form LKPM kepada Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku
5	Kurangnya tenaga teknis	5.1	Penambahan tenaga teknis untuk monitoring realisasi investasi, analisis kebijakan penanaman modal, analisis pengembanaan potensi Daerah
6	LKPM yang disampaikan, tidak diberikan secara lengkap dan sesuai periode oleh pihak Investor	6.1	Memberikan form LKPM kepada Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku
7	Terjadinya pindah alamat kantor investor atau perubahan pihak pengelolah LKPM,alamat e-mail dan nomor telepon tanpa ada Pemberitahuan	7.1	Melakukan monitoring secara berkala
8	Adanya keterlabatan dalam pelaporan LKPMonline yang disampaikan oleh pihak Investor kepada BKPM (Badan	8.1	Memberikan surat konfirmasi berupa peringatan kepada pihak investor yang belum melaporkan LKPM-nya



Permasalahan		Solusi	
	Koordinasi Penanaman Modal) Pusat		
1	Terkendalanya penerbitan perizinan terkait bangunan atau esisting dengan aturan yang ada	1.1	Perlu adanya kebijakan dan aturan terkait bangunan-bangunan yang telah lama terbangun sebelum terbit aturan yang ada saat ini
2	Tim Teknis PTSP belum berkantor di PTSP	1.2	Penyusunan SK tim Teknis, dan pengadaan sarana dan prasarana untuk tim teknis

S. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan, Meningkatnya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan, Meningkatnya Sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan publik yang terdapat pada sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan khususnya milik daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan Kepramukaan di Kota Bontang
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dilaksanakan melalui kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra serta Seleksi Paskibraka Kota Bontang.
3. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, dilaksanakan melalui kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat, Peringatan Hari Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POP PROV) Kalimantan



Timur serta Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14.

4. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Taman Prestasi, Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Bessai Berinta, Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR Taman Lestari, Pemeliharaan Rutin/Berkala Sport Center, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta, Pembangunan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Berbas Pantai serta Revitalisasi Stadion Bessai Berinta.

b) Realisasi Pelaksanaan dan Program dan Kegiatan

Urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 4 program pokok dan 5 program penunjang serta 36 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.25.143.323.475,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.24.388.536.848,00 atau 97,00% dan realisasi fisik sebesar 99,67%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20.
Indikator Kinerja Utama
Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	
			Target	Realisasi
Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi	Jumlah pemuda berprestasi	3,33	22	155
Meningkatnya jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet berprestasi	2,62	40	1440

Sebagai mana Tabel diatas terjadi perbedaan indikator dengan tahun sebelumnya diakibatkan perubahan regulasi yakni Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Indikator Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi dari target jumlah pemuda berprestasi sebanyak 22 orang terealisasi sebesar 155 orang.



Adapun Indikator Meningkatnya jumlah atlet berprestasi target 2019 sebanyak 40 atlet terealisasi sangat signifikan sebanyak 1.440 orang atlet dan pegiat olah raga, hal ini disebabkan adanya kegiatan pekan olah raga provinsi Kalimantan Timur dimana Kota Bontang menjadi salah satu tuan rumah yang ditunjuk.

Penyebab dari keberhasilan ini dikarenakan oleh Kompetisi dan kejuaraan olahraga tingkat klub khususnya sepakbola yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk ikut ambil bagian dengan membentuk klub sepakbola dan juga Sarana Olahraga berupa kompleks stadion beserta berjenis-jenis cukup representatif dengan arena olahraga sepakbola, volley, basket, jogging track, panjat tebing dan roller coaster yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan klub olahraga secara gratis dan bertanggung jawab.

c) Permasalahan dan Solusi

	Permasalahan	Solusi
1	Berkurangnya minat siswa untuk mengikuti kegiatan kepramukaan serta kurangnya kegiatan kepramukaan di sekolah-sekolah	Ditambahkan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dan kegiatan kepemudaan baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat

T. Urusan Statistik

Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Statistik diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok Pengembangan Data/Informasi dan Statistik.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan statistik terdiri dari 1 program pokok yang diimplementasikan dalam 4 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.590.859.000,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.581.274.880,00 atau 98,38% dari



alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

U. Urusan Kebudayaan

Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya, Renovasi/Rehabilitasi Bangunan Warisan Budaya.
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dilaksanakan melalui kegiatan Festival Seni Budaya dan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan ini terdiri dari 2 program pokok yang diimplementasikan dalam 4 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.3.808.479.040,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.3.335.223.869,00 atau 87,57% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 98,30%. Peningkatan capaian anggaran 2019 dibandingkan 2018 disebabkan oleh peningkatan yang signifikan dari penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Bontang.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kebudayaan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2018	2019
			Target



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	19	2	24
Jumlah Grup Kesenian	Group	51	2	3

Benda-benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya suatu daerah sehingga wajib dilestarikan dengan baik, melalui inventarisasi, dokumentasi dan pemeliharaan yang konsisten dan baik. Dengan adanya peninggalan sejarah ini, maka peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian cagar budaya yang ada di kota Bontang.

Dalam upaya untuk melestarikan dan mengembangkan nilai budaya yang ada, Pemerintah melalui urusan Kebudayaan melaksanakan berbagai macam kegiatan kesenian baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Adapun ditahun 2019 dilaksanakan sebanyak 24 kegiatan seni dan budaya. Ritual budaya yang merupakan kegiatan tahunan Kota Bontang terus diupayakan untuk dilaksanakan antara lain Bontang City Carnival, Erau Pelas Benua Kutai Guntung dan Pesta Laut Bontang Kuala. Harapan dengan adanya kegiatan seni dan budaya ini selain pelestarian budaya juga dapat menjadi magnet untuk menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Bontang. Dengan demikian peningkatan dan pengembangan sarana prasarana pendukung seni dan budaya yang ada di Kota Bontang harus terus ditingkatkan dan dilestarikan.

Keberadaan grup kesenian daerah terus dibina dan dikembangkan, sehingga bisa tetap eksis dan dapat menjadi wahana yang melahirkan ide-ide kreatif dibidang seni dan budaya. Adapun sampai dengan tahun 2019 ini, di Kota Bontang terdapat 54 grup/kelompok kesenian yang sudah di data dan dibina dengan baik.

c) Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
-----	--------------	--------



1	Masih ada Kelompok seni di Kota Bontang yang belum terdata/ terdaftar.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang melakukan pendataan terhadap kelompok-kelompok seni dan sebagai bentuk legalitasnya Pemerintah akan membuatkan surat keterangan terdaftar seni yang ada di kota Bontang.
2	Kekayaan budaya belum terkelola dengan baik yang ditandai dengan kondisi bangunan masih ada yang terbengkalai.	Melakukan Identifikasi, dokumentasi dan inventarisasi benda cagar budaya agar proses perawatan dan pemeliharaan bisa dianggarkan dan dilakukan dengan baik.
3	Sumber daya di bidang kebudayaan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas masih terbatas.	Peningkatan komitmen semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan seni budaya daerah.

V. Urusan Perpustakaan

Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan perpustakaan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan jumlah perpustakaan umum daerah agar memudahkan akses membaca bagi masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dilaksanakan melalui kegiatan Pemasarakatan minat dan kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, Pengembangan Minta dan Budaya Baca, Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan, Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah, Publikasi dan Sosialisasi Minta dan Budaya Baca, Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengadaan Buku – Buku Perpustakaan, Penyediaan Sarana dan



Prasarana Perpustakaan serta Pemeliharaan Berkala/Rutin Pojok Baca dan Taman Baca.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perpustakaan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 5 program penunjang serta 34 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Perpustakaan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.4.070.302.141,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.969.202.593,00 atau 97,52% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
			Target	Realisasi
1 Presentase jumlah pemustaka perpustakaan umum daerah	Persentase	'-	35	35.30
2 Nilai survey kepuasan masyarakat pada pelayanan perpustakaan umum daerah	Nilai	-	81	91.17
3 Presentase perpustakaan binaan yang telah memenuhi standar perpustakaan umum daerah	Persentase	-	15	17

Indikator Kinerja Utama tahun 2019 merupakan Indikator Kinerja Utama baru hasil dari perubahan Rencana Strategis tahun 2019. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2019 antara lain; indikator Presentase jumlah pemustaka perpustakaan umum daerah di tahun 2019 adalah 35,30, capaian melebihi target yang di tetapkan, Nilai survey kepuasan masyarakat pada pelayanan perpustakaan umum daerah di tahun 2019 adalah 91.17 capaian melebihi target yang di tetapkan, Presentase perpustakaan binaan yang telah memenuhi standar perpustakaan umum daerah di tahun 2019 adalah 17, capaian melebihi target yang di tetapkan.

**c) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan	Solusi
<p>Adanya diskorelasi antara program prioritas pembangunan yang ada dalam RPJMD Kota Bontang dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang (Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan tidak diakomodir oleh Renstra DPK pada Tahun 2019, sehingga DPK tidak bisa merealisasikan target indikator program tersebut, yaitu "Publikasi Pemasyarakatan Minat Baca" dan "Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Pameran Buku KPAD").</p>	<p>Pada Tahun 2019, untuk urusan perpustakaan, DPK tidak melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan, hanya melaksanakan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Karena ada kemiripan indikator antara kedua program tersebut, maka indikator "Publikasi Pemasyarakatan Minat Baca" kami masukkan di "Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca", dengan indikatornya yaitu terpenuhinya informasi tentang perpustakaan; publikasi dalam bentuk media cetak, media online, leaflet dan standing banner. Dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99,65% dan fisik sebesar 100%. Begitu juga untuk indikator "Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Pameran Buku KPAD" kami masukkan di kegiatan "Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah", dengan indikatornya yaitu terlayannya pemustaka di daerah pesisir, sekolah dan tempat pelayanan publik lainnya. Dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99,99% dan fisik sebesar 100%. Untuk pameran buku tidak bisa terlaksana karena efisiensi anggaran.</p>

W. Urusan Kearsipan

Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang.



a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan Kearsipan yaitu meningkatkan penyediaan sarana dan layanan arsip serta peningkatan pemahaman terkait tata cara penyusunan kearsipan agar memudahkan akses informasi dalam pencarian dokumen penting yang di butuhkan.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok sebagai berikut:

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengumpulan Data.
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip, Pengadaan dan penataan Dokumen/Arsip Daerah serta Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika.
3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah serta Monitoring, Evakuasi dan pelaporan Kondisi Situasi Data.
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip, Sosialisasi/Penyusunan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintahan/Swasta serta Bimbingan Penyuluhan Kearsipan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Kearsipan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 4 program pokok serta 9 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Perpustakaan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.185.033.900,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.183.614.200,00 atau 99,23% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Kearsipan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
			Target	Realisasi
1 Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan tata kelola arsip dengan baik	Persentase	-	22	38,71
2 persentase perangkat daerah yang menyerahkan arsip statis	Persentase	-	3	3,26

Indikator Kinerja Utama urusan kearsipan tahun 2019 merupakan Indikator Kinerja Utama baru hasil dari perubahan Rencana Strategis tahun 2019. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2019 antara lain; indikator Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan tata kelola arsip dengan baik di tahun 2019 adalah 38,71 capaian melebihi target yang di ditetapkan, persentase perangkat daerah yang menyerahkan arsip statis di tahun 2019 adalah 3.26 capaian melebihi target yang di ditetapkan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi
1	Melakukan perbaikan terhadap perencanaan kinerja agar target kinerja jangka menengah ditetapkan dengan baik dan dimonitoring secara berkala.	Telah dilakukan perubahan Renstra tahun 2019
2	Dalam menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebaiknya menyajikan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perpustakaan dan kearsipan	
3	Melakukan perbaikan terhadap evaluasi internal perangkat daerah agar rencana aksi atas kinerja dilakukan evaluasi secara periodik, sehingga hasil evaluasi dapat ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memberikan alternatif	



Permasalahan		Solusi
	perbaikan yang dapat dilaksanakan dan menunjukkan perbaikan setiap periode.	
4	Sasaran "Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan dan Sistem Administrasi Kearsipan Yang Berkualitas" dengan indikator presentase jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku terhadap jumlah SKPD kurang tepat indikatornya, menurut kami hal tersebut lebih tepat indikator kinerja "Jumlah Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan begitu juga dengan sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah lebih tepat dengan indikator "Persentase Jumlah SKPD Yang Menerapkan Arsip Secara Baku Terhadap Jumlah SKPD."	Telah dilakukan perubahan Renstra tahun 2019

d) Prestasi

No	Nama Kejuaran/Kegiatan/Penghargaan	Tahun 2019	Keterangan
1.	Panji panji Keberhasilan Perpustakaan	Juara 1	Tingkat Provinsi Kaltim
2.	Lomba Inovasi dan Penelitian	Juara 5	Kota Bontang

3.1.3 Urusan Pilihan

X. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dengan Meningkatkan Produksi Perikanan, Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, sebagai berikut:



1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, engoperasian Balai Benih Ikan Pantai, Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya, Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya ;
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap, Pengoperasian PPI/TPI, Pendataan Statistik Perikanan Tangkap, Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan), Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Kelautan dan perikanan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 2 program pokok dan 5 program penunjang yang dilaksanakan melalui 26 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Perikanan dan Kelautan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.10.007.395.054,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.711.407.611,00 atau 97,04% dan realisasi fisik sebesar 99,87%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Perikanan dan Kelautan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.23.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
		2018	Target	2019
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	22.323	21.821,54	28.063,66

Indikator jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 899 ton.

Y. Urusan Pariwisata

Pelaksanaan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

**a) Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Urusan Pariwisata dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (Tiga) program pokok, sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata, peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan.
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata serta Pengembangan Objek Pariwisata (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata).
- 3) Program pengembangan Kemitraan, dilaksanakannya pemilihan Duta Wisata tahun 2019 serta penyelenggaraan Rakornis Pariwisata.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Urusan Pariwisata ini terdiri dari 3 program pokok yang diimplementasikan dalam 8 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.8.956.167.500,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.8.547.944.780,00 atau 95,44% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah. Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang Urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.24.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pariwisata Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2019		
		2018	Target	Realisasi
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Kunjungan pariwisata	7.005	408.100	472.205
Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata	Lokasi	1	1	4



Meningkatnya Jumlah Kelompok Sadar Wisata Yang Di Bina	Kelompok	8	12	12
--	----------	---	----	----

Untuk realisasi Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2019, Khususnya pada Indikator Kinerja Utama, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dari Target 408.100 jumlah kunjungan wisata, ternyata terrealisasi sampai dengan 31 Desember 2019 bertambah menjadi 472.205 orang wisatawan nusantara sedangkan wisatawan mancanegara berjumlah sebanyak 168 orang.

Sedangkan untuk Jumlah Destinasi Pariwisata kelompok sadar wisata sampai dengan 31 Desember 2019 sesuai target yaitu 12 (Dua sebelas) Kelompok. Namun Restribusi pariwisata belum bisa dipungut walaupun Destinasi dan Kunjungan meningkat dikarenakan belum ada Perwali serta belum ada peraturan yang mendasari dan masih dalam tahap proses pembahasan dengan Bagian Hukum, Bapenda dan Dewan Perwakilan Rakyat.

c) Permasalahan dan Solusi

	Permasalahan	Solusi
1	Restribusi pariwisata belum bisa dipungut walaupun destinasi dan kunjungannya meningkat, karena belum ada perwali dan peraturan yang mendasari, masih dalam proses pembahasan dengan Bagian Hukum, Bapenda dan DRPD	Percepatan Proses pembahasan Perwali

d) Prestasi

Pada tahun 2019, terkait dengan pelaksanaan urusan Pariwisata, Kota Bontang mendapatkan apresiasi dan penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional, sebagai berikut:

No	Nama Kejuaran/Kegiatan/Penghargaan	Keterangan
1.	Putri Pariwisata Intelegensia Kaltim 2109	Juara Atribut
2.	Wakil II Duta Wisata 2019	Juara II Provinsi
3.	Sajian Es Rumput laut Terbanyak 2019	Rekor Muri
4.	Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Nasional	Juara III Poco-Poco Nasional



	2019	
5.	Jambore Pemuda Daerah 2019	Juara I Stan Terbaik Pemuda
6.	Pokdarwis "Destinasi Berkembang" Bontang Kuala Abadi 2019	Juara II Nasional Destinasi

Z. Urusan Pertanian

Pelaksanaan urusan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha pertanian dengan melakukan upaya intensifikasi pertanian, termasuk di dalamnya usaha peternakan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan keluarga petani.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pertanian ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan pertanian dengan meningkatnya produksi pertanian dan peternakan.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program pokok sebagaimana berikut ini :

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis, Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Balai Penyuluhan;
- 2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna;
- 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan, Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan, Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan (DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian), Pengendalian, Perencanaan dan Pengawasan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak melalui kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;



- 5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, melalui kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan, dan Pendistribusian Ternak kepada masyarakat;
- 6) Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan, Peningkatan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan, Operasional Rumah Potong Hewan, Pembangunan/Renovasi dan Fasilitas Peralatan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian), Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan;
- 7) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna (Bantuan Keuangan Provinsi).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan pertanian pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 7 program pokok dan 17 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pertanian pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.3.293.555.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.035.032.061,00 atau sekitar 92,15% dari pagu anggaran, realisasi fisik sebesar 99,41%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan pilihan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanian Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	Target	2019
Intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Ton	205,41	289	200*
Intensifikasi budidaya peternakan, Produksi peternakan	Ekor	1.213	1.055	1.332*

*data sementara

Indikator Intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5 ton, faktor penting penyebab penurunan indikator tersebut yaitu faktor cuaca dimana curah hujan yang tinggi



menyebabkan banjir di beberapa titik yang mengakibatkan gagal panen. Adapun rincian indikator intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura untuk padi yaitu 200 ton, selain padi ada pun produksi lain yaitu jagung (52 ton), kacang tanah (13 ton), Ubi kayu (328 ton) dan ubi jalar (42 ton).

Intensifikasi budidaya peternakan. Produksi peternakan, keberhasilan kinerja tersebut di dukung dengan adanya Program dan Kegiatan yang mendukung serta anggaran yang sesuai, sehingga produksi peternakan melebihi dari target yaitu realisasi untuk sapi 1.331, selain sapi adapun produksi peternakan lain yaitu kuda 6 ekor, kerbau 15 ekor dan sapi perah 13 ekor.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Serangan Hama dan Penyakit Tanaman.	Pengadaan Pestisida dan perangkap hama
2 Bencana (Kekeringan dan banjir)	Perbaikan irigasi dan drainase

AA. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perdagangan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan perdagangan antara lain: meningkatkannya Sarana Perdagangan, sistem distribusi perdagangan, sistem distribusi perdagangan ekspor dan meningkatnya perdagangan dan industri.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok sebagaimana berikut ini :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan melalui kegiatan fasilitasi tertib ukur, ukur ulang dan tera ulang;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor melalui kegiatan fasilitasi pengembangan SDM bidang perdagangan dan pameran dagang komoditi ekspor;



3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri melalui kegiatan peningkatan kapasitas petugas lapangan pasar tradisional, pameran dagang dalam negeri tingkat nasional, provinsi dan lokal, fasilitasi kegiatan pasar murah, dan peningkatan sarana prasarana pasar;
4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan melalui kegiatan pembinaan PKL dan peningkatan fasilitasi dan pembinaan pedagang kaki lima (bantuan keuangan provinsi);
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui kegiatan pengadaan alat penunjang kebersihan pasar, pembangunan pasar loktuan, pembangunan sarana dan prasarana pasar loktuan, dan pembangunan pasar rawa indah.

b) Realiasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perdagangan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 5 program pokok dan 13 kegiatan, dengan alokasi dana untuk tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.79.575.396.205,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.79.319.323.164,00 atau 99,68% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Secara rinci capaian indikator kinerja urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.26.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perdagangan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
		2018	Target	2019
Kontribusi sector industri terhadap PDRB Non Migas	%	66,5	82,14	68,29
Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Non Migas	%	5,7	7,75	5,9
Nilai Ekspor	Milyar \$	3.995	5.402	2.257

Untuk indikator kinerja utama Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Non Migas, dapat memperlihatkan bahwa Sektor industry non migas masih belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah, terbukti dengan target 7,75% tahun 2019 hanya bisa tercapai 5,9%.

Indikator kinerja utama nilai ekspor juga masih belum tercapai bahkan memperlihatkan penurunan yang signifikan dimana target 5.402 milyar \$ hanya mampu

tercapai 2.257 milyar \$ pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh Penurunan nilai ekspor dapat dilihat dari jumlah permintaan penerbitan SKA dari perusahaan menurun karena beberapa faktor antara lain: Permintaan SKA terbesar yaitu PT. Badak pada tahun 2019 ini turun karena semakin tahun kontrak pembelian gas cair dari Jepang dan Korea banyak yang sudah berakhir, disamping itu sekarang ini yang mengatur penjualan gas harus melalui Pertamina sehingga Pemerintah Kota tidak bisa melakukan intervensi. Sementara itu harapan Pemerintah terhadap Pelaku Usaha Kecil yang ada di Kota Bontang belum ada yang melakukan ekspor.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Semakin menurunnya nilai ekspor yang dilihat dari jumlah permintaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) penyebab utamanya adalah akan berakhirnya kontrak ekspor PT.Badak dan regulasi yang mengatur penjualan gas harus melalui PT.Pertamina	1.1. Penurunan nilai ekspor ini tidak mengindikasikan penurunan kinerja karena hanya memfasilitasi penerbitan SKA
	1.2. Naik turunnya nilai ekspor ini tergantung pada perusahaan ekspor yang ada di Kota Bontang.

3.1.4 Urusan Fungsi Penunjang

BB. Perencanaan

Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis: terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas; terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu.

a) Program dan Kegiatan

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) program pokok sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penetapan RKPD, Review RPJMD, Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi,



- Koordinasi Multi Stake Holder CSR Perusahaan, Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan, dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim.
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang, dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi.
 3. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur, dan Pemutakhiran Data Kemiskinan Kota Bontang.
 4. Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Koordinasi TEPPA Kota Bontang.
 5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah melalui kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial dan Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah.
 6. Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam melalui kegiatan Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum, Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Fungsi Perencanaan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 6 program pokok dan 5 program penunjang serta 85 kegiatan. Alokasi dana untuk Fungsi Perencanaan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.5.590.875.119 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.155.836.708 atau 92,22% dan realisasi fisik sebesar 99,90%.

Realisasi indikator kinerja utama Fungsi Perencanaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.27.**

Realisasi Indikator Kinerja Utama Fungsi Perencanaan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
			Target	Realisasi
Presentase keterisian data dan pembangunan dalam SIPD	Persen	93,72	96	94,75
Presentase akurasi data SIPD	Persen	100	100	100
Presentase penjabaran program RPJMD kedalam program RKPDP	Persen	75,47	90	100
Presentase Penjabaran Kegiatan RKPDP ke dalam APBD	Persen	100	90	98,49
Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang diakomodasi dalam RKPDP	Persen	-	25	25
Tingkat Partisipasi Komponen Masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan Pembangunan	Persen	100	100	100
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan daerah/sasaran RPJMD	Persen	-	90	90
Persentase Perangkat daerah Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja \geq 76%)	Persen	100	100	100

CC. Keuangan

Dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai sasaran strategis Terlaksananya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Meningkatnya kepatuhan pajak.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melalui 7 (tujuh) kegiatan antara lain Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Jasa



Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan, Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA), Asosiasi Daerah Penghasil Migas Pemeliharaan SISMIOP PBB, Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan serta Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui 30 (tiga puluh) kegiatan antara lain Penyusunan Standar Satuan Harga, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD.
3. Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui 11 (sebelas) kegiatan antara lain melalui kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Penghapusan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RKPBMMD).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Fungsi Keuangan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 program pokok dan 9 program penunjang serta 91 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Fungsi Keuangan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.34.552.915.361,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.31.655.525.121,00 atau 91,61% dan realisasi fisik sebesar 96,87%.

Realisasi indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Keuangan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2018	2019
			Target



Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	*WTP
Prosentase Pengadaan Aset sesuai dengan Kebutuhan	Prosentase	100	100	100
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp x (000)	199.483.395	106.175.000	218.743.530
Persentase Kepatuhan Pajak	Prosentase	27	50	55

Indikator kinerja pada sasaran 1 adalah Opini BPK terhadap laporan keuangan satuan WTP dengan Target adalah WTP, Realisasi di tahun 2019 adalah *WTP (masih menunggu audit dari BPK) begitu juga capaian di tahun 2018 yang juga WTP. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan ini konsisten mempertahankan Opini BPK dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian yang berarti Pemerintah Kota Bontang dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Indikator Prosentase Pengadaan Aset sesuai dengan Kebutuhan menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2018 dan 2019 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan BPKAD selaku Perangkat Daerah konsisten dalam memenuhi kebutuhan asset seluruh Perangkat Daerah di Kota Bontang.

Indikator jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.218.743.530.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.19.260.135.000 dari tahun 2018. Peningkatan PAD ini disebabkan karena Bapenda selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan ini menggali potensi yang ada di Kota Bontang. Selain itu, Kota Bontang juga membuat peraturan atau regulasi terkait Retribusi dan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan PAD.

Indikator Persentase Kepatuhan Pajak juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dimana pada tahun 2019 persentase kepatuhan pajak menjadi sebesar 55% meningkat sebesar 28% dari tahun 2018. Hal ini menjadi hal yang baik untuk Kota Bontang karena masyarakat Kota Bontang semakin sadar dan



paham akan pentingnya membayar pajak. Bapenda melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat sehingga menjadikan masyarakat sadar pajak.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Untuk mempertahankan opini WTP, diperlukan langkah nyata dalam menentukan langkah strategis dan kegiatan nyata lintas sektor.	Melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
2 Kurangnya Sumber daya Manusia yang memahami secara utuh konsep dan teknis tentang pendapatan daerah, anggaran, belanja, perbendaharaan, akuntansi, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD serta pengelolaan kekayaan/asset milik daerah	Mengikutsertakan pegawai pada Diklat terkait hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi
3 Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait penertiban kekayaan/ asset milik daerah	Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penertiban kekayaan/ asset milik daerah
4 Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak	Memberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pajak bagi daerah serta melakukan jemput bola ke masyarakat atau wajib pajak.

d) Prestasi

No.	Prestasi/Penghargaan	Prestasi Tahun 2019	Keterangan
1	Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan 2018	Opini WTP dari BPK yang ke-5	
2	Good Archival Governance Awards	Harapan I	
3	Kegiatan Gebyar Pajak Daerah	Pengundian Doorprize Wajib Pajak	1 Tahun sekali



DD. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah.

a) Program dan Kegiatan

Fungsi Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah. Diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Tersedianya system perencanaan ASN yang tersistem dengan baik serta Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah, Diklat PraTugas, Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, Diklat Jabatan Fungsional, Diklat Akuntansi Berbasis Akrua, Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah
2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur melalui kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya, Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS, Asistensi dan Penyusunan Formasi Pegawai, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural, Pengusulan NIP dan Penyerahan SK CPNS, Dokumentasi Informasi Kepegawaian, Proses Administrasi Mutasi Pegawai, Pengusulan Kartu Status Pegawai, Pelaksanaan Assesment Pegawai, Rapat Koordinasi Kepegawaian, Pengusulan Pemberhentian PNS, Analisa Kebijakan Pengembangan Pola Karier PNS, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan E-Absensi Online, Pengembangan dan Pemeliharaan Database Informasi Tata Naskah Digital Kepegawaian Online, Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai, Peremajaan/Pemeliharaan



Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian), Seleksi Penerimaan Calon ASN dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur melalui kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Fungsi Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 program pokok dan 3 program penunjang serta 39 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Fungsi Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.11.461.301.901,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.759.523.871,00 atau 85,51% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
		2018	Target	2019
Meningkatnya profesionalitas ASN	Persen	-	70,00	39,48%

Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan dilakukannya review RENSTRA pada tahun 2019, sehingga data Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM pada tahun 2018 berbeda dengan data IKU BKPSDM pada tahun 2019 ini. Dari Target IKU (Indeks Profesional ASN) sebesar 70% pada tahun 2019, yang terealisasi hanya 39,48%.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan program nasional yang diharapkan bisa menambah informasi mengenai tingkat pencapaian profesionalitas ASN. Selanjutnya referensi ini digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan perencanaan pengembangan profesionalitas ASN. adapun pedoman tata cara dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam hal realisasi yang



belum mencapai target dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya:

1. Dalam hal penghitungan dimensi kompetensi terkendala pada data mengenai PNS yang mengikuti diklat masih minim. Data diklat yang diselenggarakan melalui BKPSDM sudah otomatis terupdate pada SAPK. Namun data diklat teknis/seminar/workshop yang dilakukan melalui masing-masing Perangkat Daerah tidak dilaporkan pada BKPSDM.
2. Dalam hal penghitungan dimensi kinerja terkendala pada nilai SKP yang tidak disampaikan ke BKPSDM. Dari 2.816 PNS per Tahun 2019, data SKP yang masuk sebanyak 597 PNS, walaupun sudah disampaikan surat edaran

Meskipun begitu, dari hasil penghitungan melalui aplikasi ip-jasn.bkn.go.id Kota Bontang masuk dalam peringkat ketiga se Kalimantan Timur setelah Kab. Kukar dan Kab. Paser. Upaya dalam mendapatkan data telah dilakukan, dengan bersurat dan menghubungi Perangkat daerah yang belum memenuhi permintaan data. Indeks Profesionalitas ASN merupakan hal yang baru begitupun rumusan penghitungannya akan menyesuaikan dengan Instansi Pusat setiap kali pusat ada perubahan. BKPSDM akan terus berupaya untuk mendapatkan data yang valid sehingga diharapkan kedepannya data tersebut dapat menggambarkan kondisi real terkait dengan profesionalitas ASN Kota Bontang sehingga dapat digunakan referensi dalam hal perbaikan dan perencanaan pengembangan ASN Kota Bontang dan ASN secara nasional pada umumnya.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Tidak tersedianya lembaga Diklat yang menyelenggarakan diklat Pranata Humas Keterampilan tahun 2019, adapun nama peserta Diklat yaitu Chitra Retnorizky, A.Md, Dewi Fajriani, A.Md, Indah Wahyuni, Fahrizal Muhammad Noor, dan Maulina Noor	Diusulkan kembali di Tahun 2020

**d) Penghargaan**

No.	Nama Penghargaan	Tahun	Keterangan
1	Instansi yang menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara pada seleksi CPNS 2018	2019	
2	Organisasi Perangkat Daerah dengan pegawai yang menyampaikan SPT Tahunan PPh melalui e-filing tercepat se kota Bontang Tahun 2019	2019	

EE. Penelitian dan Pengembangan

Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan yang diarahkan untuk meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; dan optimalisasi penelitian dan pengembangan.

a) Program dan Kegiatan

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (Satu) program pokok yaitu Program Pengembangan Data/Informasi melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Koordinasi Penelitian dan Pengembangan, Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Fungsi Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 5 kegiatan. Alokasi dana untuk Fungsi Penelitian dan Pengembangan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp. 601.305.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.553.680.071 atau 92,08% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama Fungsi Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Fungsi Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2018	2019
			Target



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
			Target	Realisasi
Tingkat Aplikasi Dokumen Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persen	66,03	67	67,38

c) Permasalahan dan Solusi

	Permasalahan	Solusi
1	Beberapa dokumen kelitbangan belum diaplikasikan karena terdapat perubahan kebijakan	
2	Keterbatasan Anggaran	Rekomendasi kajian yang penerapannya bertahap menyesuaikan kondisi anggaran

d) Prestasi

No	Nama Penghargaan	Keterangan
1	Innovative Government Award (IGA)	Kategori Kota Terinovatif

FF. Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang, Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang, Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka responsif, Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang serta Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:



1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan dan Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK).
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan melalui kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
3. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang.
4. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP) melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Fungsi pengawasan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 4 program pokok dan 3 program penunjang serta 18 kegiatan. Alokasi dana untuk Fungsi pengawasan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.4.137.774.951,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.892.439.861,00 atau 94,07% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
			Target	Realisasi
Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks	3 (skor B)	3 (skor B)	3 (skor B)
Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	%	82,5	85	91,08
Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	%	40,13	80	45
Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks	3 (skor B)	3 (skor B)	3 (skor B)
Indeks opini BPK atas LKPD	Indeks	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)
Indeks RB Kota Bontang	Indeks	B	B	B
Persentase kasus pengaduan	%	100	100	100



masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti				
Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	Level	3,717	3	3,07*
Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	Level	3	3	3

*angka sementara

Pada indikator Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan Inspektorat selaku pelaksana Fungsi Pengawasan telah membentuk Tim Tindaklanjuti yang secara proaktif mendatangi Perangkat Daerah dan melakukan pendampingan secara berkala agar Perangkat Daerah dapat menyelesaikan rekomendasi temuan dari BPK.

Untuk capaian indikator Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti tidak mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan belum optimalnya Fungsi Pengawasan dalam menindaklanjuti temuan APIP karena kurangnya SDM dalam melakukan pengawalan dan belum adanya kesadaran dari Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil temuan APIP.

Capaian indikator Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang mengalami penurunan secara nilai dari tahun sebelumnya tetapi masih konsisten berada pada level 3, dikarenakan adanya perbedaan metode penilaian baru dari BPKP dimana pada tahun sebelumnya hanya pemenuhan data sedangkan pada tahun 2019 BPKP menetapkan penilaian SPIP lebih merinci ke implementasi SPIP.

Untuk Indeks opini BPK atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah selama 5 tahun terakhir konsisten mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), hal ini menunjukkan bahwa Kota Bontang dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan telah wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Peraturan dari Pusat sangat dinamis, namun anggaran peningkatan kapasitas kurang	Berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk peningkatan kapasitas SDM : BPKP, KPP Pratama, KPKNL, APH
SDM Pengawasan JFT terbatas	Mengoptimalkan seluruh SDM yang ada Melakukan alih jabatan / Inpasing SDM Internal



	Merekrut SDM eksternal kedalam JFT
Pengelolaan sistem pengawasan intern penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang belum sepenuhnya berbasis manajemen risiko	Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kota Bontang berbasis risiko
	Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) kegiatan
	Menyusun <i>teamate</i> berdasarkan <i>gap competency</i> dan jenis penugasan audit intern
	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas audit intern secara berkala
	Membuat aplikasi SIM Pengawasan terintegrasi

d) Prestasi

No	Nama Kejuaraan/ Kegiatan/ Penghargaan	Tahun 2019
1	Maturitas SPIP	3,07*
2	TL BPK Meningkat	91,08
3	Prosentase MCP	86%
4	Kapabilitas APIP	Level 3

GG. Pendukung Tugas Kepala Daerah

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas kepala daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah, Meningkatnya Harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah, Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan Perekonomian Daerah, Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas/Kinerja DPRD.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Kerjasama Pembangunan melalui kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah



2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui kegiatan Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dan Stakeholder serta Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
3. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah melalui kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kota
4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan antara lain Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah serta Pelayanan dan Bantuan Hukum.
5. Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan.
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) melalui kegiatan Perayaan HUT KORPRI dan Pembinaan Tim Fardu Kifayah Bagi Anggota Korpri dan Keluarga.
7. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan melalui kegiatan antara lain Pelaksanaan Safari Ramadhan, Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Kota serta Peningkatan dan Pengembangan Tilawatil Quran.
8. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan melalui kegiatan antara lain Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang serta Penyusunan Profil dan Monografi kecamatan.
9. Program Koordinasi Perumusan Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi melalui kegiatan Peningkatan Jaring Kerjasama Antar Lembaga, Penyusunan Dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah Kota Bontang, Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok (Pengendalian Inflasi Daerah) serta Pembinaan Dan Pengawasan BUMD Kota Bontang.
10. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Amil Zakat, Verifikasi Pemberian Hibah dan



Bantuan Sosial, Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahasiswa Bontang, Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa serta Pembinaan Tim Pelaksana UKS.

11. Program Penguatan Wawasan Pembangunan melalui kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang, Perayaan HUT Provinsi Kaltim dan HUT Otonomi Daerah serta Perayaan HUT RI.
12. Program Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang, Fasilitasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang serta Pelaksanaan e-Procurement.
13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat melalui kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama serta Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas kepala daerah pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 13 program pokok dan 12 program penunjang yang dilaksanakan dalam 140 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan Fungsi pendukung pelaksanaan Urusan Pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.147.009.256.953,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.135.405.285.419,00 atau 92,11% dan realisasi fisik sebesar 99,11%.

Realisasi indikator kinerja utama Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:



Tabel 3.32.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Fungsi Pendukung Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2018	2019	
			Target	Realisasi
1	2	3	4	5
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	Nilai	B (65,81)	B (68,25)	B (67,66)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kota Bontang	Nilai	B (65,12)	B (66,00)	BB (70,11)
Nilai LPPD	Skor	ST (3,27)	ST (3,17)	ST (3,47)
Persentase Target Tersusunnya Produk Hukum Daerah yang Harmonis	Persen	260	100	100
Persentase Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Adaptif sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	100
Persentase Paket yang ditender terhadap jumlah paket yang masuk ke UKPBJ	persen	-	82	93,85
Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja sekretariat DPRD	Persen	-	75	76,64
Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	Persen	-	100	100
Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran	Persen	-	100	100

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2018 dan 2019 belum mengalami peningkatan nilai. Sedangkan untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kota Bontang mengalami peningkatan nilai menjadi BB di tahun 2019.

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa nilai LPPD Tahun 2018 dan 2019 adalah ST (Sangat Tinggi). LPPD merupakan mekanisme evaluasi yang dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja. Ini menunjukkan peran seluruh Perangkat Daerah yang konsisten dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang baik. Demi memaksimalkan penyusunan



LPPD solusi yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah, melaksanakan workshop penyusunan LPPD, serta melaksanakan Orientasi Lapangan Penyusunan LPPD.

Indikator Persentase Target Tersusunnya Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan indikator Persentase Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Adaptif sesuai dengan peraturan perundang-undangan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang berupaya untuk menunjang perekonomian masyarakat Kota Bontang dengan memberikan payung hukum yang sesuai dengan kebutuhan.

Indikator Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja sekretariat DPRD, Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah serta Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran merupakan Indikator Kinerja Utama yang disusun oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2019, dikarenakan adanya penyusunan Dokumen perencanaan yang baru dan dilakukan penyesuaian indikator.

Indikator Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah dan indikator Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD telah memenuhi target yang telah ditentukan. Capaian indikator tersebut bernilai 100% yang menunjukkan bahwa peran anggota DPRD sudah maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai fungsi legislatif.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah
Kuantitas Sumber Daya Manusia tidak memadai dibandingkan dengan jumlah pekerjaan	Mengajukan permintaan pegawai PNS ke BKPSDM	Sekretariat DPRD
Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Aplikasi JDIH yang belum selesai progresnya	Aplikasi JDIH perlu dipihak ke 3 kan	Sekretariat Daerah
Belanja Hibah	Proposal Harus dilengkapi Sesuai Hibah Barang dan Administrasi Terkait Serah Terima Hibah Kepihak	Sekretariat Daerah



Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah
	Penerima Hibah Harus Dilengkapi	
Pelaksanaan Nikah Masal, Peserta tidak ada	Pelaksanaan di awal tahun dengan memfasilitasi proses isbad nikah	Sekretariat Daerah
TTD beasiswa memerlukan waktu yang lama	Sppd untuk masuk di kegiatan	Sekretariat Daerah
Kegiatan MUSCAM tidak terlaksana	Peningkatan koordinasi MUI dengan pemerintah	Sekretariat Daerah

d) Prestasi

No.	Prestasi/Penghargaan	Prestasi		Keterangan
		2018	2019	
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai B	Nilai BB	11 September 2019
2	Penghargaan prestasinya atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	9 Januari 2020
3	Panji keberhasilan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	Juara 1	Juara 1	9 Januari 2020
4	Panji keberhasilan pembangunan bidang pelayanan administrasi Kecamatan (PATEN)	Juara 3	Juara 3	9 Januari 2020
5	Lomba Kearsipan Tingkat Kota Bontang	Juara 1	Juara Harapan 2	12 Oktober 2019

HH. KEWILAYAHAN

Dilaksanakan oleh Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat serta Kecamatan Bontang Selatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, Meningkatnya partisipasi masyarakat,



Meningkatnya kualitas pelayanan public dan Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan melalui kegiatan antara lain Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan, Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan serta Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan.
2. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan antara lain Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan.
3. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
4. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh tiga Kecamatan melalui kegiatan antara lain Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Api-Api, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Baru, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Kuala serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Guntung.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 12 program pokok dan 18 program penunjang serta 751 kegiatan yang tersebar pada 3 (tiga) Kecamatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan Fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan pada tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar Rp.87.871.385.831,00



dengan realisasi keuangan sebesar Rp.85.289.092.620,00 atau 97,06% dan realisasi fisik sebesar 99,96%.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Ruang Pelayanan yang kurang representatif	Perbaiki Ruang Loker
Gudang penyimpanan arsip tidak ada	Pembangunan Gudang
Sarana dan Prasarana yang kurang memadai	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang baru
Kurangnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek atau diklat bagi aparatur
Admin Kelurahan kurang memahami Aplikasi Prodeskel untuk penyusunan profil	Pembinaan dan pelatihan oleh bagian terkait
Belum ada aplikasi pengelolaan surat pertanahan di tingkat kecamatan	Pengadaan aplikasi pertanahan
Tidak ada biaya operasional pengukuran tanah di lapangan	Review Peraturan terkait pungutan biaya operasional Kelurahan dan Kecamatan mengenai Surat Pertanahan. (Kota dan Kabupaten yang lainnya masih memberlakukan pemungutan)
Tidak tersedia kendaraan, perlengkapan dan seragam kegiatan patroli	Pengadaan kendaraan, perlengkapan dan seragam patroli
Tidak adanya biaya operasional bagi lembaga kemasyarakatan seperti Forkohat Kecamatan dan Kelurahan	Mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional Forkohat Kecamatan dan Kelurahan
Tidak adanya Gudang Penyimpanan Barang	Segera dibangun Gudang Penyimpanan Barang

d) Prestasi

Terkait dengan pelaksanaan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pada tahun 2019 berbagai penghargaan telah diraih Kota Bontang, antara lain sebagai berikut:

No.	Prestasi/Penghargaan	Keterangan
1	Juara kedua Lomba PHBS Tingkat Nasional	diwakili Kel Berbas Tengah
2	Juara Pertama Lomba PHBS Tingkat Propinsi Kalimantan Timur	diwakili Kel Berbas Tengah
3	Juara ketiga Lomba Posyandu Tingkat Propinsi Kal-Tim	Diwakili Posyandu Pasir Putih IX Bontang Lestari
4	Juara I Lurah Berprestasi Tk. Provinsi	Lurah Belimbing



No.	Prestasi/Penghargaan	Keterangan
5	Juara I Perpustakaan Tk. Provinsi	diwakili Kel. Belimbing
6	Juara I Lomba Kelurahan Tk. Provinsi	diwakili Kel. Belimbing
7	Juara 3 UP2K Tingkat Provinsi	Kec.Bontang Barat
8	Juara Pertama Lomba Administrasi PKK tingkat Kota Bontang	PKK Kecamatan Bontang Selatan
9	Juara Kedua Lomba LBSI kategori Balita tingkat Kota Bontang	Kelurahan Tanjung Laut
10	Juara Kedua Lomba LBSI kategori Bayi tingkat Kota Bontang	Kelurahan Berbas Tengah
11	Juara Harapan I Lomba Mobil Hias kegiatan Bontang City Carnival	Kecamatan Bontang Selatan
12	Juara I Lomba Balita Sehat Tk. Kota	Kec. Bontang Barat
13	Juara I Paduan Suara Tk. Kota	Kec. Bontang Barat
14	Juara I Lomba Pidato Ketua PKK Tk. Kota	Kec. Bontang Barat
15	Juara I Lomba PKDRT Tingkat Kota	Diwakili Kelurahan Belimbing
16	Juara I Lomba UKS Tingkat Kota	SD Alam Baiturrahman

3.2 Kebijakan Strategis

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Strategi dan kebijakan Pemerintah Kota Bontang menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kota Bontang yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bontang 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum dan teknis administrasi pelaporan serta pembinaan pengelolaan keuangan di masing-masing



2. Meningkatkan pengelolaan aset melalui peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dengan instansi terkait dan monitoring evaluasi pada setiap OPD
3. Pembagian seragam (sepatu, Baju, Tas dan buku) kepada seluruh siswa yang ada di kota Bontang sebanyak 38.500 Orang
4. Menaikkan insentif guru swasta menjadi Rp. 1 juta per orang kepada 1.771 orang Guru Swasta dan penggiat agama menjadi Rp. 1 juta per orang
5. Mendukung kebijakan Universal Health Coverage, seluruh masyarakat bontang memiliki jaminan kesehatan serta akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
6. Membangun rumah sakit Umum Tipe D, dalam rangka memperluas akses kesehatan rujukan tingkat pertama.
7. Pembangunan pasar Loktuan dan pasar Rawah Indah, dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM dan mempermudah bagi konsumen mendapatkan kebutuhan.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2018

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan tahun berjalan harus disusun berdasarkan evaluasi capaian tahun sebelumnya.

Memperhatikan hasil rekomendasi DPRD Kota Bontang terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2018, berikut dijabarkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan pembangunan tahun 2019.

Tabel 3.33.

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Anggaran 2018

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
1.	Dalam menyusun program pembangunan agar memperhatikan skala prioritas serta kemampuan	Pemerintah melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, Visi dan Misi pembangunan tahun 2016-	Bapelitbang



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
	daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Bontang.	2021 dan menentukan program prioritas untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut pada tahun berikutnya.	
2.	Sumber penerimaan anggaran pendapatan daerah Kota Bontang sangat bergantung pada Dana Perimbangan sector Dana Bagi Hasil (BDH) Migas dan Batubara, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengembangkan usaha lainnya melalui terobosan terhadap peningkatan potensi PAD.	Sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan akan di tindaklanjuti setiap tahunnya berupa : <ol style="list-style-type: none">1. Pemutahiran data WP dan Obyek Pajak2. Simpada berbasis web (e-STPTPD, e-biling dan e-PBB)3. Pengadaan alat pencatatan dan transaksi WP secara online4. Pemberian reward dan piagam bagi WP taat pajak	Bapenda
3.	Dalam rangka mewujudkan asas pemerataan terhadap kualitas pendidikan, maka diharapkan tidak ada lagi kebijakan terkait moratorium pembatasan penyaluran bantuan untuk sekolah swasta yang bersumber dari alokasi APBD Kota Bontang. Bilamana telah terpenuhi sarana dan prasarana bagi sekolah negeri, maka diharapkan kebijakan terhadap penyaluran bantuan bagi sekolah swasta dapat diberlakukan	Dalam penyusunan APBD tahun 2020 Pemerintah Kota Bontang secara selektif telah mengupayakan pengalokasian anggaran untuk membantu sekolah swasta. Kebijakan ini akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pembangunan sekolah Negeri.	Dinas Pendidikan



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
	kembali pada tahun 2020.		
4.	Pemerintah Kota Bontang agar mengawasi dan memberikan sanksi secara tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perlindungan Pekerja Alih Daya.	Pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 tentang perlindungan hak pekerja alih daya. Serta telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang tata cara penyerahan jaminan pelaksanaan hak pekerja alih daya dan akan segera disosialisasikan	Disnaker
5.	Pemerintah Kota Bontang agar mewajibkan seluruh perusahaan yang akan beroperasi di wilayah Kota Bontang agar menyediakan uang jaminan sebagai antisipasi terhadap keberadaan tenaga kerja saat berakhirnya masa kontrak atau jaminan uang pesangon.	Pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 tentang perlindungan hak pekerja alih daya. Serta telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang tata cara penyerahan jaminan pelaksanaan hak pekerja alih daya dan akan segera disosialisasikan	Disnaker
6.	Mencermati kondisi di lapangan bahwa masih ditemukan adanya beberapa perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bontang tentang	Pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retkrutmen Dan Penempatan Tenaga Kerja. Namun Peraturan Walikota masih dalam tahap	Disnaker



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
	Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja yang telah ditetapkan bahwa rekrutmen/kuota tenaga kerja local adalah 75% sedangkan tenaga kerja dari luar Kota Bontang adalah 25% sehingga Perangkat Daerah terkait agar melakukan pengawasan terhadap rekrutmen tenaga kerja tersebut oleh perusahaan.	penyusunan dibagian Hukum sekretariat Daerah. Serta dalam proses sosialisasi, sehubungan dengan adanya perusahaan yang baru beroperasi di Kota Bontang dan masih belum mengetahui peraturan daerah tersebut.	
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang agar segera melakukan validasi pendataan asset/barang milik daerah.	Telah merupakan tugas rutin pemerintah setiap tahun melakukan validasi dan pendataan assets/barang milik Daerah	BPKAD
8.	Pemerintah Kota Bontang diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Tenaga Kesehatan, khususnya di RSUD Taman Husada Bontang dan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan.	Pemerintah telah mengevaluasi dan melakukan analisa beban kerja khususnya tenaga medis di RSUD serta melakukan penambahan tenaga kerja yang dimaksud namun tetap mempertimbangkan kemampuan daerah dan peraturan yang berlaku	Dinkes dan RSUD
9.	Diharapkan proses pendataan warga yang akan direlokasi dari bantaran sungai (eks.kebakaran) ke rumah panggung RT.05 Kelurahan	Pemerintah telah melakukan relokasi terhadap warga di bantaran sungai (eks kebakaran), untuk ditempatkan di rumah susun Kelurahan	Perkim



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
	Guntung agar dapat segera diselesaikan.	Guntung	
10.	Pemerintah Daerah agar menyerap Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat secara maksimal dan melakukan kerjasama antar daerah, serta meningkatkan kualitas rencana strategis pada Perangkat Daerah dan mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negeri (ASN) serta meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.	Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi penyerapan alokasi anggaran pembangunan sumber DAK secara berkala untuk memastikan permasalahan pelaksanaan program kegiatan DAK dapat diatasi dan tidak mengganggu realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan ketentuan penyerapan Dana Alokasi Khusus.	Bapelitbang
11.	Diharapkan adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kota Bontang dalam penyelesaian tapal batas antara Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur yang saat ini sedang dalam tahapan mediasi/fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal ini terjadi perselisihan penegasan	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait perlakuan khusus atas penyelesaian tapal batas maka, Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan Subbagian Administrasi Kewilayahan telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut: 1. Melakukan verifikasi batas wilayah dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan maupun Kota meliputi kegiatan survey lapangan dan koordinasi dengan pihak terkait. Verifikasi batas wilayah tersebut telah menghasilkan peta tapal batas RT, Kelurahan, Kecamatan, dan Kota. Pada bulan Maret 2020 akan dilakukan pencetakan	Bagian Pemerintahan



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
	<p>batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar daerah Provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian batas daerah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Gubernur, serta pada ayat (3) disebutkan bahwa penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Menteri.</p>	<p>peta.</p> <p>2. Proses tapal batas antara Pemerintah Kota Bontang dan Kutai Timur terkait dengan Sidrap dalam tahap mediasi/proses fasilitasi oleh Tingkat Propinsi Kalimantan Timur yang akan langsung dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur yang pernah dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2019 dan 4 Februari 2020 akan tetapi ditunda karena Gubernur bertugas di luar kota, sehingga saat ini masih menunggu kembali undangan dari Propinsi.</p>	
12.	<p>Pemerintah Kota Bontang wajib segera membentuk Badan Unit Pelabuhan (BUP) dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan sector maritim yang mendominasi wilayah Kota Bontang. Hal ini mengingat bahwa 70,3% dari luas wilayah Kota</p>	<p>Badan Unit Pelabuhan (BUP) sangat penting sekali bagi pemerintah Kota Bontang apalagi wilayah kota Bontang memiliki wilayah 70,3% adalah wilayah laut terutama dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan telah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan</p>	Perikanan



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
	Bontang di dominasi oleh wilayah pesisir dan laut.		
13.	Perlu adanya peningkatan pelayanan umum yang disertai dengan peningkatan pembangunan untuk warga masyarakat pesisir Kota Bontang harus mampu untuk menerapkan manajemen pelayanan publik yang berdasarkan pada asas kepentingan umum, kesamaan hak, ketepatan waktu serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.	Pemerintah telah melakukan pembangunan untuk warga masyarakat pesisir Kota dengan meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar hingga kebutuhan lainnya hingga tidak ada bedanya dengan pelayanan kebutuhan di kota, yakni pembangunan akses jalan, penyediaan air bersih, listrik dan bahkan penyediaan akses pendidikan serta penyediaan internet	PU dan Perkim
14.	Diharapkan agar penerimaan dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K) di Kota Bontang dapat memprioritaskan Tenaga Non PNS sesuai masa kerja dan kualifikasi pendidikan. DPRD Kota Bontang menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kota Bontang yang beberapa waktu ke depan tidak akan membuka penerimaan CPNS dan mengutamakan	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan PPPK di Kota Bontang masih menunggu juklak dan juknis dari pusat2. Pada Tahun 2019, pemerintah Kota Bontang menunda penerimaan CPNS. Tahun ini Pemkot Bontang tetap mengusulkan kebutuhan pegawai baik CPNS dan PPPK ke Menpan, selanjutnya menunggu formasi dari Menpan	BKPSDM



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
	penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).		



BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat



dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Bontang memperoleh alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebesar Rp 30.746.750.589,-. Dana tersebut terbagi dalam 8 (delapan) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) PD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Ketiga PD penyelenggara kegiatan Tugas Pembantuan tersebut adalah :

1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, menerima alokasi dana sebesar Rp 30.252.925.589,- untuk melaksanakan Program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, dengan alokasi dana APBN untuk tugas pembantuan sebesar RP. 281.600.000,- tersebar dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu pengawalan



penyaluran pupuk bersubsidi, pilot percontohon Ditjen PSP Mendukung aspek lahan dan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 212.225.000,- dalam 2(dua) kegiatan yakni Bantuan Langsung dari BKKBN dan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Secara terinci, penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan dari Kementerian / Lembaga pada masing-masing Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

4.1. KEMENTERIAN SOSIAL

Terdapat beberapa tugas perbantuan dari Kemertrian Sosial Repoblik Indonesia untuk wilayah Kota Bontang dengan spesipikasi sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan dana yang bersumber dari Kementerian Sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Fakir Miskin, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2019 adalah:

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Kaltim dan Kementerian Sosial Republik Indonesia

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung

Pada tahun 2019 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang menerima bantuan dana dekonsentrasi melalui Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial Republik Indonesia

3. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung Bidang Sosial yang diterima Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2019, diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang berdasarkan instansi pemberi tugas pembantuan/bantuan langsung sebagai berikut :

1. Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin
 - A. Seksi Penanganan Fakir Miskin.



- a. Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) Rp 6.923.400.000,-
- b. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Rp 1.200.000.000,-
- B. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Kepahlawanan
 - a. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Rp. 60.000.000,-
- 2. Bidang Rehabilitasi Sosial :
 - A. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lansia
 - a. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Rp. 48.000.000,-
 - b. Bantuan Kursi Roda dan Alat Bantu Jalan Lansia Rp. 23.000.000,-
 - c. Home Care Lansia Rp. 58.800.000,-
 - B. Seksi Rehabilitasi Disabilitas
 - a. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) Rp. 39.600.000,-
 - b. Pengembangan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Netra Rp. 400.000.000,-
- 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 - A. Seksi Jaminan Sosial
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 10.320.800.000,-
 - b. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Rp 11.057.310.000,-
 - B. Seksi Perlindungan dan Penanganan Korban Bencana
 - a. Logistik Bencana Rp 122.015.589,-

4.2. KEMENTERIAN PERTANIAN

Ada beberapa Tugas Perbantuan dari Kementerian Pertanian yang diperoeh pemerintah Kota Bontang pada tahun 2019 diantaranya :

I. Pengawalan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

- a. Dasar Hukum : DIPA Nomor : 018.08.169121.3993.002/2019
- b. Instansi Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang
- d. Program : Pengawalan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- e. Kegiatan : Pengawalan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- f. Anggaran: : Rp 34.600.000,-



g. Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Pelaksanaan Kegiatan sesuai DIPA No. 018.08.169121.3993.002/2019 adalah Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ke Kelompok Tani agar penyalurannya tepat sasaran. Memfasilitasi kelompok tani dalam upaya mendukung program pemerintah untuk membantu para petani mendapatkan pupuk bersubsidi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai DIPA No. 018.08.169121.3993.002/2019 secara fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 34.394.200,- atau sebesar 100%.

II. Pilot Percontohan Ditjen PSP Mendukung Aspek Lahan

- a. Dasar Hukum : DIPA Nomor. 018.08.169121.1795.007/2019
- b. Instansi Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan :
- d. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang
- e. Program : Fasilitas Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
- f. Kegiatan : Pilot Percontohan Ditjen PSP Mendukung Aspek Lahan
- g. Anggaran : Rp 50.000.000,-
- h. Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Obor Pangan Lestari yang selanjutnya disebut OPAL adalah upaya promosi penganeekaragaman pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan, sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi. Untuk mendukung percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, Kementerian Pertanian akan melaksanakan Obor Pangan Lestari (OPAL) Sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

Tujuan jangka pendek:



1. Pemanfaatan lahan perkantoran untuk penyediaan pangan dan gizi
2. Sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi.

Tujuan jangka panjang:

Sebagai upaya promosi penganekaragaman konsumsi pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat

Sasaran:

Terlaksananya OPAL di seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan. Secara keseluruhan, pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Ditjen PSP Mendukung Aspek Lahan sesuai DIPA No . 018.08.169121.1795.007/2019 secara fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.880.930,- atau sebesar 100%.

III. Kegiatan bidang Pangan

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Prgram Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah:

1. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 58/KPTS/RC.110/J/12/2018 tentang Petunjuk teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019.
2. Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung

Pada tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan menerima bantuan dana dekonsentarsi melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

C. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung



Pelaksanaan tugas pembantuan dan bantuan langsung yang diterima Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2019, diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang berdasarkan instansi pemberi tugas pembantuan sebagai berikut :

a. Bantuan Langsung dari Badan Ketahanan Pangan , Kementerian Pertanian Tahun 2019

Pelaksanaan program yang langsung dilaksanakan oleh kementerian terkait di Kota Bontang pada tahun 2019 disalurkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur. Adapun OPD yang melakukan verifikasi kepada kelompok sasaran adalah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

- Monitoring Lumbung Pangan Kota Bontang Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Pangan RP 68.700.000
- Pendampingan Pemberdayaan Pekarangan Pangan Kota Bontang Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Kemaan Pangan RP 100.800.000
- Dukungan Manajemen dan Administrasi Kota Bontang Kegiatan Management dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan daerah RP 27.500.000

c. Penerima manfaat

a) Monitoring Lumbung Pangan Kota Bontang Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas

No	Penerima Manfaat	Alamat
1	Lumbung Pangan Sabar Menanti	Kelurahan Bontang Lestari

b) Pendampingan Pemberdayaan Pekarangan Pangan Kota Bontang Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Kemaan Pangan

No	Penerima Manfaat	Alamat
1	KRPL Matahari 1	Kelurahan Bontang Kuala
2	KRPL Zodya 2	Kelurahan Gunung Elai



3	KRPL Hijau Kreatif	Kelurahan Gunung Elai
4	KRPL Cendrawasih	Kelurahan Belimbing

- c) Dukungan Manajemen dan Administrasi Kota Bontang Kegiatan Management dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan daerah

No	Penerima Manfaat	Alamat
1	Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang	Kelurahan Bontang Selatan

4.3. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PUSAT

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah:

- a. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan penduduk dan Pembangunan Keluarga
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung

Pada tahun 2019 Dinas pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang menerima bantuan dana dekonsentarsi melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) Pusat.

3. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung

Pelaksanaan tugas pembantuan dan bantuan langsung yang diterima Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2019, diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang berdasarkan instansi pemberi tugas pembantuan sebagai berikut :



- a. Bantuan Langsung dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2019
Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang langsung dilaksanakan oleh BKKBN di Kota Bontang pada tahun 2019 disalurkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Adapun OPD yang melaksanakan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
- b. Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana,
- Seksi Institusi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - (1) Sosialisasi Pembangunan Bersama Mitra Kerja di Kota Bontang di SMA YPK , Rp 150.000.000,- Lokasi di SMA YPK
 - (2) Dukungan Kegiatan PIK R di kampung KB Mekarsari Kota Bontang, Rp. 5.550.000,-
 - (3) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kampung KB Pagung, Bontang Lestari. Rp. 5.550.000,-
 - (4) Bantuan Oprasional bagi Kelompok BKR dan PIK R di 8 Kelompok di Kota Bontang. Rp. 12.000.000,-
 - (5) Bantuan Oprasional bagi 4 Kelompok UPPKS di Kota Bontang, Rp. 6.000.000,-
 - Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 4 kegiatan yaitu :
 - (1) Pemantapan Promosi dan Konseling Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi di DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan) Kab/Kota Rp 3.650.000
 - (2) Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi anggota Poktan Tribina Rp 8.125.000
 - (3) Pelayanan KB Bergerak(Mobile) di Kabupaten/Kota bersama Mitra Terkait Rp 11.000.000
 - (4) Fasilitasi Pelayanan KB Kegiatan Momentum Provinsi dan Kab/Kota Rp 10.350.000

4. Penerima manfaat :

- a. Pembangunan Bersama Mitra Sosialisasi Kerja di Kota Bontang

No	Penerima Manfaat	Alamat
1	Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Duta GenRe Kota Bontang	SMA YPK



b. Dukungan Kegiatan PIK R di kampung KB Mekarsari Kota Bontang

No	Penerima Manfaat	Alamat
1	Pusat Informasi dan Konseling Remaja di kampung KB Mekarsari	Balai Penyuluh KB Kecamatan Selatan

c. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kampung KB Pagung.

No	Penerima Manfaat	Alamat
1	Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kampung KB Pagung.	Kampung KB Pagung Bontang Lestari

d. Bantuan Oprasional bagi Kelompok BKR dan PIK R di 8 Kelompok di Kota Bontang.

No	Penerima Manfaat	Alamat
1	BKR Anggrek	Kelurahan Tanjung Laut Indah
2	PIK R Madani	SMP 4 Kelurahan Telihan
3	PIK R Cakrawala	SMP 2 Kelurahan Tjg Laut Indah
4	PIK R Tumbuh Bersama	Kelurahan Telihan
5	PIK R Gemini	SMP 9, Kelurahan Guntung
6	PIK R YPK Counseling Centre	SMA YPK Kel. Belimbing
7	PIK R HTS	SMA 2 Kel. Satimpo
8	PIK R Cell Action	SMA 3, Kel Belimbing

e. Bantuan Oprasional bagi 4 Kelompok UPPKS di Kota Bontang.

No	Penerima Manfaat	Alamat
1	Kelompok UPPKS Sungai Buluh	Kelurahan Api-api
2	Kelompok UPPKS Aulia	Kelurahan Tanjung Laut



		Indah
3	Kelompok UPPKS Tiga Putri Mandiri	Kelurahan Bontang Kuala
4	Kelompok UPPKS Willis Sejahtera	Kelurahan Gunung Telihan

- f. Pemantapan Promosi dan Konseling Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi di DTPK(Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan) Kab/Kota

No	Penerima Manfaat	Alamat
1	Kampung KB Pagung Lestari	Kelurahan Bontang Lestari

- g. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi anggota Poktan Tribina

No	Penerima Manfaat	Alamat
1	BKB Kecamatan Bontang Utara	Kelurahan Gunung Elai
2	BKB Kecamatan Bontang Barat	Kelurahan Kanaan
3	BKB Kecamatan Bontang Selatan	Kelurahan Tanjung Laut Indah
4	BKR Kecamatan Bontang Utara	Kelurahan Loktuan
5	BKR Kecamatan Bontang Barat	Kelurahan Gunung Telihan
6	BKR Kecamatan Bontang Selatan	Kelurahan Berbas Tengah
7	BKL Kecamatan Bontang Utara	Kelurahan Bontang Baru
8	BKL Kecamatan Bontang Barat	Kelurahan Telihan

- h. Pelayanan KB Bergerak (Mobile) di Kabupaten/Kota Bersama Mitra Terkait

No	Penerima Manfaat	Alamat
1	Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Bontang Selatan I	Kecamatan Bontang Selatan
2	Masyarakat di wilayah Kerja Poliklinik LNG Badak	Kecamatan Bontang Barat



i. Fasilitasi Pelayanan KB Kegiatan Momentum Provinsi dan Kab/Kota

No	Penerima Manfaat	Alamat
1	Masyarakat di wilayah Kodim 0908 Kota Bontang	Kecamatan Bontang Utara

5. Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung dari Kementerian/Lembaga pada Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan dapat direalisasikan dengan baik dengan realisasi fisik 100% dan keuangan rata-rata mencapai 100%. Data realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program terkait dapat mencapai target yang ditetapkan dengan lebih efisien dalam penggunaan anggaran.

Pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2019 dibiayai dengan dana Bantuan Pemerintah melalui dana dekonsentrasi di provinsi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB untuk membentuk Keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan Bayi melalui pengaturan kelahiran dengan memperhatikan 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Banyak dan Terlalu Dekat) .

Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dalam mengupayakan pemanfaatan program KKBPK dalam keluarga agar dapat berjalan secara terus menerus. Serta belum adanya Roll Model percontohan Centre Of Excellence (CoE) terhadap kelompok Tribina (Bina BKR, BKL dan BKB) dimana harapannya bagi kelompok Tribina paling tidak ada memiliki 1 percontohan CoE yang ada di Kota Bontang, sebagai layanan pusat unggulan dari kelompok tribina lainnya.

Permasalahan berikutnya adalah terhadap program Ketahanan Remaja, hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI tahun 2017) menunjukkan bahwa kelompok sebaya dan orang tua (terutama ibu) menjadi tempat paling nyaman bagi remaja untuk berdiskusi tentang kesehatan reproduksi yang dialaminya yaitu 62% remaja perempuan dan 51% remaja



laki-laki berdiskusi tentang kespro dengan teman sebayanya, dan 53% remaja perempuan serta 11% remaja laki-laki berdiskusi kespro dengan ibunya, jika para remaja saat berada di lingkungan sekolah hal ini masih belum terfasilitasi ruang khusus konseling, dimana Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) jika sudah terbentuk di sekolah SMP-SMA harus memiliki ruangan sekretariat berikut ruang konseling, selain tempat tentunya dalam 1 kelompok PIK R harus ada pengurus PIK R tersertifikasi telah mengikuti pelatihan endidik sebaya dan konseor sebaya.

1. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kota Bontang pada tahun 2019 dijumpai beberapa permasalahan, yaitu :

- 1) Secara umum terjadi keterlambatan DIPA. Satu DIPA diterima pada bulan April 2019, sedangkan 3 DIPA lainnya diterima pada bulan Juni 2019 karena terjadi penataan ditingkat eselon I (K/L).
- 2) Harus dilakukan revisi pelaksana kegiatan di tingkat pusat (Dinas Pertanian), dan terjadi perubahan juknis ditengah perjalanan
- 3) Pelaporan melalui e-monev Bappenas, dibatasi oleh waktu dan tidak tersedia menu untuk menambahkan program yang belum tersedia, selain itu juga tidak ada fasilitas cetak bagi Bappeda Kab/Kota.

2. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- 1) Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.
- 2) Meningkatkan koordinasi diantara PD pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan, Bapelitbang, KPPN, maupun Kementerian / Lembaga (K/L)pemberi penugasan, sehingga dapat meminimalisir kendala baik yang bersifat teknis maupun administratif.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Bappenas, dan juga dengan Satker sebagai penyedia data sehingga pelaporan dapat dilakukan sesuai batas waktu yang disediakan.

4.4. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Kerja sama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam rangka menyasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Intinya daerah harus memiliki inisiatif untuk membaca potensi daerahnya sebagaimana urusan wajib maupun pilihan yang telah menjadi kewenangannya yang dapat dikembangkan melalui kerjasama daerah dan/atau pihak ketiga demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini pelaksanaan kerjasama daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama antar daerah merupakan instrumen yang dioptimalkan dalam upaya mengatasi berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

Kerjasama daerah dinilai memiliki beberapa peran yang strategis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses mensejahterakan masyarakat.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah ini, Pemerintah Kota Bontang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah lainnya melalui berbagai program pembangunan. Kerjasama antar daerah ini diyakini dapat menjadi salah satu media solusi untuk menyelesaikan masalah lintas daerah, pelayanan lintas daerah, mencegah konflik antar daerah dan menjadi wadah untuk menjaga persatuan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan



Realisasi pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Daerah lainnya pada tahun 2018 adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 20 Agustus 2015, Nomor 188.6/35/HUK dan Nomor 134.4/623/OTDA. Adapun kerjasama melalui bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, perikanan, kelautan dan pertanian, sumber daya pengairan dan konservasi, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, penataan ruang dan sosial-budaya.

Selain itu telah dilaksanakan juga penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kutai Kartanegara pada tanggal 17 April 2015, yang meliputi kesepakatan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, kelautan, perumahan, perhubungan, sumber daya pengairan, konservasi dan pemanfaatan ruang. Di bidang Jaringan Lintas Perkotaan juga telah dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat melalui perjanjian kerjasama nomor : 188.6/52/Huk dan nomor : 119/351-Bag.KS tanggal 2 September 2016.

Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan perpanjangan MOU kerjasama fasilitas pelayanan jasa kepelabuhanan dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV pada bulan Desember 2016. Terdapat 9 (sembilan) point penting dalam perjanjian kerjasama tersebut, antara lain; (1) Pelayanan jasa tambat; (2) Pelayanan jasa dermaga; (3) Pelayanan jasa penumpukan; (4) Pelayanan jasa bongkar muat; (5) Pelayanan jasa pas pelabuhan; (6) Pelayanan jasa PBM; (7) Pelayanan jasa air; (8) Pelayanan jasa listrik; (9) Pelayanan jasa lainnya. Dengan adanya 9 (sembilan) item kesepakatan ini, diharapkan akan mempermudah proses kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan Lhoktuan Kota Bontang, serta memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Kepuasan pengguna jasa pelabuhan, fasilitas yang memadai dan proses yang berorientasi pelanggan merupakan faktor penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). MoU ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 dan akan ditinjau ulang setiap tahunnya disesuaikan dengan kondisi eksternal dan internal kepelabuhanan.

3. Permasalahan dan Solusi

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur, belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan



pembahasan lebih detil dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu telah dilakukan koordinasi untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar kerjasama daerah tersebut dapat segera direalisasikan.

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pemerintah Kota Bontang sebagai pengemban pengelolaan pembangunan daerah menyadari sepenuhnya bahwa sangat diperlukan adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dan komponen stakeholders lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu sejak terbentuknya Kota Bontang menjadi daerah otonomi, kerjasama dan sinergi pelaksanaan pembangunan Kota Bontang terus mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi semua pihak karena pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama. Dalam menjamin agar proses partisipasi tersebut dapat berjalan efektif, Pemerintah Kota Bontang telah mengembangkan kerjasama program yang lebih optimal dan efektif untuk secara bersama-sama bersinergi memecahkan permasalahan pembangunan daerah. Kerjasama ini melibatkan Perusahaan-perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta serta pihak perbankan yang tergabung dalam Forum CSR Kota Bontang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2011 dan SK Walikota Nomor 339 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Forum Corporate Social Responsibility (FCSR) Kota Bontang. Badan Usaha Milik Negara maupun swasta sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- 1) Direktur PT. Pupuk Kaltim
- 2) Direktur PT. Badak LNG
- 3) Direktur PT. Indominco Mandiri
- 4) Direktur G.A PT Kaltim Methanol Industri
- 5) Direktur PT. Kaltim Parna Industri
- 6) Direktur PT. Black Bear Resources Indonesia
- 7) Direktur PT. Kaltim Nitrate Indonesia
- 8) Direktur PT. Kaltim Industrial Estate



- 9) Direktur PT. Kaltim Daya Mandiri
- 10) Direktur PT. Kaltim Nusa Etika
- 11) Direktur Rumah Sakit PKT
- 12) Direktur PT. Pama Persada Nusantara
- 13) Direktur PT. Chevron
- 14) Direktur PT. Pertamina Gas
- 15) Direktur PT. United Tractor
- 16) Direktur PT IKPT
- 17) Kepala Telkom Bontang
- 18) Kepala PLN Bontang
- 19) Bank Indonesia
- 20) Kepala Cabang Bank Kaltimtara Bontang
- 21) Kepala Cabang Bank Mandiri Bontang
- 22) Kepala Cabang Bank Negara Indonesia (BNI 46) Bontang
- 23) Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bontang
- 24) Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Bontang
- 25) Kepala Cabang Bank Danamon Bontang
- 26) Kepala Cabang Bank Muamalat Bontang
- 27) Kepala Cabang Bank Mega Bontang
- 28) Kepala Cabang Bank Dhanarta Bontang
- 29) Kepala Cabang Maybank Bontang
- 30) Kepala Cabang Bank Central Asia (BCA) Bontang

Bentuk kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan peran pihak perusahaan melalui program-program Corporate Social Responsibility Funds (dukungan alokasi dana CSR) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui kebijakan ini diharapkan program-program CSR dapat bersinergi dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan dan tepat sasaran. Sinergi program ini dapat terjadi dengan adanya koordinasi, penyusunan perencanaan bersama dan pelaksanaan program-program CSR dimasing-masing perusahaan.



Disamping itu pada tahun 2017 telah disepakati adanya CSR Kolaborasi, yaitu salah satu bentuk CSR perusahaan yang bentuknya telah disepakati bersama dan dikerjakan secara bersama-sama. Untuk tahun 2017 CSR Kolaborasi telah disepakati berupa penghijauan taman dalam rangka mendukung program "Green City" dengan membuat pot bunga lengkap dengan tanaman bunganya yang ditempatkan pada median-median jalan.

Adapun Kerjasama yang telah dilaksanakan antara lain terdiri dari program:

- a) Program Pengembangan Ecotourism;
- b) Program Budidaya Ikan;
- c) Program Pengembangan UMKM Pesisir;
- d) Program Peningkata Kapasitas (Capacity Building);
- e) Program Pemberdayaan;
- f) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- g) Program Kesehatan;
- h) Program Pendidikan;
- i) Program Sosial dan Keagamaan;
- j) Program Charity (Amal);
- k) Program Infrastruktur dan Lingkungan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan di Kota Bontang untuk memecahkan berbagai permasalahan pembangunan diimplementasikan melalui sinergi program CSR perusahaan. Pelaksanaan kegiatan program CSR perusahaan pada tahun 2019 bidang ekonomi, sosial dan Lingkungan antara lain dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Industrial Estate

1.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan Biaya	Rp.	4.195.000
2.	Bidang Kesehatan	Rp.	5.600.000
3.	Bidang Pengembangan Masyarakat	Rp.	56.450.000
4.	Bidang Penghijauan Lingkungan	Rp.	5.890.000
5.	Bidang Infrastuktur	Rp.	32.578.000



6.	Bidang Sosial	Rp.	15.000.000
7.	Bidang Bantuan/Proposal	Rp.	265.344.870
Total		Rp.	385.057.870

Pemberian bantuan berupa pinjam pakai lahan kepada masyarakat, penggunaan ini tanpa dipungut biaya. Namun, sebagai pelaporan setiap bidang lahan yang dipinjamkan dikonversi nilai rupiah dengan asumsi sewa lahan Rp.20.000/meter/tahun.

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Luas (M2)	Lokasi
1	2	3	4	5
1	Gedung Serba Guna dan Pujasera	80.500.000	4.025	Guntung
2	Sekolah Luar Biasa Komplek Hotel Equator	57.240.000	2.862	Guntung
3	Water Treatment Plan PDAM	19.500.000	975	Guntung
4	Penggunaan Budidaya Ikan Air Tawar	16.000.000	800	Guntung
5	Penggunaan Lahan Untuk Jalan di Pos 7	20.000.000	1.030	Loktuan
6	Akses Jalan dari Loktuan Menuju RT 51	2.240.000	112	Loktuan
7	Masjid Green Land Temputu RT.52	69.740.000	3.487	Loktuan
8	Pujasera Green Land Temputu RT 52	7.980.000	399	Loktuan
9	Penggunaan untuk Gereja	260.000.000	13.000	Loktuan
10	Mesjid di Bukit Sekatup Damai	39.520.000	1.991	BSD
11	Pengelola Satuan PAUD Sejenis Anyelir XII	2.674.600	134	BSD
12	Kelompok Hijau Kreatif PKK	2.000.000	100	BSD
13	Pengelola Satuan PAUD Sejenis Anyelir VII	3.400.000	170	BSD
14	Penggunaan untuk SMP Negeri 5	3.713.400	185,67	Loktuan
15	RT.30 BSD Kelurahan Gunung Elai	1.920.000	96	BSD



16	Kelompok Ternak Bina Tani	4.123.000	2.272	Loktuan
Total		591.451.000	31.638,67	

Tabel 4.2

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. PLN (PERSERO) UP3 Bontang

No.	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Sumber usulan
1.	Bontang bebas BABS	Masyarakat Kota Bontang	RT. 14 Kelurahan Tanjung laut indah	Kerjasama dengan CSR Kota Bontang
2.	Mudik bareng PLN 2019	Masyarakat Kota Bontangn dan Kutim	Bontang dan Kutim	-

**Tabel 4.3**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pertamina Gas

Bidang	No	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana
Kesehatan	1	Bontang Bebas BABS	Pembangunan sarana MCK dan Septik Tank Biofill di RT. 01 Tanjung Limau	4 titik Septik Tank untuk 20 KK/100 penerima manfaat	Masyarakat RT. 01 Tanjung Limau	RT. 01 Tanjung Limau, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara	FORKOHAT Kota Bontang	Rp.150,000,000
Pemberdayaan Masyarakat	2	Pemberdayaan Wanita Mandiri	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan Quality Control Ecoprint- Pelatihan Menjahit- Pelatihan Manajemen Organisasi dan Kelembagaan- Perbaikan Sekretariat, Pengecatan dan Penghijauan di RT. 01- Pendampingan Kelompok setiap	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kualitas produk Batik Ecoprint- 18 orang anggota kelompok mahir menjahit- Kelembagaan lebih terstruktur dan terorganisir- Pendapatan anggota kelompok 1.500.000 per orang	Kelompok Perempuan Matahari	RT. 01 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang	Kajian Pemetaan Sosial Perusahaan	Rp. 75,000,000



Bidang	No	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana
			bulan - Pameran Produk - Pendaftaran Hak Merek KEMENKUMHAM - Keikutsertaan anggota UMKM Kota Bontang	- Terlibat dalam kegiatan UMKM Kota Bontang				
	3	SEPASIR (Kesetaraan Pendidikan dan Pengembangan Warga Pesisir)	- Pelatihan pemanfaatan limbah kulit keran - Pembentukan kelompok masyarakat - Pengadaan peralatan penunjang kegiatan - Penjaringan	- Peningkatan softskill warga pesisir - Terbentuknya 4 kelompok masyarakat - Keterlibatan 25 orang warga kelompok rentan	Kelompok Masyarakat Pesisir Pulau Gusung	Pulau Gusung, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang	Kajian FGD perusahaan	Rp.35,000,000



Bidang	No	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana
			stakeholder	- Peningkatan penghasilan dari kegiatan				
	4	Sampah terpadu (KSM Kanaan)	<ul style="list-style-type: none">- Study Banding Bank Sampah Balikpapan- Pembentukan kelompok masyarakat- Pengadaan peralatan penunjang kegiatan- Penjaringan stakeholder terkait	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan keterampilan pengelolaan bank sampah dan TPS Terpadu 3R- Mengaktifkan kembali kegiatan pengelolaan sampah di Kelurahan Kanaan	KSM Kanaan Bersinar	Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang	Proposal Masyarakat	Rp. 40,000,000



Bidang	No	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana
Lingkungan	5	Penghijauan Lahan Kritis	- Konservasi Keanekaragaman Hayati - Pengadaan Bibit <i>Sonneratia Ovata</i> - Penanaman 1000 bibit Mangrove <i>Sonneratia Ovata</i> - Pengadaan peralatan penunjang kegiatan - Penjaringan stakeholder terkait	- peningkatan penanaman lahan 1 hektar pada area taman nasional kutai - peningkatan pelestarian mangrove	Masyarakat di wilayah TNK	Bontang Mangrove Park, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang	Kerjasama Taman Nasional Kutai	Rp. 60,252,200
TOTAL PROGRAM	5	GRAND TOTAL						Rp. 360,252,200



Tabel 4.4

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Nitrate Indonesia

No	Kegiatan	Kluster	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Program Pengembangan Produk Daur Ulang - KSM Anggrek	Empowerment	Memberdayakan Ekonomi Masyarakat	KSM Anggrek	Kelurahan Guntung	Kolaborasi Masyarakat, Pemerintah dan PT KNI	Rp	140,520,000
2	Program MAHIRA (Rumah Ibadah Ramah Anak)		Mencegah Kekerasan Terhadap Anak melalui Kegiatan Positif di Rumah Ibadah	Masyarakat (Anak-Anak dan Orang Tua)	Lingkungan Masjid Asy Syuhada dan Masjid Al Hijrah	Pemerintah Kota	Rp	121,470,000
3	STEM STELR Program		Mendorong Pelajar untuk berinovasi teknologi berwawasan lingkungan	Pelajar SMP	SMP Kota Bontang	Kolaborasi ORICA, PT KNI dan Institusi Pendidikan	Rp	313,870,000
4	Program Lingkungan - Laskar Taman Nasional Kutai		Mendorong Pelajar untuk Mencintai Alam melalui Kegiatan Konservasi	Pelajar SMP	Bontang Mangrove Park	Kolaborasi Balai Taman Nasional Kutai dan PT KNI	Rp	91,450,000
5	Program GERMAS (Gerakan Masyarakat		Mendorong terciptanya Kesehatan Masyarakat yang terintegrasi dan	Masyarakat	Bontang Utara	Kolaborasi Masyarakat, Pemerintah	Rp	104,612,800



	Hidup Sehat)		berkelanjutan			dan PT KNI		
6	Program ORIKKA - Pembuatan PotoArt		memperdayakan Masyarakat melalui kegiatan positif	Masyarakat	Kelurahan Guntung	Masyarakat dan Organisasi Istri Karyawan PT KNI	Rp	83,840,000
7	Pelatihan-Pelatihan yang Mendukung Pengembangan Kapasitas Masyarakat Bontang	Capacity Building	Mendukung Peningkatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Masyarakat Bontang	Bontang	Kebutuhan Masyarakat atau Institusi/Lemba ga	Rp	218,898,821
8	Bantuan Infrastruktur untuk Masyarakat Bontang	Infrastructure	Mendukung berjalannya kegiatan pengembangan infrastruktur masyarakat	Masyarakat Bontang	Bontang	Kebutuhan Masyarakat atau Institusi/Lemba ga	Rp	216,445,000
9	Bantuan Sosial Masyarakat, Donasi, Sponsorship	Charity	Mendukung berjalannya kegiatan-kegiatan positif di masyarakat	Masyarakat Bontang	Bontang	Kebutuhan Masyarakat atau Institusi/Lemba ga	Rp	572,227,530
Total							Rp	1,863,334,151

**Tabel 4.5.**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Parna Industri

No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1	Internship Program tingkat SMU dan STM	Ikut membantu meningkatkan kualitas pendidikan serta kesempatan belajar bagi semua siswa/mahasiswa	Siswa/siswi PKL SMU Lokal Bontang	KPI Bontang	Rp	90,668,000.00
	Internship Program tingkat D3/S1		Siswa/siswi D3/S1 Lokal dan Nasional	KPI Bontang		
2	Rumah baca cerdas etam : bantuan pengadaan komputer dan laptop serta buku bacaan	Dapat meningkatkan layanan pendidikan serta kualitas pelayanan rumah baca	Pelajar dan warga Guntung	Guntung	Rp	25,956,000.00
3	Kunjungan industri	Menambah wawasan dan pengetahuan, mengenalkan dunia kerja produksi amonia yang memotivasi siswa dan mahasiswa lebih giat	SMAN 2 Bontang : 80 siswa	KPI Bontang	Rp	19,740,000.00
			SMA IT Yabis : 80 siswa			
			POLNES Samarinda - Teknik Mesin : 60 siswa			



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
		belajar				
4	Hutan Wana Khatulistiwa	Turut menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati dan RTH	Menurunkan GRK dan menambah estetika	Bontang Lestari	Rp	190,950,000.00
5	Kegiatan bersama pecinta lingkungan	Melibatkan para generasi remaja agar turut mencintai dan menjaga lingkungan demi keberlangsungan anekaragam hayati	Siswa pecinta Lingkungan se Kota Bontang	SMAN 2 dan Sangkima	Rp	13,718,400.00
6	Bantuan tempat sampah	Mendukung gerakan sekolah bersih dan sehat	Siswa dan guru	SMPN 5 Bontang	Rp	5,000,000.00
7	Kegiatan penghijauan : menanam pohon bersama	Meningkatkan kontribusi swasta untuk menjaga lingkungan	Turut menurunkan GRK dan menahan longsor	Kilo 3 Bontang Barat Gereja GKII	Rp	10,500,000.00



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
8	Memelihara situs/cagar budaya lokal " Rumah Adat Kutai" di Guntung	Memelihara situs budaya sebagai kekayaan bangsa Indonesia	Pelestarian warisan budaya dan situs	Kelurahan Guntung dan Bontang Kuala	Rp	28,000,000.00
9	Taman Banua Guntung	Estetika dan kenyamanan	Estetika dan keindahan	Kelurahan Guntung	Rp	10,000,000.00
10	Fogging : Gerakan 1 rumah 1 jumantik, KPI turut berpartisipasi membasmi nyamuk penyebab DBD	Meningkatkan pengendalian penyakit melalui penyehatan lingkungan	Mengurangi daerah terdampak DBD	Kelurahan Api-api dan Kelurahan Bontang Baru	Rp	19,070,000.00
11	Sosialisasi bahaya kebakaran, listrik dan bahan kimia	Meningkatkan pengetahuan warga tentang keselamatan kerja di rumah tangga	Menambah pengetahuan kader PKK tentang bahaya kebakaran	Hotel Bukit Sintuk	Rp	40,870,500.00
12	Stop BABs : 15 Jamban sehat	Meningkatkan kebersihan lingkungan melalui program hidup	untuk lingkungan yang sehat dan bersih	Selambai	Rp	85,594,000.00



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
		bersih dan sehat dengan sanitasi yang sehat				
13	Peningkatan kualitas usaha amplang	Membantu peningkatan perekonomian melalui UKM binaan	Amplang Revina Loktuan	Amplang Revina Loktuan	Rp	5,000,000.00
14	Pembinaan kelompok petani aren getah Guntung	Membantu peningkatan perekonomian melalui UKM binaan	Kelurahan Guntung	Kelurahan Guntung	Rp	10,000,000.00
15	Pembinaan kelompok petani Guntung Makmur "KOMPOS SUTARA"	Membantu peningkatan perekonomian, menggalakkan penggunaan teknologi dalam mengurangi limbah ternak	Kelompok petani Guntung Mandiri "KOMPOS SUTARA" Guntung	RT 14 Kelurahan Guntung	Rp	51,434,000.00
16	HUT RI : Lomba masakan berbahan	Gerakan masyarakat hidup sehat dengan	Wadah silaturahmi dengan warga	Loktuan	Rp	30,000,000.00



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
	dasar ikan	kampanye makan ikan				
	HUT RI : Senam Jantung Sehat, Lomba produk unggulan	Gerakan masyarakat hidup sehat dengan berolah raga, kampanye produk berbahan alam	Wadah silaturahmi dengan warga	Guntung	Rp	
17	Berbagi berkah dalam rangkaian Bulan Ramadhan : Bazar murah, pengadaan material kebutuhan masjid, panti asuhan	Membantu meningkatkan kualitas sosial warga yang masih dibawah garis kemiskinan untuk kehidupan yang berkelanjutan	Warga Guntung, masjid, ponpes dan panti asuhan di Bontang	Warga Bontang	Rp	146,253,500.00
18	Bantuan perlengkapan olahraga	Mendukung program pemuda dalam menciptakan generasi sehat	LPM Kelurahan Loktuan	Kelurahan Loktuan	Rp	6,000,000.00



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
19	Bina lingkungan	Permohonan donasi tunai oleh warga, LSM dan lembaga pendidikan	Menjalin silaturahmi	Warga Bontang	Rp	255,222,000.00
TOTAL					Rp	1,043,976,400.00

Tabel 4.6.

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Sumber usulan	Dana
1.	Renovasi sekolah	Renovasi sekolah SMP Nurul Iman	13 siswa berprestasi dan tidak mampu	SMP Nurul Iman	BNI dan Pupuk Kaltim	Rp. 60.000.000
2.	Bantuan beasiswa	Bantuan beasiswa	13 siswa berprestasi dan tidak mampu	13 sekolah	BNI, PT. Pindad, PT. Dirgantara	Rp. 65.000.000



					Indonesia	
3.	Bazar Murah	Mendapat harga barang murah	1.000 paket bazar murah @100.000	BNI Cabang Bontang	BNI, PT. Pindad, PT. Dirgantara Indonesia	Rp. 100.000.000
4.	Elektrifikasi gratis	Pemerataan pelanggan listrik	25 Rumah warga tidak mampu	25 rumah warga Bontang	BNI, PT. Pindad, PT. Dirgantara Indonesia	Rp. 59.743.000
5.	Renovasi rumah pegawai	Pemerataan rumah layak huni	2 unit rumah pegawai	Kel. Berbas Tengah dan Kel. Loktuan	BNI, PT. Pindad, PT. Dirgantara Indonesia	Rp. 54.028.000
TOTAL						Rp. 338.771.000

**Tabel 4.7.**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Daya Mandiri (KDM)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER USULAN	DANA
1	Pemberdayaan Masyarakat melalui konservasi alam	Pembuatan Nutrisi Organic tamanan	Pemberdayaan masyarakat	Kelompok tani Borneo	RT 15 Kelurahan Loktuan	Program CSR KDM	Rp.33.655.000
		Pelatihan budidaya kepiting bakau di Bali	Pemberdayaan masyarakat	Kelompok nelayan budidaya kepiting bakau	Pulau gusung	Program CSR KDM	Rp. 72.900.000
2	Peduli Kesehatan Masyarakat	Bantuan kursi roda bagi lansia	Lansia sejahtera, berdaya dan bahagia	Lansia di Kel.Guntung dan Kel.Loktuan	Kel.Guntung dan Kel.Loktuan	Program CSR KDM	Rp. 12.500.000
		Seminar pengendalian penyakit demam berdarah	Menambah pengetahuan masyarakat bagaimana mengatasi	Masyarakat Kota Bontang	Gedung pertemuan 3 dimensi Awang Long	Program CSR KDM	Rp. 24.878.000



NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER USULAN	DANA
			demam berdarah				
		Bantuan fogging nyamuk demam berdarah	Mengurangi penyebaran nyamuk demam berdarah	Perumahan di Kel. Api-Api	Kel. Api-api	Proposal Dinas Kesehatan	Rp. 5.600.000
3	KDM Peduli Pendidikan	Workshop guru PAUD binaan KDM bekerjasama dengan PAUD terpadu YPK	Meningkatkan pemahaman kurikulum dan metode mengajar siswa usia dini	PAUD terpadu kreatif Loktuan, PAUD Terpadu madani sidrap, PAUD terpadu Nurul Fatah Loktuan, KB Kasih Bunda Pulau Gusung	PAUD terpadu YPK, Yayasan Pupuk Kaltim	Program CSR KDM	Rp. 30.000.000
		Kunjungan belajar guru	Memperkaya wawasan tentang	Guru PAUD Binaan PT.	PAUD Terpadu Fastabiqul Khairat di	Program CSR	Rp. 20.162.000



NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER USULAN	DANA
		PAUD	metode mengajar yang baik	KIDM	Samarinda	KDM	
		Pemeberian Beasiswa Unggulan	4 anak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP dan SMA	3 Siswa SD warga Loktuan dan Guntung, 1 siswa SMP warga Guntung	SMP YPK dan SMA YPK	Program CSR KDM	Rp. 93.075.000
TOTAL							Rp. 292.770.000

**Tabel 4.8.**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Badak NGL

BULAN	SOCIETY EMPOWERMENT	CAPACITY BUILDING	INFRASTRUCTURE	CHARITY	GRAND TOTAL
JANUARI	125,601,800.00	329,275,500.00	5,000,000.00	35,884,250.00	495,761,550.00
FEBRUARI	635,141,512.50	56,500,000.00	108,900,000.00	19,884,250.00	820,425,762.50
MARET	365,095,179.28	119,825,000.00	46,049,000.00	91,318,250.00	622,287,429.28
APRIL	62,742,000.00	98,021,522.00	100,374,950.00	92,785,250.00	353,923,722.00
MEI	24,374,000.00	90,500,000.00	5,000,000.00	41,785,250.00	161,659,250.00
JUNI	379,453,584.11	211,196,000.00	13,494,500.00	44,000,000.00	648,144,084.11
JULI	370,799,795.00	704,575,000.00	8,000,000.00	161,244,450.00	1,244,619,245.00
AGUSTUS	179,282,094.00	100,883,500.00	17,840,000.00	268,431,401.00	566,436,995.00
SEPTEMBER	719,516,471.00	289,603,276.00	5,000,000.00	177,246,124.00	1,191,365,871.00
OKTOBER	284,149,661.84	78,864,000.00	14,000,000.00	222,156,375.00	599,170,036.84
NOPEMBER	272,347,500.00	124,655,800.00	0	152,388,276.00	549,391,576.00



DESEMBER	632,210,132.17	601,586,000.00	277,675,000.00	498,835,287.00	2,010,306,419.17
JUMLAH	4,050,713,729.90	2,805,485,598.00	601,333,450.00	1,805,959,163.00	9,263,491,940.90

No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
COMMUNITY EMPOWERMENT				
1.	KAMPUNG ASIMILASI	<ul style="list-style-type: none"> - Budidaya buah naga - Pembuatan furniture dari drum bekas - Kerajinan dari limbah serbuk kayu & nasi - Hidroponik - Ternak lele - Budidaya maggot - Akuaponik 	Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Klas III Bontang	Lapas Bontang, Bontang Lestari
	a. Manajemen Organisasi			
	Pendampingan kelompok			
	Pelatihan pembuatan akuaponik			
	<i>Sharing knowledge</i> pemanfaatan limbah serbuk kayu dan nasi kepada mitra binaan kelompok Masdarling			
	Pelatihan penguatan kewiralembagaan			
	b. Infrastruktur Sarana & Prasarana			
	Pembuatan kolam akuaponik			
	Pembuatan rangka penyangga tanaman			
	Pengadaan perlengkapan akuaponik			
	Pengadaan bibit ikan air tawar			
	Pembuatan atap kolam akuaponik			
	c. Publikasi dan Pemasaran			
Mempromosikan hasil produk melalui media online				



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
	dan <i>offline</i>			
2.	SELANGAN CITY			
	a. Manajemen Organisasi			
	Pendampingan kelompok			
	Pelatihan pengelolaan keuangan			
	Pelatihan pengecatan kawasan pesisir			
	Pelatihan P3K bagi pramuwisata			
	Pelatihan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	- Snorkeling		
	Pelatihan pembuatan elektrolisa air hujan	- Homestay tengah laut		
	Pelatihan pembuatan sabun rumput laut	- Air elektrolisa	- Kelompok Pelangi Pesisir	
	b. Infrastruktur Sarana dan Prasarana	- Sabun rumput laut	- Kelompok Kembang Lusai	Pulau Selangan, Bontang Lestari
	Pembangunan pondok wisata	- Kuliner pesisir		
	Pemasangan papan informasi	- Wisata susur pulau mangrove		
	Renovasi posyandu	- Oleh-oleh pesisir		
	Pengadaan kapal kebersihan			
	Pemasangan peta wisata			
	Pengadaan alat elektrolisa air hujan			
	Pengadaan sarana dan prasarana wisata			
c. Publikasi dan Pemasaran				
Mempromosikan paket wisata melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>				



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
3.	KAMPUNG MAsDARLING			
	a. Manajemen Organisasi			
	Survey awal program			
	Pembuatan <i>grand design</i> program			
	Membangun komitmen bersama masyarakat dan kelompok Masdarling			
	Pendampingan kelompok			
	Pelatihan pembuatan kompos	- Kampung asri		
	Pembuatan AD/ART Masdarling	- Kampung jajan		
	Pelatihan pengelolaan pariwisata	- Kampung oleh-oleh		
	Pelatihan pengelolaan keuangan	- Kampung sehat		
	b. Infrastruktur Sarana dan Prasarana	- Kampung narsis		
	Pembuatan gapura	- Kampung main		
	Pembuatan photobooth	- Paket wisata		
	Pembuatan jalan terapi	- Sewa pendopo untuk gathering		
	Pembelian sepeda wisata			
	Pembuatan tempat parkir sepeda wisata			
	Pembangunan Kampung Main, Kampung Jajan, dan Kampung Oleh-oleh			
Pembuatan meja kursi untuk wisatawan				
Pembangunan rumah kompos				
Bantuan pembelian mesin pencacah daun dan alat pengomposan lainnya				



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
	Penataan track sepeda			
	Pembuatan papan informasi dan peta wisata			
	Penataan tempat informasi wisata			
	Pembuatan lampu hias jalan			
	Pembuatan alat pembayaran dari barang bekas			
	Pembuatan tempat tanaman sulur			
	Pembibitan tanaman peneduh, sayur, dan buah			
	c. Publikasi dan Pemasaran			
	Melakukan promosi wisata melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
4.	INDUSTRI MIKRO PESISIR			Bontang
	Pendampingan kelompok		- Kelompok Saputra Snack	
	Pelatihan manajemen keuangan	- Produk olahan bawis	- Kelompok Mawar Lestari	
	Pembuatan Kantin Kejujuran	- Produk olahan mangrove	- Kelompok Daun Harum	
	Pendampingan pengurusan perpanjangan sertifikat halal	- Produk olahan rumput laut	- Kelompok Tunas Jaya	
	Pengadaan kemasan ramah lingkungan	- Produk olahan hasil pesisir lainnya	- Barisan Gotong Royong	
	Melakukan promosi produk melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>	- Paket oleh-oleh	- Kelompok Gerbang Marina - Kelompok Mekar Mandiri - Kelompok Kembang	



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
			Lusai - Kelompok Thalita Mangrove - Kelompok Karya Wanita	
5.	BONTANG KUALA ECOTOURISM	- Wisata susur sungai Belanda	Kelompok Maskapei (Masyarakat Kreatif Pesisir)	Bontang Kuala
	Pendampingan kelompok			
	<i>Sharing knowledge</i> pelatihan pemandu snorkeling	- Snorkeling Karang Segajah & Karang Pesilan		
	Renovasi gapura BK Ecotourism			
	Pengadaan sepeda wisata			
	Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>	- Floating Homestay - Penyewaan Sepeda - Transplantasi terumbu karang		
6.	BUDIDAYA LELE	- Budidaya lele	Kelompok Barisan Gotong Royong	Api-api
	Pendampingan perpanjangan sertifikat halal	- Pelatihan & pendampingan budidaya lele		
	Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
	Melakukan promosi kegiatan dengan kunjungan <i>benchmarking</i> dari instansi lain	- Diversifikasi produk olahan lele		
7.	BUDIDAYA JAMUR	- Budidaya jamur	Kelompok Telihan Indah	Gunung Telihan



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
	Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>	- Diversifikasi produk olahan jamur		
8.	TERNAK MANDIRI	Pernakan sapi	Kelompok Ternak Mandiri	Desa Sukarahmat
	Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
9.	PEMBIBITAN ULIN	- Pembibitan ulin, tanaman buah, dan tanaman peneduh - Jasa landscape taman	Kelompok Green House Pesona Alam	Bontang Lestari
	Pendampingan kelompok Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
10.	ITOB (Ikatan Teknisi Otomotif Bontang)	Servis dan reparasi mobil	Bengkel Askara Mandiri	Bontang
	Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
11.	KONSERVASI MANGROVE	- Budidaya mangrove - Mangrove Information Center - Jasa pelatihan budidaya mangrove - Jasa penanaman mangrove	- Kelompok Tani Lestari Indah - Kelompok Tani Beras Basah - Kelompok Tani Bakau Jaya - Kelompok Tani Nelayan Pantai Harapan - Kelompok Attirara	- Tanjung Laut Indah - Berbas Tengah - Bontang Kuala - Bontang Lestari
	Pendampingan kelompok			
	Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
	Renovasi workshop kelompok Tani Lestari Indah			
	Pembelian bibit untuk bantuan penanaman bagi pihak ketiga			



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
			- Kelompok Bunga Laut	
12.	MANGROVE ECOMODE	<ul style="list-style-type: none"> - Kain batik dengan pewarna alami mangrove dan sintetis - Pakaian batik - Pelatihan membatik 	Pondok Batik Etam	Gunung Telihan
	Pendampingan kelompok			
	Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
	Melakukan promosi kegiatan dengan kunjungan dari instansi lain			
13.	BUDIDAYA KERAPU DAN PONDOK APUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Budidaya kerapu - Kuliner olahan hasil laut 	Kelompok Kerapu Macan	Berbas Pantai
	Pendampingan kelompok			
	Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
	Melakukan promosi kegiatan dengan kunjungan dari instansi lain			
14.	PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> - Pencacahan plastik - Pengepresan kardus 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Bontang Lestari Peduli - Kelompok Satimpo Berhias 	<ul style="list-style-type: none"> - Bontang Lestari - Satimpo
	Pelatihan pengepresan kardus untuk kelompok Bontang Lestari Peduli			
	Pengadaan mesin pengepresan kardus untuk kelompok Bontang Lestari Peduli			
	Pendampingan kelompok			
	Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
	Melakukan promosi kegiatan dengan kunjungan dari			



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
	instansi lain			
15.	BUDIDAYA KEPITING BAKAU	Budidaya Kepiting Bakau	- Kelompok Tani Lestari Indah - Kelompok Tani Beras Basah - Kelompok Tani Bakau Jaya - Kelompok Tani Nelayan Pantai Harapan - Kelompok Attirara Kelompok Bunga Laut	- Tanjung Laut Indah - Berbas Tengah - Bontang Kuala - Bontang Lestari
	Pendampingan kelompok Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
16.	KOMUNITAS TATA BUSANA	- Jahit baju - Peralatan menjahit - Pelatihan menjahit	- KOCIBU (Koperasi Cipta Busana) - Kube Anggrek	- Gunung Telihan - Kanaan
	Pendampingan kelompok Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
17.	RUMAH KREATIF	- Sablon kaos - Souvenir dari minuman kaleng bekas	Rumah Kreatif	Berbas Pantai
	Pengembangan workshop			
	Pelatihan sablon dua warna			
	Pendampingan kelompok Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
18.	HIDROPONIK & TOGA	- Sayuran hidroponik	BPPKM	Kanaan



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
	Pendampingan kelompok	- TOGA		
	Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>	- Pembibitan tanaman peneduh & buah		
	Melakukan promosi kegiatan dengan kunjungan dari instansi lain	- Jasa pembuatan hidroponik		
19.	WISDABO	- Tarian Dayak	Kelompok Wisdabo	Api-api
	Pendampingan kelompok	- Kerajinan khas Dayak		
	Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
20.	IKATAN WELDER BONTANG	Sertifikasi welder migas	Ikatan Welder Bontang	Bontang
	Sertifikasi welder migas			
	Pendampingan kelompok			
	Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>			
21.	KNOWLEDGE HOUSE	- Cinema room		Bontang
	Melakukan promosi kegiatan melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i>	- Perpustakaan		
		- Conference Room		
CAPACITY BUILDING				
1.	BAFCO (Badak Full Scholarship)	Beasiswa penuh untuk tingkat SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi	- Calon penerima beasiswa SMP & SMA: seluruh pelajar Bontang - Calon penerima	Bontang



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
			beasiswa Perguruan Tinggi: Khusus penerima beasiswa saat SMA	
2.	MAGANG LABORATORY & EC, KULTUR JARINGAN, DAN OPERATOR BIODIESEL	Pemagangan di Laboratorium dan Nursery Badak LNG	Khusus siswa/mahasiswa Bontang	Bontang
3.	COOP (Cooperative Education Program)	Kesempatan belajar bekerja bagi mahasiswa yang belum lulus kuliah dan minimal semester 6	Khusus mahasiswa Bontang	Bontang
4.	PEMAGANGAN NASIONAL	Bekerja sama dengan Disnaker Bontang	Khusus siswa/mahasiswa Bontang	Bontang
5.	PKL (Praktik Kerja Lapangan)	Kesempatan mengenal dunia kerja bagi siswa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi	Terbuka untuk umum	Bontang
6.	LNG ACADEMY	Program pendidikan setara D3 dengan beasiswa penuh dari Badak LNG	Lulusan SMA IPA	Bontang
7.	PELATIHAN GURU PESISIR	Peningkatan kapasitas guru-guru di pesisir	Guru-guru di sekolah yang berlokasi di	- Selangan - Tihi-tihi



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
		melalui metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mengajar saat ini	kawasan pesisir	- Teluk Kadere - Lok Tunggul - Nyerakat Kiri - Gusung - Malahing
8.	LASKAR PESISIR	Bantuan fasilitas dan akomodasi siswa dari sekolah pesisir untuk persiapan menghadapi UN	Siswa-siswi dari sekolah yang berlokasi di kawasan pesisir	Bontang
9.	SEMINAR ENTERPENEURSHIP	Seminar untuk memotivasi dan menginspirasi pemuda Bontang dalam berwirausaha	Pemuda-pemudi Bontang	Bontang
10.	WORKSHOP JOBSEEKER	Workshop mengenai persiapan dan tips sebelum memasuki dunia kerja	Para pencari kerja di Kota Bontang	Bontang
CHARITY				
1.	BANTUAN KORBAN BANJIR BONTANG	- Bantuan makanan - Bantuan pakaian layak pakai	Korban banjir Bontang	- Kanaan - Gunung Telihan - Api-api



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none">- Bantuan obat-obatan- Bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan Perusahaan		<ul style="list-style-type: none">- Tanjung Laut- Gunung Elai- Ponpes Hidayatullah
2.	FOGGING PENANGGULANGAN DBD	Fogging yang dilaksanakan dua kali dalam setahun. Pelaksanaan pertama berkoordinasi langsung dengan kecamatan & kelurahan terkait, pelaksanaan kedua berkoordinasi dengan Dinkes Bontang	Kelurahan hasil koordinasi dengan Dinkes Bontang	<ul style="list-style-type: none">- Berbas Tengah- Berbas Pantai- Kanaan- Tanjung Laut- Tanjung Laut Indah- Satimpo
3.	PEMBAGIAN MASKER	Pembagian masker kepada sekolah dan masyarakat umum untuk menanggulangi akibat kabut asap	Masyarakat yang beraktifitas di wilayah yang terdampak kabut asap di Bontang	<ul style="list-style-type: none">- Bontang Lestari- Kanaan- Satimpo- Api-api- Tanjung Laut- Tanjung Laut Indah



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
				- Berbas Tengah - Berbas Pantai
4.	COMMUNITY GATHERING	Silaturahmi dengan beberapa kelurahan di area buffer zone Badak LNG yang dikemas melalui kegiatan olahraga dan permainan	Perangkat kecamatan Bontang Selatan dan kelurahan di buffer zone Badak LNG	- Tanjung Laut - Tanjung Laut Indah - Satimpo - Kanaan - Bontang Lestari
5.	SAFARI RAMADHAN	Silaturahmi dan pemberian bantuan kepada beberapa masjid di sekitar wilayah operasional Badak LNG	Bontang	Bontang
6.	PENYALURAN BANTUAN OGFICE	Penyaluran bantuan bagi dunia pendidikan dari Osaka Gas, salah satu pembeli gas Badak LNG	Bontang	Bontang
7.	BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM	- Bantuan pakaian layak pakai - Bantuan obat-obatan	Korban bencana alam di Kaltim & Nasional	Kaltim & Nasional



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
		- Bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan Perusahaan		
8.	MITRA TAMAN NASIONAL KUTAI	Dukungan kegiatan	Taman Nasional Kutai	Bontang
9.	DUKUNGAN KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN/KESEHATAN/PENDIDIKAN/OLAHRA GA/KEBUDAYAAN/ORGANISASI MASYARAKAT/FKPD/PENGAMANAN OBVTNAS	Dukungan kegiatan sesuai kebijakan Perusahaan	Bontang	Bontang
INFRASTRUCTURE				
1.	WC KOMUNAL & JAMBAN PESISIR SEDERHANA	Pembangunan WC Komunal & Jamban Pesisir Sederhana untuk mendukung program STOP BABS Bontang	Warga di area buffer zone Badak LNG	- Berbas Tengah - Berbas Pantai - Tanjung Laut - Tanjung Laut Indah - Bontang Lestari
2.	MOTOR RODA TIGA	Motor roda tiga untuk mengangkut sampah khususnya di kawasan yang tidak bisa dilalui truk sampah	Kelurahan terkait	- Berbas Tengah - Berbas Pantai - Satimpo - Gunung Telihan
3.	PERAHU SAMPAH	Perahu untuk mengangkut sampah	- Kelompok Pelangi Pesisir	Selangan, Bontang Lestari



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Sasaran/Penerima Manfaat	Lokasi
		dari pulau di tengah laut ke darat	- Warga Selangan	
4.	LIBRARY CORNER	Bantuan rak dan buku bacaan bagi beberapa sekolah di Bontang	Sekolah di kawasan pesisir Bontang	Bontang
5.	MOBIL CERDAS	Mobil perpustakaan keliling	Bontang	Bontang
6.	AMBULANS LAUT	Perahu yang berfungsi sebagai kendaraan pertolongan pertama saat ada kondisi emergency di pulau tengah laut	Selangan, Tihi-tihi	Bontang Lestari
7.	PERAHU KARET	Perahu untuk membantu proses evakuasi khususnya saat terjadi banjir	BPBD Bontang	Bontang
8.	DUKUNGAN PEMBUATAN/PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA DI MASYARAKAT	Dukungan pembangunan sesuai kebijakan Perusahaan	Bontang	Bontang

**Tabel 4.9.**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pupuk Kaltim

No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
Program Kemitraan						
1	Penyaluran Modal Kerja kepada 283 Usaha Kecil di Bontang	Meningkatkan Modal Usaha Mitra Binaan PKT	Pengusaha Kecil Bontang	Bontang	PKT	10,447,000,000
Sub Total						10,447,000,000
Program Bina Lingkungan						
2	Bantuan Alat Produksi Usaha kepada 17 Mitra Binaan	Peningkatan Produksi Usaha Mitra Binaan PKT	Pengusaha Kecil Bontang	Bontang	PKT	114,745,000
3	Bantuan 10 Buah Life Jacket Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Jl. Ir H Juanda Kel. Tanjung Laut	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung	Masyarakat Korban Banjir	BPBD Bontang	BPBD Bontang	7,776,875
4	Pelatihan Budidaya Kerapu di Bontang	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Pengusaha Kecil Bontang	Bontang	PKT	49,343,600
5	Pameran Inacraft 2019 di JCC Jakarta	Pemberdayaan Terhadap Mitra Binaan PKT	Pengusaha Kecil Bontang	Jakarta	PKT	43,524,933



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
6	Bantuan Fogging Untuk Bantuan Dinkes	Menanggulangi Penyakit DBD	Masyarakat Bontang	Area Buffer Zone PKT	Dinkes	33,253,162
7	Bantuan Sarana Pendukung Belajar Mengajar	Peningkatan Pendidikan bagi Masyarakat	27 Sekolah Bontang	Bontang	PKT	311,125,920
8	Bantuan Biaya Pendidikan	Peningkatan Pendidikan bagi Masyarakat	10 Siswa Bontang	Bontang	PKT	39,500,000
9	Bantuan Alat Kesehatan	Peningkatan Kesehatan bagi Masyarakat	2 Bontang	Bontang	PKT	20,858,000
10	Bantuan Suplai CRM K-225 Untuk Renovasi Lanjutan Lapangan Olahraga Detasemen Arhanud 002 Bontang	Peningkatan Sarana & Prasarana	Detasemen Arhanud 002 Bontang	Bontang	Detasemen Arhanud 002 Bontang	10,780,000
11	Bantuan Dana Pembelian 3 Unit AC Ukuran 1 PK Bagi Badan Narkotika Nasional Bontang Jl. Pattimura No 5 RT 32 Kel. Api - Api Kec. Bontang Utara	Peningkatan Sarana & Prasarana	BNN Bontang	Bontang	BNN Bontang	12,400,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
12	Bantuan Fasilitas Gedung Kantor Bagi Kelurahan Bontang	Peningkatan Sarana & Prasarana	6 Kelurahan	Bontang	PKT	102,637,000
13	Bantuan Dana Pembangunan Tempat Ibadah dan Sarana Ibadah di Bontang	Peningkatan Sarana Ibadah	35 Tempat Ibadah Bontang	Bontang	PKT	523,075,000
14	Pameran Adiwastra 2019 di JCC Jakarta	Pemberdayaan Mitra Binaan PKT	Pengusaha Kecil Bontang	Jakarta	PKT	40,008,934
15	Pameran Indonesia Creative Product Festival di Kuala Lumpur Malaysia	Pemberdayaan Mitra Binaan PKT	Pengusaha Kecil Bontang	Malaysia	PI	37,222,060
16	Bantuan Partisipasi Dana Untuk Pembelian 100 Unit Kursi Untuk Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara Jl. M. Effendi B3 No 6 RT 36 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat	Kepedulian Terhadap Sosial Kemasyarakatan	KKSU Bontang	Bontang	PKT	8,500,000
17	Bantuan Bencana Alam Banjir di 5 titik wilayah Banjir Bontang	Kepedulian Terhadap Masyarakat yang	5 Daerah Banjir	Bontang	PKT	258,991,200



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
		Terkena Dampak Bencana Alam				
18	Service Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bontang			Bontang	PKT	40,000,000
19	Bantuan kaki palsu untuk warga Bontang	Membantu Penyandang Disabilitas	3 Masyarakat Bontang	Bontang	PKT	22,385,710
20	Bantuan 2 Unit Ac 1 pk di Polres Bontang	Peningkatan Sarana dan Prasarana Polres Bontang	Polres Bontang	Bontang	Polres Bontang	7,700,000
21	Bantuan Dana Partispasi Pembelian Mesin Pencacah Sampah di Bontang	Membantu Detasemen Arhanud 002 Bontang untuk Dapat Memngolah Sampah Secara mandiri	Detasemen Arhanud 002 Bontang	Bontang	Detasemen Arhanud 002 Bontang	18,000,000
22	Bantuan Konsumsi Sahur & Buka puasa Di Bontang	Kepedulian Terhadap Masyarakat Buffer Zone dan Sekitarnya	Masyarakat Bontang	Bontang	PKT	14,000,000
23	Program Pupuk Kaltim Berbagi Sembako Gratis	Kepedulian Terhadap	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	437,000,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
	2019	Masyarakat Buffer Zone dan Sekitarnya				
24	Bantuan Yatim Piatu di Bontang	Kepedulian Terhadap Anak Yatim di Bontang	9 Panti Asuhan	Bontang	PKT	250,000,000
25	Program Paket Pangan Murah & Cek Kesehatan	Kepedulian Terhadap Masyarakat Buffer Zone dan Sekitarnya	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	405,565,008
Sub Total						2,808,392,402
Program Bina Wilayah						
1	Rawat Jalan dan Inap Warga Bontang di Rumah Sakit Kaltim Medika Utama Bontang	Memfasilitasi Biaya Pengobatan	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	90,456,508
2	Rawat Jalan di RS Mata SMEC Balikpapan	Memfasilitasi Biaya Pengobatan	Warga Kurang Mampu	Balikpapan	PKT	3,945,400
3	Biaya Operasional Klinik Dhuafa Bontang	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	222,820,182
4	Kunjungan Tamu Proper PT Pupuk Kaltim	Persiapan Propernas 2019	Binaan PT Pupuk Kaltim	Bontang	PKT	9,902,300
5	Bantuan Tenda & Kursi untuk Pensiun PKT yang	Bantuan Sarana	Pensiunan Karyawan PKT	Bontang	PKT	8,200,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
	meninggal					
6	Penanaman Pohon di Area Tursina	Penghijauan	Lahan Area Tursina	Bontang	PKT	224,750,000
7	Reinstalasi Jalur Pipa Air Bersih	Memfasilitasi Pengadaan Air Bersih	Warga Bufferzone	Bontang	PKT	67,537,000
8	Pembangunan Infrastruktur Prog. Server Mang Budi	Pemberdayaan Masyarakat	Warga Bufferzone	Bontang	PKT	303,399,000
9	Pengadaan Bibit Tanaman Langka & Tempat Sampah	Pelestarian Lingkungan	Internal Perusahaan	Bontang	PKT	350,000,000
10	Pengecetan Rumah Warna Warni Di Malahing	Peningkatan Wisata Pesisir	Kampung Malahing	Bontang	PKT & Warga Malahing	61,214,600
11	Pekerjaan Rumah Genset 2X2M Kampung Malahing	Peningkatan fasilitas listrik	Kampung Malahing	Bontang	PKT & Warga Malahing	25,624,600
12	Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan 3 peserta mahasiswa UGM Yogyakarta	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	1,600,000
13	Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan 1 peserta mahasiswa IPB	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	32,026,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
	Bogor					
14	Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan 1 peserta mahasiswa ITS Surabaya	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	26,632,400
15	Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan 1 peserta mahasiswa Unair Surabaya	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	21,300,000
16	Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan 3 peserta mahasiswa Unpad Bandung	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	32,700,000
17	Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan 4 peserta mahasiswa STEI Tazkia Bogor	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	1,800,000
18	Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan 8 peserta mahasiswa Unmul Samarinda	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	188,490,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
19	Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan 9 peserta mahasiswa ITK Balikpapan, Kaltim	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	172,900,000
20	Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan 1 peserta mahasiswa ISI Yogyakarta	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	5,283,200
21	Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan 1 peserta mahasiswa Unbraw	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	7,092,000
22	Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan 2 peserta mahasiswa Unhas Makasar	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	11,700,000
23	Pra Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	413,624,970
24	Program Beasiswa PKTPP SD, SMP & SMA	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	824,923,000
25	Biaya Berobat Peserta PKTPP Angkatan 2016	Peningkatan Kesehatan	Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	443,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
26	Diklat Pemberdayaan Masyarakat Basic Safety Training KLM	Peningkatan SDM Masyarakat Bontang	Nelayan Kota Bontang	Bontang	PKT	83,292,000
27	Pekan Olahraga Provinsi Kutim Cab. Tenis Meja	Pembinaan Bidang Olahraga	Atlit Tenis Meja	Kutim	PTMSI Bontang	69,326,400
28	Seleksi Sea Games Atlet Jujitsu Inkubator Bisnis di Bontang	Pembinaan Bidang Olahraga	Atlit ABK Bontang	Bontang	PKT	10,505,549
29	Inhouse Training Cleaning Service	Peningkatan SDM Cleaning Service	CS PT Pupuk Kaltim	Bontang	PKT	37,080,000
30	Reuni Akbar Alumni PKT Peduli Pendidikan	Mempererat silaturahmi penerima manfaat Program Beasiswa PKTPP	Alumni Beasiswa PKTPP	Bontang	PKT	15,000,000
31	Bantuan Seragam Siswa Beasiswa Tidak Mampu	Peningkatan Fasilitas Pendidikan	Penerima Manfaat Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	12,000,000
32	Biaya Pendidikan Akhir S1 Fhadyah Ramadhani	Peningkatan Fasilitas Pendidikan	Penerima Manfaat Warga Kurang Mampu	Bontang	PKT	6,725,000
33	Kejurkot Walikota Cup 2019 PKT Badminton Academy	Pembinaan Bidang Olahraga	Atlit Badminton Usia Dini warga Bontang	Bontang	PKT	18,910,000
34	Kompetisi Project Management Challenge	Peningkatan Kualitas SDM	Penerima Manfaat Beasiswa PKTPP	Bontang	PKT	3,000,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
	2019 Peserta PKTPP					
35	Lomba Guru SMA Berprestasi & TC OSN SMA	Peningkatan Kualitas SDM	Guru & Siswa YPK	Jakarta	YPK	17,350,000
36	Lomba Cerdas Cermat Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas SDM	Siswa/I Bontang	Bontang	SMAN 2	2,500,000
37	Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional & TC OSN SM	Peningkatan Kualitas SDM	Siswa/I Berprestasi YPK	Banyuwangi	YPK	26,325,850
38	Inhouse Training Cleaning Service Tahap II	Peningkatan SDM Cleaning Service	CS PT Pupuk Kaltim	Bontang	PKT	67,400,000
39	Turnamen Tenis Meja se-Kalimantan	Pembinaan Bidang Olahraga	Atlit Tenis Meja Binaan Pupuk Kaltim	Bontang	PKT	20,000,000
40	Turnamen Tenis Ganda Perorangan se-Kota Btg	Pembinaan Bidang Olahraga	Masyarakat Bontang	Bontang	PELTI Bontang	4,500,000
41	Kejurprov PBSI Kaltim 2019	Pembinaan Bidang Olahraga	Atlit Badminton Usia Dini warga Bontang	Bontang	PKT	27,250,000
42	Bantuan Seragam Panitia Hari Raya Qurban 1440	Bantuan Penunjang Kegiatan	Panitia Idul Qurban	Bontang	Panitia Idul Qurban Baiturrahman	11,250,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
43	Musyawarah Temu Karya Luar Biasa KT Citra Guntung	Pembinaan Organisasi Karang Taruna	Karang Taruna	Bontang	Karang Taruna Guntung	3,000,000
44	English Drama & Akustik Festival SMP YPK	Peningkatan Kualitas SDM	Siswa/I YPK	Bontang	YPK	12,000,000
45	Partisipasi Dana Rakernas & Gelar Karya Kursus (Suvi Training dan BBEC)	Peningkatan Kualitas SDM	Lembaga Pelatihan Kerja Suvi Training dan BBEC	Bontang	Lembaga Pelatihan Kerja Suvi Training dan BBEC	5,000,000
46	Pengelolaan Pendidikan ABK SLB YPK	Peningkatan Kualitas SDM	Siswa SLB YPK	Bontang	YPK	125,000,000
47	Survei Data Penerima Program Pelatihan (IPLB)	Pendataan Penerima Program Sosialisasi	Masyarakat Loktuan	Bontang	PKT	9,500,000
48	HUT IPLB Ke-8 (Sewindu) & Turnamen Futsal	Pembinaan Bidang Olahraga	Masyarakat Bufferzone	Bontang	IPLB	5,000,000
49	Kejurda Taekwondo Indonesia Bontang Open 2020	Pembinaan Bidang Olahraga	Masyarakat Bontang	Bontang	Taekwondo Indonesia	4,500,000
50	Pengadaan Peralatan Selam Pemantauan Terumbu Karang di Bontang	Peningkatan Sarana Pemantauan Terumbu Karang	Kelompok Binaan PKT (KIMASEA)	Bontang	PKT	24,598,000
51	Pelaksanaan Bulan K3 Nasional 2019	Peningkatan Pengetahuan dan	Masyarakat Bufferzone	Bontang	PKT	242,320,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
		Keterampilan Bidang K3				
52	Instalasi Conveyor TPST Piere Tendean di Bontang	Pemasangan Alat Pemilah Sampah untuk memudahkan pengerjaan pemilahan sampah	KSM dan Kelompok TPST	Bontang	TPST Bontang Kuala	37,525,867
53	Reintroduksi Anggrek Hitam di Tahun 2019	Pelestarian Tanaman Langka	Budidaya Tanaman Anggrek Hitam	Bontang	PKT	127,900,000
54	Rehab Rumah Kampung Malahing	Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Malahing	Warga Kampung Malahing	Bontang	PKT	96,785,050
55	Pelaksanaan Program Kelompok Cangkang Salona	Pemanfaatan Limbah Cangkang Kepiting	Warga Selambai Loktuan	Bontang	PKT	200,000,000
56	Pameran Gelar Produk Unggulan Difabel & KUKM	Promosi Produk buatan ABK Inbis Permata Bunda	ABK Inbis Permata Bunda	Bontang	PKT	65,448,272
57	Pengecatan Jalan Kampung Malahing	Peningkatan Infrastruktur	Kampung Malahing	Bontang	PKT	37,048,450
58	Pembuatan Tas Ramah Lingkungan	Pemanfaatan Limbah Karung Tidak Terpakai	Binaan Pupuk Kaltim	Bontang	PKT	6,600,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
59	Pembangunan Pilot Plant Pupuk Organik Cair BSF	Pemanfaatan Limbah Sampah Organik	Peningkatan Produksi Pupuk Organik Cair	Bontang	PKT	121,778,000
60	Pembuatan dan penurunan 200 Terumbu Karang Tahap I	Rehabilitasi Terumbu Karang	Perbaikan Ekosistem Laut	Perairan Tobok Batang	PKT	219,365,000
61	Program Pengolahan Sampah Terpadu 2019	Peningkatan Penerima Manfaat di Lingkungan TPST Piere Tendeau	Kelompok Swadaya Masyarakat TPST Piere Tendeau	TPST Bontang Kuala	PKT	149,000,000
62	Program Kerja Inkubator Bisnis Permata Bunda Bontang	Pengembangan ABK	ABK Inbis Permata Bunda	Bontang	PKT	121,540,150
63	Knowledge Sharing Pemanfaatan Limbah Cangkang Kepiting	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	Warga Selambai Loktuan	Bontang	PKT	32,183,950
64	Pembuatan Rumah Produksi Kampung Malahing	Peningkatan Olahan Budidaya Rumput Laut dan Teripang	Warga Kampung Malahing	Bontang	PKT	184,373,399
65	Asia Responsible Enterprise Awards (AREA)	Penghargaan CSR tingkat Asia	CSR Pupuk Kaltim	Taiwan	AREA	120,954,875
66	Program Pelatihan Kerja Suci Training	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat Kota Bontang	Bontang	PKT	590,000,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
67	Program Kesehatan "Mobil Sehat Goes To RT"	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Masyarakat Bufferzone	Bontang	PKT	41,400,000
68	Pengembangan Replikasi KJA Tahap I	Pengembangan Keramba Jaring Apung di Bontang	Nelayan Kota Bontang	Bontang	PKT	450,000,000
69	Program Server Mang Budi Tahun 2019	Budidaya Tanaman Mangrove	Warga Loktuan dan Lingkungan Perusahaan	Bontang	PKT	206,145,200
70	Monev Program Inbis & Bukber di INBIS bersama	Evaluasi Program	Inbis Permata Bunda	Bontang	PKT	8,836,000
71	Study Banding Program Inbis Permata Bunda	Peningkatan Kualitas SDM	Inbis Permata Bunda	Malang	PKT	90,244,106
72	Program Kerja Inbis Tahun 2019	Pengembangan ABK	ABK Inbis Permata Bunda	Bontang	PKT	414,688,822
73	Pelepasan Ikan Napoleon dan Penyu di KJA	Pelestarian Lingkungan	Ekosistem Laut	Bontang	PKT	16,850,000
74	Pelatihan / Sertifikasi Selam	Peningkatan Kualitas SDM	Internal PKT	Bali	PKT	60,000,000
75	Renovasi Jaringan Distribusi Listrik Malahing Thn 2019	Peningkatan Infrastruktur	Kampung Malahing	Bontang	PKT	138,902,500



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
76	Peresmian Kampung Berdaya & Sosialisasi Proper	Pengembangan Inbis dan Kampung Aren	Program INBIS Permata Bunda dan Kampung Aren Ramah Disabilitas	Bontang	PKT	19,319,000
77	Pembuatan Kandang Ayam IPLB	Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok IPLB	Bontang	PKT	350,000,000
78	Peningkatan Kapasitas & Kelembagaan Kelompok Ma'rifah Herbal	Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan	Kelompok Ma'rifah Herbal	Jakarta	PKT	52,964,540
79	Pengujian SNI Produk Kain Batik Kuntul Perak	Standarisasi Mutu Produk Binaan CSR PKT	Batik Kuntul Perak	Bontang	PKT	910,000
80	Pengurusan SNI Produk Mitra Binaan CSR Tahun 2019	Standarisasi Mutu Produk Binaan CSR PKT	Batik Kuntul Perak	Bontang	PKT	15,041,600
81	Program Pengembangan Ekowisata wil. Bufferzone	Peningkatan Ekowisata Pesisir	Destinasi Wisata Kota Bontang	Bontang	PKT	62,000,000
82	Program Pemberdayaan Kampung Malahing Tahap II	Peningkatan Kualitas SDM	Kampung Malahing	Bontang	PKT	500,000,000
83	Sertifikasi SNI Batik Mitra Binaan CSR	Standarisasi Mutu Produk Binaan CSR	Batik Kuntul Perak	Bontang	PKT	10,300,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
		PKT				
84	Renovasi Sekretariat IPLB Kelurahan Loktuan	Bantuan Infrastruktur	Kelompok IPLB	Bontang	PKT	172,780,000
85	Program PKT Badminton Academy untuk Masyarakat	Pembinaan Bidang Olahraga	Atlit Badminton Usia Dini warga Bontang	Bontang	PKT	141,169,500
86	Rapat Bersama IPLB dan Wawancara AREA	Rapat Koordinasi Program	Penerima Manfaat Program	Bontang	PKT	1,834,800
87	Survey Kepuasan Lingkungan Tahun 2019	Pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima manfaat	Warga Kota Bontang	Bontang	PKT	300,000,000
88	Pengujian Sampel Kain Batik Trf. a.n Irma Safni	Standarisasi Mutu Produk Binaan CSR PKT	Binaan Pupuk Kaltim	Bontang	PKT	820,000
89	Penganugerahan Nusantara CSR Award 2019	Penghargaan CSR tingkat Nasional	CSR Pupuk Kaltim	Jakarta	La Tofi	50,000,000
90	Keikutsertaan pada Indonesia Quality Expo (KJA Kop BEM)	Memperkenalkan program CSR Perusahaan	Binaan Pupuk Kaltim	Semarang	PKT	26,000,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
91	Audit SNI Batik Kuntul Perak	Standarisasi Mutu Produk Binaan CSR PKT	Binaan Pupuk Kaltim	Bontang	PKT	3,486,200
92	Kunjungan Tim Audit SNI Batik Kuntul Perak	Standarisasi Mutu Produk Binaan CSR PKT	Binaan Pupuk Kaltim	Bontang	PKT	9,923,130
93	Uji Kelayakan Pengolahan Ikan Amplang Barokah	Standarisasi Mutu Produk Binaan CSR PKT	Binaan Pupuk Kaltim	Bontang	PKT	1,000,000
94	Pengembangan Keramba Jaring Apung Tahap II	Pengembangan Keramba Jaring Apung di Bontang	Nelayan Kota Bontang	Bontang	PKT	325,000,000
95	Pemagangan, Kunjungan dan KS Pengolahan Sampah	Peningkatan Kualitas SDM	Kelompok Mekarsari	Bontang	PKT	13,980,000
96	Sertifikasi Terapis dan Pengurusan SNI Produk Ma'rifah	Peningkatan Kualitas SDM	Kelompok Ma'rifah Herbal	Jakarta	PKT	76,996,660
97	Kunj Dirjen KLHK & Peresmian Kp Ramah Disabilitas	Pengembangan Inbis dan Kampung Aren	Program INBIS Permata Bunda dan Kampung Aren Ramah Disabilitas	Bontang	PKT	103,188,000
98	Pameran Indonesia Quality Expo (IQE) 2019	Memperkenalkan program CSR	Binaan Pupuk Kaltim	Semarang	PKT	47,764,189



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
	(CSR)	Perusahaan				
99	Pelatihan Kejuruan Instalasi Listrik Tenaga Induksi (Suvi Training)	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	Masyarakat Bufferzone	Bontang	PKT	24,000,000
100	Program Kampung Berdaya Ramah Disabilitas	Pengembangan Kampung Aren Ramah Disabilitas	Program Kampung Aren Ramah Disabilitas	Bontang	PKT	550,000,000
101	Program Terumbu Karang Buatan Tahun 2019	Rehabilitasi Terumbu Karang	Perbaikan Ekosistem Laut	Perairan Tobok Batang	PKT	445,000,000
102	Program Better Living in Malahing	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Warga Kampung Malahing	Bontang	PKT	500,000,000
103	Acara Buka Puasa Bersama Manajemen PKT dengan Anak Panti Asuhan	Kepedulian Perusahaan terhadap Masyarakat Sekitar	Masyarakat Bufferzone	Bontang	PKT	25,000,000
104	Kegiatan Bulan Lingkungan Hidup Tahun 2019	Peningkatan Pengetahuan dan Pendidikan terkait dengan Lingkungan	Karyawan Pupuk Kaltim dan Masyarakat Bontang	Bontang	PKT	147,000,000
105	Konsinyering Propernas Tahun 2019	Pengumpulan data dan dokumen proper 2019	Propernas Emas 2019	Bontang	PKT	10,000,000
10	Penyusunan Dokumen	Adisionalitas dan	Propernas Emas 2019	Bontang	PKT	243,871,951



LKPJ Walikota Bontang Tahun Anggaran 2019

No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
6	DRKPL	inovasi terkait Pengelolaan Lingkungan				
Sub Total						11,738,616,170
Total						24,994,008,572

**Tabel 4.10.**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. PAMA

No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Januari	Bantuan dana santunan anak yatim piatu sebanyak 50 orang @ Rp. 100.000,- dalam rangka kegiatan doa Bersama Masyarakat kota Bontang di halaman Polres Bontang	Santunan anak yatim piatu	Anak yatim piatu Kota Bontang	Halaman Polres Bontang	Polres Bontang	5,000,000
	Biaya pelaksanaan turnamen Badminton PAMA Indo Cup Ke-4 Tahun 2019	Kejuaraan dan pembinaan atlit Bulu Tangkus Kota Bontang	Calon atlit dan atlit kota Bontang	Gor BSG	Pama	90,450,000
	bantuan komputer dalam rangka mendukung SMP Negeri 6 Bontang Lestari (Ring 1) untuk Persiapan Ujian Nasional	Komputer	SMN 06 Kota Bontang	SMN 06 Kota Bontang	SMN 06 Kota Bontang	13,850,000
	Bantuan biaya dalam rangka kegiatan pengabdian Masyarakat Mahasiswa STIK Ke-75/WDB di Polres Bontang	Kegiatan Organisasi	Mahasiswa STIK	Polres Bontang	STIK	3,000,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan biaya dalam rangka Peresmian dan Pelantikan Pengurus Sasana Tinju Rudal 002 Bontang Camp. Boxing	Ceremonial	Den Rudal 002 Bontang	Den Rudal 002 Bontang	Den Rudal 002 Bontang	2,500,000
	Bantuan biaya dalam rangka Jambore Nasional Generasi Berencana (Genre) SMAN 2 Bontang di Bandung	Ceremonial	SMAN 2 Bontang	Bandung	SMAN 2 Bontang	2,500,000
	bantuan biaya dalam rangka kegiatan YPK Cup Basketball Competition dan Dance Competition	Kompetisi	SMK YPK	SMK YPK	SMK YPK	1,500,000
	bantuan b iaya dalam rangka kegiatan Reuni Akbar Paguyuban Warga Tulung Agung	Reuni	Paguyuban Warga Tulung Agung	Bontang	Paguyuban Warga Tulung Agung	2,000,000
	Bantuan biaya dalam rangka pengadaan CCTV untuk mendukung Program Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Bontang	CCTV	Masyarakat Kota Bontang	Bontang	Polres Bontang	3,000,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan speaker aktif dan mic untuk mendukung fasilitas kantor Kelurahan Bontang Lestari	speaket aktif dan mic	Kelurahan Bontang Lestari	Kelurahan Bontang Lestari	Kelurahan Bontang Lestari	1,800,000
	Bantuan kegiatan pelatihan wasit PBSI Bontang Jum'at dan Sabtu Tanggal 18 & 19 Januari 2019	Pelatihan wasit PBSI	Wasit PBSI	Bontang	Wasit PBSI	2,848,000
Februari	Bantuan konsumsi snack sebanyak 150 kotak @ Rp. 7.500,- dalam rangka persiapan UNBK SMK/SMK se-Bontang dari HMB Cabang Yogyakarta	UNBK SMK	SMK Se bontang	Bontang	HMB	1,125,000
	Modul Training Mekanik Helper unit A2B untuk pemuda Desa Binaan PAMA	Pelatihan mekanik	Pemuda Desa Ring 1	Bontang	Pama	4,179,126
	Bantuan Biaya Kegiatan Lomba Giat Prestasi Penggalang Ke II Kodim 0908 Bontang	Lomba	Kodim 0908 Bontang	Bontang	Kodim 0908 Bontang	2,500,000
	Bantuan Deklarasi Millenial Road Safety Polres Bontang	Kampanye safety	Masyarakat Bontang	Bontang	Polres Bontang	7,500,000
	Bantuan biaya dalam rangka Turnamen Sepak Bola Happy	Turnamen Sepak Bola	Legend 45 Bontang	Bontang	Legend 45 Bontang	4,500,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Legend U-45 Kota Bontang					
	Bantuan Biaya Ujian Praktek Pelatihan Wasit Dari PBSI	Pelatihan wasit PBSI	Wasit PBSI	Bontang	Wasit PBSI	5,500,000
	Bantuan Biaya konsumsi Snack sebanyak 160 kotak @ Rp. 7.500,- dalam rangka kegiatan pelatihan publik Mahasiswa STITEK Bontang	Pelatihan mahasiswa	STITEK Bontang	Bontang	STITEK Bontang	1,200,000
	Pama mengajar ke SMK Putra Bangsa	Pama mengajar	SMK Putra Bangsa	Bontang	SMK Putra Bangsa	5,525,000
	Biaya konsumsi Snack sebanyak 150 kotak @ Rp. 10.000,- dalam rangka kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional di kota Bontang oleh Polres Bontang	Ceremonial	Masyarakat Bontang	Bontang	Polres Bontang	1,500,000
Maret	Bantuan biaya dalam rangka Polres Bontang mengikuti Kejurda Inkanas / Kapolda Cup Tahun 2019 di Samarinda	Kejurda	Polres Bontang	Bontang	Polres Bontang	2,500,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan biaya silaturahmi Akbar Paguyuban Warga Jogja Istimewa (PAGAR JAWA)	Silaturahmi	Pagar Jawa	Bontang	Pagar Jawa	2,000,000
	Bantuan dana dalam rangka HUT PWSB ke – 2 tahun 2019	Ceremonial	PWSB	Bontang	PWSB	2,000,000
	Bantuan biaya dalam rangka acara super moke Kodim 0908 Bontang Tahun 2019	Ceremonial	Kodim 0908 Bontang	Bontang	Kodim 0908 Bontang	5,000,000
	Bantuan biaya dalam rangka HUT ke 21 Paguyuban Warga Kediri Kota bontang	Ceremonial	Warga Kediri Kota Bontang	Bontang	Warga Kediri Kota Bontang	2,000,000
	Bantuan biaya Turnamen Golf millenial Polres Bontang	Turnamen Golf	Turnamen Golf	Bontang	Polres Bontang	5,000,000
	Bantuan biaya dalam rangka Apel Linmas Gabungan dalam rangka persiapan pengalaman Pileg di Mako Polres Bontang	Persiapan Pileg	Masyarakat Bontang	Bontang	Polres Bontang	2,000,000
	Bantuan konsumsi dalam rangka kegiatan deklarasi Road Safety di wilayah Polres Bontang	Kampanye safety	Masyarakat Bontang	Bontang	Polres Bontang	3,750,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan RTH Bontang Lestari	Infrastruktur	Masyarakat Bontang	Bontang	Pemda Bontang	700,000,000
	Bantuan beasiswa pelatihan mekanik motor kerjasama Pama, BLK dan Indominco	Toolkit	Pemuda Desa Ring 1	Bontang	IMM dan Pama	11,040,000
	Bantuan Beasiswa Prestasi Pekan Budaya SMPN 6 Bontang Lestari, Kota Bontang	Bantuan beasiswa	SMPN 06 Bontang Lestari	Bontang	SMPN 06 Bontang Lestari	8,845,000
April	Bantuan partisipasi biaya dalam rangka HUT lanal dalam acara FUN Bike	Kampanye kesehatan	Masyarakat Bontang	Bontang	Lanal Kota Bontang	3,000,000
	Dana santunan jompo dan dhuafa Kelurahan Api-Api bersama dengan KPKB 64 orang @ Rp. 150000	santunan Jompo dan dhuafa	Jompo dn dhuafa di Kel Api Api	Bontang	Kelurahan Api-Api	9,600,000
	Biaya Fasilitasi sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk UKM Binaan LPB Pabeta	Sertifikasi halal	UMKM Binaan Pama Bontang	Bontang	Pama	16,450,000
	Biaya Pemasangan baru PDAM RTH Bontang Lestari Persada	Pemasangan PDAM RTH	RTH Bontang Lestari	Bontang	Kelurahan Bontang Lestari	3,935,168



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Biaya pengujian kandungan beras, pupuk cair dan pupuk padat organik ukm binaan LPB pabeta di Balai Penelitian Tanah dan Balai Besar Penelitian Pasca Panen Bogor	Uji kandungan beras	UMKM Binaan Pama Bontang	Bontang	Pama	7,360,000
	Bantuan biaya dalam rangka HIPMI Bontang mengikuti kegiatan Jambore HIPMI PT Se-Asean Tahun 2019	Kegiatan Organisasi	HIPMI Bontang	Bontang	HIPMI Bontang	2,500,000
	Kegiatan Gowes bareng Pama di Guntung	Kampanye kesehatan	Masyarakat Bontang	Bontang	Pama	3,500,000
	Bantuan Biaya dalam rangka kegiatan Kartini Run Bhayangkari Polres Bontang Tahun 2019	Ceremonial	Bhayangkari Polres Bontang	Bontang	Bhayangkari Polres Bontang	2,500,000
	Bazar amal PIKP Bontang tahun 2019	Bazar sembako	Jompo dn dhuafa di Kel Api Api	Bontang	Jompo dn dhuafa di Kel Api Api	2,500,000
	Bantuan Biaya MTQ ke XVI tingkat Bontang Lestari	MTQ	MTQ Kota Bontang	Bontang	MTQ Kota Bontang	2,000,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan kegiatan penghijauan di RTH Bonles	Penanaman pohon	RTH Bontang Lestari	Bontang	Kelurahan Bontang Lestari	21,525,000
	Bantuan kelompok tari jepen Guntung	Pelestarian kebudayaan	RTH Bontang Lestari	Bontang	Pama	3,000,000
	Kegiatan peresmian RTH Bontang lestari persada dan Buku untuk perpustakaan mini di RTH	Ceremonial	RTH Bontang Lestari	Bontang	Pama	5,288,000
	Bantuan konsumsi Nasi kotak sebanyak 150 kotak @ Rp. 7.500,- dalam rangka pengajian rutin bulanan Masjid Al-Ikhlas Segendis RT. 12 Bontang Lestari	Kegiatan keagamaan	Masyarakat Bontang	Bontang	Pengurus Masjid Al Ikhlas Bontang	1,125,000
	Bantuan konsumsi nasi kotak sebanyak 165 kotak @ Rp. 17.500,- dalam rangka bantuan konsumsi untyuk personil BKO dari Polda Kaltim pengamanan pemilu di Polres Bontang	Pengamanan pemilu	Masyarakat Bontang	Bontang	Polres Bontang	4,387,500
Mei	Biaya dalam rangka kegiatan	Bazar sembako	Jompo dn	Bontang	Pama	32,400,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bazar Sembako Murah		dhuafa di Kota Bontang			
	Bantuan biaya dalam rangka Bakti Sosial Anjangsana ke Panti Asuhan oleh Sub Den Pom Bontang	Santunan anak yatim piatu	Panti Asuhan Bontang	Bontang	Den Pom Bontang	5,850,000
	Bantuan biaya kegiatan bakti sosial bulan Ramadhan 1439 H untuk Badak Golf Bontang (BGB)	Bakti sosial	Masyarakat Bontang	Bontang	BGB Bontang	4,000,000
	Biaya safari ramadhan 1440 H bersama PIKP	safari ramadhan ke Panti asuhan	Panti Ashuan Nurul Iman	Bontang	Pama	25,400,000
	bantuan biaya dalam rangka Happy Tournament Forkopimda Cup IV dan farewell Drive Danden Arhanud 002 Bontang	Tunamen	Tournament Forkopmida Cup IV	Bontang	Den Arhanud Bontang	10,000,000
	Bantuan biaya pembelian doorpice dalam rangka peringatan hari kartini tahun 2019 oleh GOW Bontang	Peringatan hari Kartini	GOW Bontang	Bontang	GOW Bontang	1,000,000
	bantuan biaya dalam rangka kegiatan mayday oleh Disnaker Kota Bontang	Ceremonial	Masyarakat Bontang	Bontang	Disnaker Bontang	5,000,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Biaya pembelian bantuan sembako instansi Pemerintah dalam rangka Hari raya Idul fitri 1440 H	sembako	Jompo dn dhuafa di Bontang	Bontang	Pemda Bontang	40,909,000
	Safari Ramadhan Bontang Lestari Ramadhan 1440 H	safari ramadhan	Masyarakat Bontang Lestari	Bontang	Kelurahan Bontang Lestari	25,650,000
	Bantuan biaya kegiatan lomba ramadhan remaja masjid ashabul kahfi Bontang Lestari	Kegiatan keagamaan	Remaja masjid Ashabul Kahfi Bontang Lestari	Bontang	Remaja masjid Ashabul Kahfi Bontang Lestari	1,000,000
	kegiatan baksos Kelurahan Api-api	Bakti sosial	Jompo dn dhuafa di Kel Api-api	Bontang	Pama	1,909,800
	Bantuan konsumsi Tabligh Akbar Ulama Palestina dan Buka Puasa bersama Aliansi Pemuda islam Kota Bontang (snack 150 kotak @ 7500)	Kegiatan keagamaan	Masyarakat Bontang	Bontang	Aliansi Pemuda Islam Kota Bontang	2,925,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan konsumsi pengajian rutin Remaja masjid kota Bontang dan TPA Ar-Rahman (Snack 100 kotak @7500 & nasi 100 kotak @17500)	Kegiatan keagamaan	Masyarakat Bontang	Bontang	Pengurus masjid Ar Rahman	3,400,000
Juni	Biaya pembelian sembako bantuan korban banjir di Bontang dan Desa Teluk Pandan	santunan	Masyarakat Bontang	Bontang	Masyarakat Bontang	7,050,899
	Bantuan biaya dalam rangka kegiatan Gebyar Nasional Pemuda Pancasila oleh PAC Pemuda Pancasila Kota Bontang	Kegiatan Organisasi	Pemuda Pancasila	Bontang	Pemuda Pancasila	2,500,000
	Bantuan pembangunan Pondok Pesantren Tahfizul Qurban As'adiyah Asy-Syifa	Bantuan infrastruktur	Pondok Asy Syifa	Bontang	Pondok Asy Syifa	3,000,000
	Bantuan biaya pembuatan Pos Terpadu Idul Fitri 1440 H Polres Bontang	pengamanan lebaran	Masyarakat Bontang	Bontang	Polres Bontang	1,500,000
	Bantuan biaya dalam rangka pelaksanaan pentas seni tari daerah modern memperingati hari tari sedunia oleh forum	pentas seni	Masyarakat Bontang	Bontang	Forum seniman Kota Bontang	1,500,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	seniman tari kota bontang					
	Bantuan biaya dalam rangka Gowes Bersama Adem Ayem Se-Kalimantan Timur	Kampanye kesehatan	Masyarakat Kalimantan Timur	Bontang	Gowes Adem ayem	2,500,000
	Bantuan konsumsi Nasi Kotak sebanyak 150 kotak @ Rp. 17.500,- dalam rangka Pengajian rutin bulanan bersama remaja masjid kota Bontang dan TPA Arrahman	Kegiatan keagamaan	Masyarakat Bontang	Bontang	Pengurus masjid Ar Rahman	1,750,000
	Pelaksanaan program pelatihan welder dan mekanik untuk masyarakat desa binaan sharing dengan PT. Indominco	pelatihan	Desa binaan Ring 1	Bontang	Pama	6,800,000
	Biaya bantuan dalam ragka kegiatan MTQ tingkat Kec. Bontang Selatan	Kegiatan keagamaan	MTQ Kota Bontang	Bontang	MTQ Kota Bontang	3,000,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan biaya turnamen futsal dalam rangka Anniversary (SCI) Ke-2 Ikatan Ke-2 Loktuan Bersatu (IPLB) Kota Bontang	turnamen futsal	IPLB	Bontang	IPLB	1,000,000
	Bantuan biaya dalam rangka kegiatan Festival Budaya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kota Bontang Tahun 2019	Kegiatan kesenian	KIM	Bontang	KIM	2,000,000
	Biaya dalam rangka acara Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSU) BPD Kota Bontang	Kegiatan keagamaan	KKSU	Bontang	KKSU	1,500,000
	Biaya dalam rangka kegiatan Khitanan Massal Tahun 2019 untuk Masyarakat sekitar Ring 1 PAMA Sharing dengan YIMP	Khitanan massal	Anak anak desa Ring 1	Bontang	Anak anak desa Ring 1	52,000,000
Agustus	Bayar Bantuan Gereja Bethel Bontang	Kegiatan keagamaan	Gereja Bethel Bontang	Bontang	Gereja Bethel Bontang	1,500,000
	Bayar Pembelian Tanaman untuk Penghijauan di 8AS & SMPN 6	Penanaman pohon	SMPN 06 Bontang	Bontang	SMPN 06 Bontang	6,000,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bayar Bantuan Kegiatan Golf Polres Bontang	Turnamen Golf	Polres Bontang	Bontang	Polres Bontang	6,000,000
	Bayar Bantuan HIPKI	Kegiatan Organisasi	HIPKI	Bontang	HIPKI	2,500,000
	Bayar Biaya Kegiatan HUT BOC XI	Kegiatan Organisasi	BOC	Bontang	BOC	3,000,000
	Bayar Bantuan MTQ Bontang Barat 2019	Kegiatan keagamaan	MTQ Bontang Barat	Bontang	MTQ Bontang Barat	1,500,000
	Bayar Pelantikan IPSI	Kegiatan Organisasi	IPSI	Bontang	IPSI	2,500,000
September	Bantuan biaya dalam rangka sponsorship kegiatan Turnamen Golf BGB – Merdeka Games 2019 se-Kalimantan Timur	Turnamen Golf	BGB Bontang	Bontang	BGB Bontang	5,000,000
	Bantuan biaya dalam rangka kegiatan Acara Pelaksanaan Adat Budaya Bebalai Tahun 2019	Pelestarian kebudayaan	KPKB Bontang	Bontang	KPKB Bontang	3,500,000
	Bantuan biaya dalam rangka mengikuti Pameran Expo Kutim 2019 untuk UKM Makanan	Promosi produk UMKM	UMKM Binaan Pama Bontang	Bontang	UMKM Binaan Pama	33,650,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Kemasan Bontang				Bontang	
	bantuan dana pelantikan Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim – Kaltara	Kegiatan Organisasi	Laskar pemuda adat dayak Kaltim	Bontang	Laskar pemuda adat dayak Kaltim	5,000,000
	bantuan konsumsi snack donor darah sebanyak 100 kotak @ Rp. 7.500 dalam rangka donor darah PMI Bontang dinas pariwisata bontang	Donor darah	PMI Bontang	Bontang	Dinas Pariwisata Bontang	750,000
	bantuan konsumsi nasi kotak sebanyak 100 kotak @ Rp. 17.500,- dalam rangka pengajian bulanan Ar – Rahman Masjid Al – Ikhlas Segendis	Kegiatan keagamaan	Masjid Al Ikhlas Segendis	Bontang	Masjid Al Ikhlas Segendis	1,750,000
	Bantuan konsumsi nasi kotak sebanyak 280 kotak @ Rp. 17.500,- (40 kotak per hari selama 7 hari) dalam rangka petugas karhutla Polres bontang	penanggulangan kebakaran	Polres Bontang	Bontang	Polres Bontang	4,900,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	di Bontang Lestari					
Oktober	Bayar Bontang Race Laut Bontang	Tunamen	Bontang Race	Bontang	Bontang Race	1,000,000
	Bayar UKM Bontang mengikuti DPK Bontang	Kegiatan Organisasi	DPK Bontang	Bontang	DPK Bontang	1,000,000
	Bayar PBVSI Gubernur Cup 2019	Tunamen	PBVSI Bontang	Bontang	PBVSI Bontang	4,000,000
	Bayar Bantuan Kegiatan Bontang Fishing Tournament 2019	Tunamen	Bontang Fishing Tournament	Bontang	Bontang Fishing Tournament	2,000,000
November	Pembelian Mesin Packaging beras organik	produk umkm	UMKM Binaan Pama Bontang	Bontang	UMKM Binaan Pama Bontang	16,833,000
	Pembutan Kemasan beras premium organik	produk umkm	UMKM Binaan Pama Bontang	Bontang	UMKM Binaan Pama Bontang	8,000,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan Pembuatan Material taman RT 19 Perum Bumi Persada Indah	Infrastruktur	perumahan bonles	Bontang	perumahan bonles	13,400,000
	Kemah Sinergis Pama bersama Siswa SMP Bontang	Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan	Siswa siswi perwakilan Ring 1	Bontang	Siswa siswi perwakilan Ring 1	16,130,000
	Donor darah PMI Bontang Bantuan Souvenir & Alkes	Program donor darah	PMI Bontang	Bontang	PMI Bontang	7,500,000
	Bantuan doorprize dalam rangka kegiatan Fun Bike Naker 20 TH Bontang anniversary	Kampanye kesehatan	Masyarakat Bontang	Bontang	Pemda Bontang	3,000,000
	HUT Satpam Ke 39 2019 Bontang	Ceremonial	Polres Bontang	Bontang	Polres Bontang	3,000,000
	Bantuan Cindelas Cup 3	Ceremonial	Masyarakat Kalimantan Timur	Bontang	Cindelas	2,000,000
	Bantuan kegiatan kampanye Narkoba BNNK Bontang	Kampanye kesehatan	Masyarakat Bontang	Bontang	BNNK Bontang	2,500,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan support presentasi Budaya SMPN 06 Bontang Lestari Ke Mendikbud	Pelestarian kebudayaan	SMPN 06 Bontang	Bontang	SMPN 06 Bontang	3,000,000
	Bantuan Pengobatan dan tes USG Gratis di Desa Ring 1 kerjasama IMM	Pengobatan gratis	Bontang lestari	Bontang	Kelurahan Bontang Lestari	4,000,000
	Bantuan kegiatan Rapimnas Kudu 2019	Kegiatan Organisasi	Rapimnas Kudu	Bontang	Rapimnas Kudu	3,000,000
	Bantuan Natal tahun 2019	Kegiatan keagamaan	Jemaat Kristen dan Katolik Bontang	Bontang	Jemaat Kristen dan Katolik Bontang	16,000,000
	Bantuan Penanaman pohon bersama Bapelitbang dan Walikota Bontang	Penanaman pohon	Penanaman pohon Bontang	Bontang	Pemda Bontang	3,000,000
	Bantuan Konsumsi Maulid Nabi Masjid Nurul Hidayah Bontang Lestari Segendis	Kegiatan keagamaan	Masjid Nurul Hidayah Bonles	Bontang	Masjid Nurul Hidayah Bonles	1,500,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan konsumsi dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW & Launching Pondok Tahfidz Al-Qur'an Wal Hadist	Kegiatan keagamaan	Pondok Tahfidz Bontang	Bontang	Pondok Tahfidz Bontang	3,500,000
Desember	Bayar kegiatan Pujawali PHDI Bontang 2019	Kegiatan Organisasi	PHDI Bontang	Bontang	PHDI Bontang	2,000,000
	Bayar Bantuan Jalan Sehat KPU	Kampanye kesehatan	Masyarakat Bontang	Bontang	Masyarakat Bontang	2,500,000
	Bayar Santunan Anak Yatim 50 Orang Bontang Sholawat	Santunan anak yatim piatu	Anak yatim piatu Kota Bontang	Bontang	Anak yatim piatu Kota Bontang	5,000,000
	Bayar Bantuan Kegiatan BNN Bontang	Kampanye kesehatan	Siswa siswi Bontang	Bontang	BNNK Bontang	3,250,000
	Bayar HUT SMPN 1 Bontang	Ceremonial	SMPN 01 Bontang	Bontang	SMPN 01 Bontang	1,000,000
	Bayar Bantuan HUT Satpam Bontang	Ceremonial	HUT Satpam Bontang	Bontang	HUT Satpam Bontang	3,000,000
	Bayar Bantuan Bontang Food Festival	Promosi produk UMKM	UMKM Binaan Pama Bontang	Bontang	UMKM Binaan	3,000,000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					Pama Bontang	
	Bayar Bibit Pohon SMK 4 Bontang	Penanaman pohon	SMK 4 Bontang	Bontang	SMK 4 Bontang	1,600,000
	Bayar kekurangan taman perumahan bontang lestari	Infrastruktur	Taman bontang lestari	Bontang	Kelurahan Bontang Lestari	3,400,000
Total						1,451,990,500

**Tabel 4.11.**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Indominco Mandiri

NO	Program Utama PPM Tahunan	Rincian Kegiatan PPM Tahunan	Output	Lokasi dan Kelompok Kelompok	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan				254,602,364
	a) Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, dan Keahlian Dasar	Training Mekanik, Operator, Welder, dll	Peningkatan kapasitas Skill bagi Pemuda	Bontang, dan Bontang Lestari	
		Training Teknisi Komputer	Peningkatan kapasitas Skill bagi Pemuda	Bontang, dan Bontang Lestari	
	c) Indominco Mengajar	Indominco Mengajar	Menambah Wawasan keilmuan tentang tambang	Bontang SMA, Universitas	
	d) Literasi	Taman literasi	Mengurangi angka lieterasi anak didik	SMP Bontang Lestari	
	e) Community Sustainability Training	Training Guru HOTS	Peningkatan skill guru dalam pengajaran	Bontang, dan Bontang Lestari	
	f) Bantuan Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan	Fasilitas dan Transportasi Sekolah	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Bontang Lestari	
		Pembuatan Taman Literasi SMP 6	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Bontang Lestari	
		Bantuan pembangunan kantin	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	mts al ikhlas bontang	
2	Kesehatan				206,887,176
	a) Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang	Free Mddical Services	Peningkatan layanan kesehatan khususnya	Bontang lestari	



NO	Program Utama PPM Tahunan	Rincian Kegiatan PPM Tahunan	Output	Lokasi dan Kelompok Kelompok	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
			wilayah dampingan		
		Kampanye HIV dan Obat terlarang di Desa Binaan	Peningkatan Kelimuan bagi Perawat berkaitan BTCLS	Bontang lestari	
		USG untuk Ibu Hamil (Program Stunting)	Peningkatan pelayanan kesehatan Bumil dan Balita untuk program stunting	Bontang lestari	
		Fogging Tahap 1 dan tahap 2	Mengurangi dampak DBD di wilayah binaan	Kanaan, Telihan, dan Bontang Lestari	
	b) Sarana dan/atau Prasarana Kesehatan	Peningkatan Status Puskesmas Menjadi Rumah Sakit Pratama	Peningkatan layanan kesehatan khususnya wilayah dampingan	Bontang lestari	
		Sanitasi Jamban Sehat Tahap 2	Peningkatan layanan kesehatan khususnya untuk sanitasi melalui jamban sehat	Bontang Lestari	
3	Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan				158,996,861
	Kegiatan ekonomi , '- Pertanian, - Perikanan dan Kelautan, '- Kewirausahaan	Hortikultura	Penigkatan dan pengembangan pertanian untuk petani lombok dan bawang	Bontang Lestari	
		Pembuatan Lantai	Peningkatan Hasil Rumput	Bontang Lestari	



NO	Program Utama PPM Tahunan	Rincian Kegiatan PPM Tahunan	Output	Lokasi dan Kelompok Kelompok	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Jemur Rumpit Laut	laut bagi nelayan		
		Home Industri	Penigkatan dan pengembangan wirausaha	Bontang Lestari	
		Usaha Perbengkelan	Penigkatan dan pengembangan bengkel	Bontang Lestari	
4	Kemandirian Ekonomi				190,796,233
		Tarining Welder	Peningkatan kapasitas Skill bagi Pemuda	Bontang Lestari	
		Tarining Perbengkelan Sepeda Motor	Peningkatan kapasitas Skill bagi Pemuda	Bontang Lestari	
5	Sosial dan Budaya				238,495,291
	a) Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan dibidang keagamaan	Sarana TPA Arrahman	Peningkatan kapasitas kelimuan bagi Imam masjid	Bontang Lestari	
		Bantuan baksos dan kajian islam di lapas perempuan bontang	Menigkatkan pelayanan Warga Lapas	Lapas Bontang	
		Pelatihan Fardhu Kifayah	Peningkatan kapasitas kelimuan bagi Imam dan masyarakat khususnya sholat janazah	Bontang Lestari	



NO	Program Utama PPM Tahunan	Rincian Kegiatan PPM Tahunan	Output	Lokasi dan Kelompok Kelompok	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Pelatihan Imam Masjid	Peningkatan kapasitas kelimuan bagi Imam masjid	Bontang Lestari	
		Support Kegiatan Isra Miraj	Partisipasi dan dukungan terhadap dampak bencana alam	Bontang	
		Berbagi Kasih Pada Ummat Kristiani	Partisipasi dan dukungan terhadap dampak bencana alam	Kanaan	
		Hari raya Idul Adha	Partisipasi dan dukungan hari raya idul adha	Bontang Lestari, Kodim, Lanal, Polres, dan Panti Asuhan, Pondok Pesantren	
		Safari Ramadhan	Partisipasi dan dukungan kegiatan safari ramadhan	Bontang Lestari dan Bontang	
		Contractor Forum	Peningkatan kapasitas kontraktor lokal	Bontang	
		COMDEV CUP	Menjalin Silaturahmi antar masyarakat binaan	Bontang Lestari	
	b) Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat	Pengembangan Budaya Bebalai	Pelestarian budaya lokal	Bontang Lestari	
		Hari kemerdekaan 17 agustus	Menjalin Silaturahmi dalam memani kemerdekaan	Kutim	



NO	Program Utama PPM Tahunan	Rincian Kegiatan PPM Tahunan	Output	Lokasi dan Kelompok Kelompok	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
6	Partisipasi dalam pengelolaan lingkungan				158,996,861
	Rehabilitasi area pesisir -	Transplantasi terumbu karang	Pelestarian terhadap lingkungan	Bontang lestari	
	Komitment Taman Nasional Kutai		Pelestarian terhadap lingkungan	bontang	
7	Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM				138,719,000
	Pengembangan Bumdes, KSU, Karang Taruna, dan Home Industri serta fasilitasnya	Penguatan Bumdes, KSU, Karang Taruna, dan Home Industri	Penguatan Lembaga	Bontang lestari	
8	Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM				238,495,291
	Sarana Ekonomi, Sosial dan sarana Lingkungan, Keagamaan, Kesehatan, Pertanian & Peternakan dll	Bantuan pembagunan Mushollah Attaubah		Bontang	
		Bantuan Mushollah Alhilal		Bontang	



NO	Program Utama PPM Tahunan	Rincian Kegiatan PPM Tahunan	Output	Lokasi dan Kelompok Kelompok	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Bantuan pembangunan musholla at-taubah		Bontang utara	
		Pembuatan Gapura kampung KB		Bontang Lestari	
	TOTAL (Rp)				1,585,989,076

Tabel 4.12.

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. KMU (RSPKT Group)

No	Nama Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Realisasi Anggaran
1	Bantuan Dana / Biaya Kegiatan Buffer Zone PT KMU	13 Kegiatan	Bontang	30,460,400
2	Senam Jantung Sehat dan Aerobik di RS PKT dan Klinik2 RSPKT Group, Senam Pro Lansia	800 Peserta	Bontang	80,000,000
3	Biaya Keringanan berobat untuk pasien tidak mampu	58 Peserta	Bontang	113,000,000
4	Magang dan PKL	54 Peserta	Bontang	



No	Nama Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Realisasi Anggaran
				33,120,000
	Senam Jantung sehat,Diabetes dan senam Osteoporosis gratis bagi Pensiunan	40 Peserta	Bontang	252,840,000
5	Hospital Tour buat pelajar SD YPK	33 Peserta	Bontang	2,500,000
6	Pembagian Shopping bags dalam rangka Hari Sampah Nasional	150 Peserta	Bontang	750,000
7	Edukasi Pasien dan Keluarga di poliklinik RSPKT	350 Peserta	Bontang	1,500,000
8	Pembagian Tumbler di lingkungan RSPKT dalam rangka RSPKT Group Ramah lingkungan	75 Peserta	Bontang	5,625,000
9	Penyuluhan Kesehatan terhadap pasien dan pengunjung Rehab medik	400 Peserta	Bontang	7,500,000
10	Bantuan Kegiatan Cerdas Cermat Lingkungan Hidup		Bontang	3,000,000
11	Bantuan berupa tumbler ,topi, tas ramah lingkungan dan bantal leher untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	65 Peserta	Bontang	6,500,000
	Bantuan Santunan Anak Yatim piatu dalam rangka Ramadhan	50 Orang	Bontang	10,000,000
12	Penyerahan bibit tanaman ke dinas	50 Orang	Bontang	



No	Nama Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Realisasi Anggaran
	Pertamanan Kota Bontang			6,500,000
13	Seminar Awam Kesehatan dalam rangka HUT PT KMU (RSPKT GROUP)	100 Peserta	Bontang	15,000,000
14	Senam Jantung Sehat dan Zumba serta pemeriksaan Tekanan Darah Gratis di Klinik Medika Mulya Sanggatta	37 Orang	Bontang	2,500,000
15	Hospital Tour buat pelajar SMU	43 Orang	Bontang	2,500,000
TOTAL				573,295,400





BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bontang Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bontang Tahun Anggaran 2019 ini disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019, yang memuat pelaksanaan semua program dan kegiatan, keberhasilan, dan permasalahan yang dihadapi beserta solusinya, yang meliputi Pengelolaan Keuangan Daerah; Pelaksanaan Urusan Pemerintahan; Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bontang Tahun Anggaran 2019 ini merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bontang yang berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari masyarakat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang.

Kami memiliki harapan besar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat, serta dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif



dan efisien, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaanya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melanjutkan karya pengabdian membangun Kota Bontang yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi.

WALIKOTA BONTANG

dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG